

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN KAMPUNG  
PELANGI DI KOTA SEMARANG**

**Skripsi**

**Program Sarjana (S-1)**

**Jurusan Ilmu Politik**



**Oleh:**

**Hana' Fairuz Suci Ramadhani**

**1906016122**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2023**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Ilmu  
Sosial dan Ilmu Politik  
UIN Walisongo Semarang  
Di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, makakami menyatakan bahwa Skripsi saudara:

Nama : Hana' Fairuz Suci Ramadhani  
NIM : 1906016122  
Jurusan : Ilmu Politik  
Judul Skripsi : Implementasi Program Pengembangan Kampung Pelangi di Kota Semarang

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikiran, atas perhatian diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 13 Juni 2023

Pembimbing,



M. Nuqlir Bariklana, M.Si.  
NIP. 198505022019031007

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN KAMPUNG PELANGI DI  
KOTA SEMARANG**

Disusun Oleh :

**Hana' Fairuz Suci Ramadhani**

1906016122

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi skripsi

pada tanggal 23 Juni 2023 dan dinyatakan lulus.

**Susunan Dewan Penguji**

**Ketua**



Dr. Ahwan Fanani M.Ag.  
NIP.197809302003121001

**Sekretaris**



Muhammad Nuqlir Bariklana, M.Si.  
NIP. 198505022019031007

**Penguji Utama I**



Masrohatun, M. Si.  
NIP.198806212018012001

## HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 13 Juni 2023



Hana' Fairuz Suci Ramadhani  
NIM: 1906016122

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Implementasi Program Pengembangan Kampung Pelangi di Kota Semarang". Shalawat dan salam penulis haturkan kepada pemimpin umat Islam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya menjadi umat yang berakhlakul karimah, memiliki pengetahuan dan intelektual. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik S1 (S.Sos) pada jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa syukur atas rahmat kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai. Untuk itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Imam Taufiq M.Ag., yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan dan menyelesaikan studi Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth M.Hum., selaku penanggung jawab terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
3. Kepala jurusan Ilmu Politik Fisip UIN Walisongo, Drs. Nur Syamsudin M.Ag., dan Sekretaris jurusan Ilmu Politik Fisip UIN Walisongo, Muhammad Mahsun M.A., yang telah memberikan pengarahan dan ilmunya khususnya dalam pelaksanaan perkuliahan.
4. M. Nuqlir Bariklana, M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar dalam memberi masukan maupun arahan, menuntun, memotivasi, dan meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
5. Seluruh jajaran dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan berbagai ilmu dan pengalamannya sehingga dapat bermanfaat dan sangat berguna bagi penulis.

6. Seluruh Civitas Akademik dan Staf Administrasi Fisip Politik UIN Walisongo Semarang yang telah membantu memperlancar segala keperluan penulis dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi.
7. Dua orang paling berjasa dalam hidup penulis yaitu orang tua, Unggul Tri Prasetyo S.P., dan Tjatur Endang S.R. S.P., atas kepercayaan yang diberikan untuk bisa menyelesaikan studi S1 dengan tiada henti memberikan dukungan moral maupun materil baik semangat, doa, finansial dan nasihat serta untuk keluarga yang turut meberikan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan tahap penyusunan dan penulisan skripsi ini.
8. Seluruh informan, Pokdarwis khususnya Pak Woko dan Ibu Handini yang menjadi sumber data dan membantu penelitian di lapangan serta kesediaan Masyarakat Kampung Pelangi. Tak lupa kepada Pak Taufiq selaku Divisi Kelembagaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang yang telah menerima dan mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan segala informasi yang dibutuhkan untuk memperoleh data penyelesaian skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat penulis, Vera Sulistyana, Lathifatul Hanifah M., Faifa Dwi F., Revy Amyneva G., Miranda Angelli P., Arika Widya S.Km., Devita Fransiska yang telah memberikan dukungan motivasi dan semangat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.
10. Teman-teman seperjuangan Ilmu Politik D 2019 yang senantiasa memberikan dukungan dalam naskah skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
11. Rayyanza Malik Ahmad, keponakan virtual yang selalu menjadi penghibur dan penyemangat penulis dalam mengerjakan naskah skripsi ini.
12. Muhammad Tulus serta Hindia yang dengan karya dan alunan musiknya selalu menemani dan menambah semangat penulis dalam mengerjakan skripsi.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.
14. Tidak lupa kepada diri saya sendiri yang sudah berjuang sejauh ini, pantang menyerah dalam mewujudkan manifestasi yang telah disusun.

Terlepas dari semua ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasa. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata penulis berharap

mudah-mudahan skripsi ini memberikan manfaat baik bagi penulis maupun referensi penelitian sejenis dan para pembaca yang membutuhkan karya tulis ilmiah ini.

Semarang, 11 Juni 2023

Penulis

Hana' Fairuz Suci Ramadhani

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan segala syukur kepada Allah SWT Pencipta Semesta Alam  
Karya ini penulis persembahkan kepada  
Kedua orang tua penulis yang telah menjadi sosok inspirasi dan motivasi melalui  
iringan doa, nasihat, serta kasih sayang dalam setiap langkah kehidupan penulis.  
Dosen Pembimbing sekaligus mentor saya, M. Nuqlir Bariklana M.Si yang telah  
memberikan ilmu dan bimbingannya serta motivasi untuk menyelesaikan karya tulis  
ilmiah ini.

Para dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Walisongo serta teman-teman yang  
telah mengajarkan kebajikan dan ilmu kepada penulis. Semoga setiap ilmu yang  
diajarkan bisa bermanfaat dan maslehat bagi sesama.

Dan untuk Almamater UIN Walisongo Semarang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik yang menjadikan tempat berpijak untuk menuntut ilmu yang berguna bagi  
kehidupan masa depan penulis.

## **MOTTO**

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S. Al-Baqarah, 2:286)

“Salah satu yang paling nikmat dari kesempatan hidup adalah hari-hari baik yang datang bagi si yakin dan berusaha”

(Tulus)

## ABSTRAK

Transformasi Kampung Gunung Brintik menjadi Kampung Wisata Pelangi dimulai melalui inisiasi Pemerintah Kota Semarang sebagai jawaban program kebijakan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang dicanangkan oleh Dirjen Cipta Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Program KOTAKU memiliki tiga aspek sasaran yaitu pengentasan pemukiman kumuh, menghentikan pemukiman kumuh baru dan mendorong pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan kondisi Kampung Gunung Brintik. Keberlanjutannya sebagai Kampung Wisata Pelangi di dorong salah satu OPD di Kota Semarang yaitu Dinas Pariwisata dan di regulasikan melalui SK Kadisbudpar Nomor B/1442/556/IV/2023 dengan berbagai program. Program Kampung Pelangi bersifat *top down* meliputi fisik dan non-fisik, serta terdapat tujuan yang diharapkan sesuai dengan kebijakan SK Pokdarwis adalah keberlangsungan Kampung Pelangi sebagai Kampung Wisata ditingkatkan melalui “mitra pemerintah” yaitu Pokdarwis meningkatkan potensi lokal dan bisa bermanfaat bagi peningkatan perekonomian lokal. Terdapat peran Pokdarwis yang sangat penting sebagai mitra pemerintah untuk keberhasilan program. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji proses implementasi program pengembangan Kampung Pelangi dan relasi antar aktor-aktor dalam keberhasilan program melalui teori implementasi kebijakan oleh Merilee S. Grindle. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pada implementasinya, program fisik maupun non-fisik pembangunan kampung pelangi mulanya berjalan di Kampung Pelangi, namun dalam keberlangsungannya pengembangan kampung pelangi tidak berjalan dengan baik karena kurangnya inovasi Pokdarwis dan masyarakat dalam mengembangkan kampung, terdapat permasalahan internal Pokdarwis, kurangnya partisipasi para aktor untuk kembali meningkatkan pengembangan Sumber Daya Manusia di Kampung Pelangi tanpa ada salah satu kepentingan yang mendominasi, Orientasi pola pemikiran masyarakat yang tertuju pada upah, dan minimnya ketebukaan Dinas Pariwisata pada aspirasi masyarakat. Dalam pengembangannya diperlukan strategi untuk menarik para aktor pendukung implementasi yang bisa melibatkan diri dengan mendukung pengembangan SDM masyarakat Kampung Pelangi tidak hanya pada tahap pembinaan namun pada proses pemasaran dan branding yang sangat dibutuhkan oleh para aktor di Kampung Pelangi Kota Semarang.

**Kata Kunci :** *Implementasi kebijakan, Kampung Wisata, Relasi Aktor Kebijakan*

## **ABSTRACT**

*The transformation of Kampung Gunung Brintik into Kampung Pelangi Wisata began with the initiation of the Semarang City Government as a response to the City Without Slums (KOTAKU) policy program launched by the Director General of Job Creation of the Ministry of Public Works and Public Housing. The KOTAKU program has three target aspects, namely alleviating slum settlements, stopping new slum settlements and encouraging sustainable development in accordance with the conditions of Kampung Gunung Brintik. Its sustainability as a Pelangi Tourism Village was encouraged by one of the OPDs in the city of Semarang, namely the Tourism Office and regulated through the Kadisbudpar Decree Number B/1442/556/IV/2023 with various programs. The Kampung Pelangi program is top down, covering physical and non-physical aspects, and there are expected objectives in accordance with the SK Pokdarwis policy, namely the sustainability of Kampung Pelangi as a Tourism Village is enhanced through "government partners", namely Pokdarwis to increase local potential and can be beneficial for improving the local economy. There is a very important role for Pokdarwis as a government partner for the success of the program. Therefore, this study examines the process of implementing the Kampung Pelangi development program and the relations between actors in the success of the program through the theory of policy implementation by Merilee S. Grindle. This study uses a qualitative approach. In its implementation, the physical and non-physical program for the development of Kampung Pelangi was initially carried out in Kampung Pelangi, but in its development the development of Kampung Pelangi did not go well due to the lack of Pokdarwis and community innovation in developing the village, there were internal Pokdarwis problems, lack of participation of actors to improve the development of human resources in Kampung Pelangi without any of the dominating interests, the orientation of people's thinking patterns that are focused on wages, and the lack of openness of the Tourism Office to people's aspirations. In its development, a strategy is needed to attract implementation support actors who can involve themselves by supporting the development of the human resources of the Kampung Pelangi community not only at the coaching stage but in the marketing and branding process which is needed by the actors in Kampung Pelangi, Semarang City.*

**Keywords** : Policy implementation, Tourism Village, Policy Actor Relations

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
1. Manfaat Teoritis.....	6
2. Manfaat Praktis .....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	6
1. Kebijakan Penanganan Wilayah Kumuh .....	6
2. Implementasi Program Pengembangan Kampung Kreatif .....	8
F. Metode Penelitian .....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	11
2. Sumber dan Jenis Data.....	12
3. Teknik Pengambilan Data.....	13
4. Teknik Analisis Data .....	14

<b>BAB II</b>	<b>KAJIAN TEORI.....</b>	<b>16</b>
	A. Kebijakan Publik .....	16
	B. Implementasi Kebijakan .....	18
	C. Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle.....	20
	D. Kampung Wisata .....	26
<b>BAB III</b>	<b>PROFIL KOTA SEMARANG DAN KAMPUNG PELANGI.....</b>	<b>29</b>
	A. Profil Kota Semarang .....	29
	1. Letak dan Kondisi Geografis .....	29
	2. Kondisi Demografis.....	31
	3. Kondisi Sosial Politik dan Ekonomi.....	32
	B. Perkembangan Pariwisata Kota Semarang .....	36
	1. Wisata religi.....	36
	2. Wisata Sejarah .....	38
	3. Wisata Seni dan Budaya (Tradisi) .....	38
	4. Wisata Hiburan dan Kuliner .....	40
	5. Desa/Kampung Wisata .....	41
	C. Profil Kelurahan Randusari .....	42
	1. Kondisi Geografis .....	42
	2. Kondisi Penduduk kelurahan Randusari.....	42
	D. Profil Kampung Pelangi .....	45
	1. Sejarah Kampung Pelangi.....	45
	2. Kondisi Demografis.....	48
	3. Struktur Kelembagaan di Kampung Pelangi .....	49
<b>BAB IV</b>	<b>PROSES IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN KAMPUNG PELANGI.....</b>	<b>53</b>
	A. Identifikasi Kebijakan dan Program Pengembangan Kampung Pelangi .....	53
	1. Program Pengembangan Infrastruktur:.....	57
	2. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia:.....	58
	3. Program Pemberdayaan Masyarakat Lokal: .....	59
	4. Program Pemasaran dan Promosi: .....	61

5. Program Keberlanjutan dan Konservasi Alam: .....	62
6. Program Kemitraan dan Kerjasama:.....	63
B. Pengembangan Kampung Pelangi Sebagai Kampung Wisata.....	65
1. Atraksi Wisata .....	66
2. Aksesibilitas .....	67
3. Amenitas .....	67
4. Aktivitas.....	70
C. Kompetensi Personil Sebagai Sumber Daya Yang Mendukung .....	72
1. Proses Terbentuknya Kelembagaan Pokdarwis.....	72
2. Keberlangsungan Pokdarwis .....	73
D. Adaptasi Dalam Pelaksanaan Program Pengembangan Kampung Pelangi .....	78
 <b>BAB V</b>	
<b>INTERAKSI ANTAR AKTOR KEBIJAKAN DAN ANALISIS DAMPAK DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM .....</b>	<b>85</b>
A. Pemetaan Para Pihak Yang Terlibat Dalam Implementasi.....	85
1. Pokdarwis dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan .....	86
2. Pokdarwis dengan Pokdarwis .....	90
3. Pokdarwis dengan Masyarakat .....	95
4. Pokdarwis dengan Para Aktor Pendukung .....	100
B. Karakteristik Kelembagaan .....	104
C. Respon Masyarakat Melalui Kepatuhan dan Daya Tanggap.....	107
 <b>BAB VI</b>	
<b>PENUTUP .....</b>	<b>114</b>
A. Kesimpulan .....	114
B. Saran .....	115
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>117</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>123</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah Kependudukan Di Kota Semarang Berdasarkan Umur Dan Jenis Kelamin.....	32
Tabel 2.	Kependudukan Kelurahan Randusari .....	42
Tabel 3.	Penduduk menurut Mata Pencaharian Bagi Umur 16 <sup>th</sup> Keatas .....	43
Tabel 4.	Penduduk Menurut Pendidikan Bagi Umur 5 <sup>th</sup> Keatas.....	43
Tabel 5.	Penduduk Menurut Kepemelukan Agama.....	43
Tabel 6.	Kependudukan Masyarakat Kampung Pelangi Berdasarkan Usia.....	48
Tabel 7.	Kependudukan Kampung Pelangi Melalui Jenis Pekerjaan .....	49

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Skema Implementasi oleh Grindle.....	22
Gambar 2.	Peta Kota Semarang .....	30
Gambar 3.	Peta Administrasi Kampung Pelangi .....	45
Gambar 4.	Transformasi Kampung Pelangi .....	55
Gambar 5.	Peta Jalur Wisata Kampung Pelangi .....	56
Gambar 6.	Aktivitas Pembuatan Souvenir.....	60
Gambar 7.	Kesenian Jatilan .....	61
Gambar 8.	Kondisi Tiang Penunjuk Jalan Kampung Pelangi Yang Tidak Terbaca .....	69
Gambar 9.	Pamflet Festival Kampung Pelangi.....	75
Gambar 10.	Dokumentasi Kerjasama dengan PT. Nippon Paint.....	101

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Surat Ijin Penelitian di Kelurahan Rndusari dan Kampung Pelangi.....	123
Lampiran 2.	Surat Ijin Penelitian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.....	124
Lampiran 3.	Pedoman Wawancara Penelitian .....	125
Lampiran 4.	Dokumentasi Wawancara Penulis dengan Pokdarwis dan Masyarakat Kampung Pelangi .....	127
Lampiran 5.	Dokumentasi Wawancara dengan Divisi Kelembagaan Dinas Pariwisata.....	129
Lampiran 6.	Daftar Riwayat Hidup .....	130

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Isu pemukiman kumuh menjadi salah satu polemik perkotaan karena menyangkut dengan kualitas lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat. Inovasi pengelolaan pemukiman dan kawasan kumuh masih terus dipertanyakan. Reputasi negatif diberikan kepada pemerintah daerah karena tampaknya sebagai kapten dan pemilik otoritas di wilayah daerah belum mampu membenahi masalah lingkungan kumuh yang terus bertambah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, fenomena ini bertentangan dengan isi UU tersebut karena pemerintah pusat dan daerah seharusnya wajib melindungi masyarakat dengan pemukiman yang layak bagi seluruh masyarakat Indonesia. Identifikasi pemukiman kumuh tidak aman karena pembuatan pembangunan yang tidak teratur, kepadatan bangunan yang tinggi, serta fasilitas yang buruk (Handika & Yusran, 2020).

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah 2015-2019 mensyaratkan pembangunan dan pertumbuhan kawasan perkotaan dengan meningkatkan kualitas permukiman. Hal tersebut termasuk pengentasan permukiman kumuh, menghentikan permukiman kumuh baru, dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Sejak tahun 2015, Dirjen Cipta Karya sebagai unit pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Indonesia, telah mencanangkan program kebijakan “Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)” untuk mengurangi populasi permukiman kumuh. Pemerintah daerah adalah aktor kunci dalam menangani daerah untuk menciptakan kawasan pemukiman masyarakat yang layak. Penyelesaian diserahkan pemerintah daerah dalam berbagai solusi dan inovasi (Imelda Christianingrum & Djumiarti, 2019).

Melalui kebijakan KOTAKU, salah satu inovasi yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang adalah merenovasi pemukiman kumuh menjadi kampung kreatif tematik yang saat ini dikenal dengan Kampung Pelangi (RUSMAN, 2019). Merujuk pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 Tahun 2018 mengenai pembentukan kampung tematik, sasaran yang hendak dicapai dalam transformasi kampung kumuh tersebut adalah peningkatan atau perbaikan kondisi lingkungan, peningkatan penghijauan wilayah yang

intensif, serta mendukung identitas wilayah yang menjadi ikonik dari daerah tersebut. Hasil yang diharapkan dapat mengubah pandangan dan perilaku penduduk setempat dengan partisipasi aktif, serta meningkatkan potensi sosial dan ekonomi melalui pemberdayaan kampung (SemarangKota, 2016).

Pengembangan destinasi pariwisata di Kota Semarang telah diatur dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah. Rencana ini didasarkan pada potensi wilayah Kota Semarang yang dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata untuk mendukung pembangunan daerah. Pengembangan pariwisata ini tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial, tetapi juga mengutamakan aspek keagamaan, pendidikan, budaya, lingkungan hidup, serta kenyamanan dan ketertiban. Peraturan ini tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah, tetapi juga memberdayakan masyarakat sekitar untuk mengembangkan potensinya. Idealnya, pengembangan destinasi pariwisata melibatkan penyelenggara pariwisata, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dalam konteks fenomena ini dengan berbagai permasalahannya, penelitian tentang hal ini menjadi sangat menarik untuk dilakukan.

Dinas Pariwisata menaungi perkembangan Kampung Wisata Pelangi sebagai objek pariwisata berkelanjutan. OPD Pemerintahan Kota Semarang ini bersentuhan langsung dengan Sumber Daya Masyarakat (SDM) di Kampung Pelangi mengesahkan SK Kadisbudpar Kota Semarang No 556/1610 mengenai pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kampung Pelangi Kota Semarang. Ditrurukannya SK tersebut sebagai alur teknis sosialisasi program pengembangan Kampung Pelangi dengan harapan sebagai destinasi Pariwisata yang berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan, meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan kampung sebagai objek sekaligus subjek wisata, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat (Setiawan, 2022).

Kampung Pelangi terletak di daerah Semarang Selatan Kelurahan Randusari. Sebelumnya pemukiman tersebut dikenal sebagai Kampung Gunung Brintik. Kampung tersebut tepat dibelakang Pasar Bunga Kalisari. Pada awalnya, kampung itu sangat kumuh dan tidak teratur didampingi dengan semak-semak tanaman liar dan tembok merah yang belum dicat. Terdapat sekitar 325 rumah yang saling berhimpitan serta posisinya yang sangat dekat di pinggir sungai Semarang (Aryaningtyas, Aprilliyani, Soehari, 2021). Pada

prosesnya, program yang masuk saat tumbuhnya kampung pelangi pada awal tahun 2017 adalah pengecatan rumah warna-warni, pembangunan talud tahan longsor, program sertifikat gratis, normalisasi sungai, perbaikan jembatan, hingga pelatihan bagi warga Kampung Pelangi (Firdaus, 2020).

Mulanya konsep Kampung Pelangi di Kota Semarang sangat menjadi daya tarik khususnya para penyuka foto. Dengan cantiknya cat warna-warni dipadukan dengan rumah yang saling berhimpitan, struktur jalan pemukiman yang tinggi di tengah kota, kerajinan tangan dan adanya kios bunga di depan kampung pelangi menjadi pepaduan yang indah. Banyak media asing yang membicarakannya melalui foto-foto yang di unggah di media sosial mengenai Kampung Pelangi. Media Inggris seperti *The Independent* dan *Mirror* hingga situs konten media sosial seperti *BuzzFeed* dan *BoredPanda*(BBC Indonesia, 2017). Kampung Pelangi pun didatangi oleh pengunjung lokal maupun mancanegara setelah transformasinya. Sejumlah Menteri Uni Eropa yang pada saat itu dipimpin oleh Vincent Guerend menyempatkan datang secara langsung dan sebagai kehormatan besar pada 24 Januari 2018(Yoga, 2018).

Dengan daya tariknya yang ada, sangat disayangkan bahwa Kampung Pelangi saat ini keberlangsungannya terlihat tidak terurus. Dilansir melalui berita online Radar Semarang (2022) sudah tidak adanya wisatawan yang datang, kondisi cat yang memburuk, dan banyak tanaman liar tumbuh di sepanjang jalan di antara rumah-rumah penduduk. Gardu yang menjadi spot foto pun saat ini beralih menjadi sarang burung merpati. Program pelatihan pembinaan tidak dirasakan lagi oleh masyarakat. Struktur Pokdarwis yang tidak stabil juga menjadi kendala pengembangan objek wisata. Melalui wawancara pra-penelitian dengan Handini Pokdarwis Kampung Pelangi bahwa pengurus lain dan masyarakat setempat mendukung struktur pengurus pokdarwis perlu direkonstruksi mengingat ketentuan SK Pokdarwis bahwa jabatan pengurus seharusnya tiga tahun dan kini sudah lebih semenjak awal pembangunan. Adanya kesamaan rasa bahwa ketua pokdarwis dirasa acuh pada perkembangan Kampung Pelangi.

Persiapan untuk membumikan kembali Kampung Pelangi sangat dibutuhkan. Banyaknya pengunjung saat Kampung Pelangi terbangun sempat menjadi sarana perekonomian warga setempat. Usaha menjual makanan, minuman dan aksesoris kerajinan tangan di depan rumah memberikan tambahan penghasilan. Namun, sekarang tidak ada lagi yang melanjutkan usaha tersebut karena tidak ada yang membeli

dagangannya. Dipaparkan oleh salah satu masyarakat kampung pelangi bahwa dengan berjualan saat itu, penghasilannya sehari bisa mencapai Rp 400.000 (Radar Semarang, 2022). Saat ini lingkungan kampung pelangi pun melalui riset Taufiq sebagai kelembagaan Dinas Pariwisata pun secara penataan tempat sampah kurang rapi, pedestrian yang rusak, toilet kotor, tiang petunjuk lokasi Kampung Pelangi yang tidak terbaca, tumpukan karung, pot serta gerobak di depan pintu masuk gang kampung pelangi, dan belum tercapainya mengikutsertakan anak muda dalam proses pengembangan Kampung Pelangi.

Pengembangan Kampung Pelangi dan wawasan keislaman memiliki hubungan yang erat, karena sebagai syariah keislaman pun kebersihan menjadi salah satu budaya wajib yang harus dimiliki. Dengan transformasi kampung dari kumuh menjadi bersih memberikan kenyamanan serta sesuai dengan mempertimbangkan nilai-nilai Islam. Keterlibatan nilai-nilai seperti kebersihan, keramahan, dan kebersamaan yang diajarkan dalam Islam pastinya membuat masyarakat lebih nyaman di suatu wilayah. Selain itu, pengembangan juga dapat mengedepankan nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan sosial yang juga menjadi bagian dari ajaran Islam dengan dipastikannya bahwa pengembangan tidak merusak lingkungan atau merugikan masyarakat sekitar. Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Islam dalam pengembangan Kampung Pelangi, diharapkan pengembangan tersebut dapat berdampak positif bagi masyarakat, lingkungan, dan juga memberikan nilai-nilai yang baik untuk kampung dan masyarakatnya.

Pelaksanaan program kampung kreatif atas dasar perbaikan lingkungan dan partisipasi masyarakatnya sudah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Pada studi kajian (Islami & Hadi, 2021), (Suwitri et al., 2019), (Kusumawati et al., 2021), (Alvionita, 2018), (Berutu, 2020) mengenai berbagai konsep destinasi wisata kampung kreatif sangat menarik untuk diteliti melalui implementasi program yang ada. Kampung wisata dikembangkan selain sebagai destinasi wisata, programnya diimplikasikan untuk berguna bagi masyarakat. Salah satunya melalui pemberdayaan. Para peneliti sebelumnya fokus pada analisis tahapan keberhasilan program pemberdayaan dengan teori Wrihatnolo, namun pada penelitian ini penulis menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Grindle. Difokuskan untuk mengetahui proses implementasinya melalui tujuan SK Pokdarwis dan terdapat berbagai kerjasama yang dibangun oleh beberapa aktor

yang terlibat pada saat pembangunan kampung. Penulis mengembangkan kajian untuk mengetahui sejauh mana tanggungjawab atau tugas yang sudah mereka laksanakan dan mengetahui interaksi kerjasama yang sudah mereka laksanakan sesuai dengan tugas dan kemampuan masing-masing aktor.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, Kampung Pelangi mulanya sebagai jawaban kebijakan KOTAKU dengan transformasinya dari kampung kumuh menjadi sebuah ikon kampung wisata. Dengan dukungannya menjadi salah satu destinasi wisata, Dinas Pariwisata sebagai salah satu OPD di Kota Semarang membersamai perkembangan kampung dengan program pengembangan Kampung/Desa Wisata. Daya minat wisatawan menjadi potensi destinasi wisata yang perlu diperhatikan keseimbangannya antara kualitas lingkungan dan SDM nya. Namun, masalah-masalah yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa perkembangannya saat ini tidak nampak. Oleh karena itu, penelitian ini akan difokuskan pada bagaimana proses berjalannya pengembangan Kampung Pelangi dengan menganalisis tujuan, sasaran program, serta menganalisis relasi antar aktor terkait dalam menyelesaikan masalah yang ada di lapangan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang muncul dalam rencana penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana proses implementasi program pengembangan Kampung Pelangi di Kota Semarang?
2. Bagaimana interaksi antar aktor kebijakan dan dampaknya dalam implementasi program?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui rencana hingga realisasi implementasi program terkait pengembangan Kampung Pelangi di Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui bagaimana interaksi kolaborasi antar aktor kebijakan dengan masyarakat di Kampung Pelangi serta dampaknya terhadap program kebijakan.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menguatkan teori implementasi kebijakan melalui implementasi program pengembangan kampung pelangi di Kota Semarang.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi pandangan atau masukan dalam kajian Ilmu Politik yang berkaitan dengan penelitian implementasi sejenis.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menyajikan informasi terkait program pengembangan Kampung Pelangi melalui program yang berjalan apakah efektif dan terintegrasi melalui tujuan program kebijakan yang diharapkan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menginspirasi pemerintah daerah lain dalam realisasi program pengembangan kampung tematik.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Terkait dengan penelitian ini, terdapat penelitian terdahulu yang cukup relevan untuk dijadikan literature pada penelitian ini, yaitu :

### **1. Kebijakan Penanganan Wilayah Kumuh**

Kebijakan penanganan kawasan permukiman kumuh telah banyak disoroti oleh akademisi karena untuk penyelesaiannya menyangkut kualitas hidup manusia. Melalui studi penelitian Faisal Natsir(2019) dengan topik “*Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Depok Dalam Penataan Kawasan Permukiman Kumuh*” dan Obot & Setyawan(2019) dengan topik “*Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Batu Dalam Mewujudkan Kota Pariwisata Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan*” fokus pada penanganan perbaikan fisik lahan, yaitu penyiapan lahan, pembangunan/penyediaan permukiman, peningkatan kapasitas bangunan hunian, dan peningkatan kapasitas infrastruktur permukiman. Penanganan fisik tersebut mengaplikasikan program penanganan wilayah kumuh yang meminimalisir dampak pada kerusakan lingkungan dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai posisi lahan ketika akan diubah menjadi bentuk pembangunan salah satunya pembangunan pariwisata, harus faham Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai alat berbasis keberlanjutan untuk pertumbuhan wisata yang berkelanjutan.

Hal ini berarti pertumbuhan lahan dan wisata akan adil secara ekologis, fiskal, moral, dan sosial dalam jangka panjang.

Persamaan perspektif mengenai penyelesaian isu pemukiman kumuh adalah metode partisipasi masyarakat didukung melalui studi penelitian sebelumnya oleh Bawole (2019), Sari (2020), KAEHE et al, (2019). Sangat penting untuk melibatkan masyarakat dari awal proses perencanaan hingga implementasi fisik proyek. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan didorong dengan membuka wadah bagi masukan masyarakat dalam pengambilan keputusan program pembangunan. Peningkatan kemampuan masyarakat melalui tiga studi sebelumnya dilihat melalui kemampuan mereka dalam memelihara dan mengembangkan fasilitas setelah infrastruktur dibangun. Antusias dari para warga pemukiman melalui gotong-royong untuk membersihkan lingkungan dan melakukan cat pewarnaan pemukiman menjadi warna-warni agar tidak terlihat kumuh lagi. Tidak lupa dengan masalah pengelolaan sampah, penataan jalan lingkungan dan saluran drainase.

Penyelesaian dalam peningkatan kualitas lingkungan pemukiman selain dengan dukungan partisipasi masyarakat adalah interaksi kolaborasi yang terbentuk oleh pemerintah dengan masyarakat melalui program kebijakan. Melalui literature Maulana & Yulianti (2021) berjudul "*Kolaborasi Aktor Dalam Pelaksanaan Kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kecamatan Kasemen Kota Serang*" terdapat Kolaborasi aktor khusus dalam implementasi programnya yaitu, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Serang, Dinas PUPR Kota Serang, BPPD Kota Serang, serta Badan Keswadayaan Masyarakat, RT, dan RW, serta kelompok setempat. Pada studi penelitian Sitorus et al., (2020) berjudul "*Kolaborasi Implementasi Program Penanganan Pemukiman Kumuh Di Tanjung Mas Kota Semarang*" kolaborasi terjadi dengan BAPPEDA, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Tim Inti Perencana Partisipatif (TIPP). Interaksi yang serupa pada studi penelitian Istiyani et al., (2019) dengan judul "*Implementasi Kebijakan Penanganan Pemukiman Kumuh di Kabupaten Gorontalo*" melalui program penanggulangan air bersih dan permukiman kumuh dengan Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo yang telah menyediakan/menata jaringan air limbah lingkungan. Implementasi melibatkan pembuatan IPAL KOMUNAL dengan Satuan Kerja (SATKER) Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo dan Tim

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dari perwakilan masyarakat dan pemerintah.

Hubungan yang membentuk energi kolaboratif didasari kekuatan peran pemimpin daerah perkotaan/kabupaten sebagai 'Kapten' dalam kesuksesan suatu program. Melalui studi kajian Sulaiman (2021) dan Yopiannor & Wibowo(2019) pemrakarsa dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan program tidak lepas melalui peran kepemimpinan untuk mewujudkan kolaborasi yang ideal. Hal ini membutuhkan keterlibatan pemerintah, swasta, dan masyarakat. Tujuan indikator dengan adanya faktor kepemimpinan, mediator, dan target keberhasilan program menentukan pelaksanaan program pada tingkat praktis di mana kebijakan itu lahir. Rencana penelitian Kampung Pelangi ini akan menganalisis optimalisasi proses kolaborasi pengembangan kampung pelangi apakah energi kolaboratif akan memberikan dampak yang baik bagi kesuksesan implementasi suatu program yang tidak hanya pada program fisik infrastruktur.

## **2. Implementasi Program Pengembangan Kampung Kreatif**

Sebagai sarana penunjang pembangunan daerah suatu kampung dijadikan kampung kreatif sebagai pengembangan pariwisata dan dapat bermanfaat pula bagi masyarakatnya. Seperti fenomena di Kampung Wisata Jodipan(Chrischa et al., 2021) yang mulanya *slum area*, lalu diubah menjadi kampung kreatif yang dapat menghasilkan pendapatan sekaligus memberdayakan para warganya. Begitu pun dengan Kampung Wisata Kreatif Dago Pojok di Kota Bandung (Ramadhana et al., 2019). Kampung yang memiliki potensi di bidang kesenian tersebut dimanfaatkan dan dikembangkan lebih jauh untuk mewujudkan misi Bandung Creative City(BCC). Puncaknya, kampung tersebut sukses sebagai destinasi bagi berbagai acara mulai dari Konferensi Asia Afrika di tahun 2014 hingga Festival Anti Korupsi Sedunia oleh KPK di tahun 2015 walaupun saat ini terbengkalai. Dari dua jurnal tersebut tumbuhnya kampung wisata tidak lepas dengan kerjasama antar pihak swasta, pemerintah dan masyarakat.

Pengembangan kampung tematik dengan tema kampung pelangi salah satunya bermula dari solusi permasalahan pemukiman kumuh. Melalui studi penelitian Akbar & Faqih Alfian(2018) dengan topik “*Pengembangan Kampung Tematik Di Kota Malang*” dan Hartono(2020) dengan topik “*Pengembangan Kampung Pelangi Di*

*Kauman Jember*” bahwa pengembangan kampung kreatif melalui dua studi sebelumnya difokuskan pada sektor pariwisata dan kemandirian ekonomi. Pengembangannya menghasilkan peningkatan partisipasi masyarakat dan menghasilkan inisiatif lokal dalam pembangunan. Inovasi pengembangan kampung tematik membawa pola dan nilai estetika yang berbeda dalam mempromosikan kelestarian lingkungan dan pengembangan ekonomi kreatif. Masyarakat melakukan pengembangan ekonomi dengan mandiri berjualan sembako atau makanan dan minuman ringan di depan rumah saat ada wisata yang datang. Studi sebelumnya hanya menyediakan program infrastruktur dan menganalisis kemandirian msyarakat sekitar dalam meningkatkan perekonomian. Tidak adanya program khusus dari OPD terkait sebagai pengembangan objek wisata.

Terdapat upaya pemerintah dalam pengembangan kampung tematik. Pada studi penelitian Syarifa & Wijaya(2019) yang berjudul “*Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan melalui Program Kampung Tematik (Studi Kasus di Kampung Batik Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang)*” Pemkot Semarang memberikan program pelatihan membuat batik kepada masyarakat untuk menghidupkan kembali kerajinan dan budaya batik sebagai Sentra Batik di Kota Semarang untuk menghidupkan kembali kampung tematik batik di Kota Semarang dan membuat “Paguyuban Kampung Batik” yang mulai aktif mengikuti pameran batik dan memanfaatkan batik sebagai mata pencaharian serta daya tarik wisata. Upaya program lain melalui penelitian Tamara & Rahdriawan(2018) berjudul “*Kajian Pelaksanaan Konsep Kampung Tematik di Kampung Hidroponik Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang*” bahwa eksekusi program melalui perbaikan infrastruktur. Namun pemberdayaan melalui SDM untuk peningkatan kualitas hidup mereka belum dirasakan.

Pada studi penelitian Saragih(2021) dan Saputri(2019) membahas kendala dan rasa manfaat yang belum dirasakan pada program pengembangan Kampung Kreatif. Pada “*Implementasi Program Kampung Tematik Sentra Bandeng*” topik penelitian yang pertama, dalam menunjukkan tujuan program kampung tematik untuk meningkatkan kualitas fisik sudah tercapai. Namun tujuan program untuk mendukung penurunan angka kemiskinan belum dirasakan, karena bantuan peralatan yang diberikan oleh OPD Dinas Perikanan masih belum merata kepada seluruh masyarakat.

Selain itu sarana dan prasarana yang diberikan belum maksimal untuk menjual hasil olahan, kurangnya strategi branding dan teknik pengolahan berdampak pada tidak meningkatnya skala produksi bandeng. Selanjutnya pada topik penelitian "*Program Pembinaan Kampung Tematik Jajan Pasar Gajahmungkur*" sudah adanya keterlibatan oleh dinas terkait dan akademisi, namun faktor penghambat pengembangannya yaitu warga Semarang masih asing karena akses yang sulit. Hal ini juga disebabkan sistem branding penjualan makanan jarang diketahui di luar acara tertentu dan tidak bersertifikat halal.

Terhentinya program pengembangan kampung tematik tahu tempe di Lamper Kota Semarang dianalisis oleh studi penelitian Kinanti(2019), tidak ada CSR atau sektor swasta yang mengembangkan bakat. Langkah pemberdayaan pertama yang gagal adalah dukungan pemerintah untuk modal perusahaan, Yang kedua terkait Prasarana yang dibangun belum memenuhi kebutuhan dan kesulitan pemasaran oleh masyarakat. Yang ketiga mengenai tidak adanya pelatihan untuk menginovasi olahan tempe dan tahu yang tidak hanya seperti itu saja. Studi penelitian Triyono(2020) terkait Pemberdayaan Kampung Tematik Kesenian di Jurang Belimbing juga membahas belum adanya campur tangan pemerintah untuk sarana prasarana yang mumpuni dalam mengembangkan kampung kesenian tersebut dan belum adanya aksi memperkenalkan kepada masyarakat sebagai kampung tematik kesenian yang berisikan potensi anak-anak muda. Hanya sebatas komunitas karawitan yang secara sukarela untuk membantu tumbuhnya komunitas karawitan "Budi Laras" tersebut dalam pendampingan pelatihan secara teratur. Meskipun sudah ada pelatihan, tidak menutup kemungkinan terhentinya kampung kreatif karena masyarakat itu sendiri. Pada topik implementasi kebijakan pariwisata bahari di Kota Semarang, pola perilaku masyarakat dan kebiasaan/budaya masyarakat yang sulit dirubah walaupun sudah sering diberikan penyuluhan dan pelatihan dan kerjasama antar aktor yang tidak terjalin(Suwitri et al., 2019).

Berdasarkan beberapa studi penelitian terkait dua topik oleh para akademisi terdahulu, peneliti memposisikan penelitian terkait persamaan dan perbedaan pada kajian terkait. Persamaan pada studi penelitian sebelumnya bahwa penelitian dilatarbelakangi pada penanganan isu pemukiman kumuh dengan membuat suatu kampung atau desa kreatif yang akan dianalisis mengenai proses pengembangannya

untuk mengetahui bagaimana realisasi program serta respon dan partisipasi masyarakatnya. Perbedaan pada penelitian ini adalah terdapat pengembangan pembahasan dari penelitian sebelumnya berupa analisis proses yang terjadi pada implementasi program pengembangan kampung wisata yang dimana akan terdapat analisis relasi aktor-aktor terkait dalam mempengaruhi isi program maupun dampaknya pada program di lapangan.

## **F. Metode Penelitian**

Suatu langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian berupa penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong dalam Murdiyanti(2020), penelitian kualitatif menggunakan metode terperinci dan difokuskan untuk mempelajari orang, kelompok, organisasi, peristiwa, simbol, catatan, dan proses sosial. Metode pengumpulan datanya berupa deskriptif dari kata-kata lisan atau tertulis orang serta tindakan mereka yang dapat dibuktikan. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh pemahaman mengenai fenomena sosial yang menjadi fokus penelitian melalui proses dan maknanya dalam pengambilan data.

Pendekatan yang akan dilakukan adalah pendekatan studi kasus. Studi Kasus sesuai pada konsep penelitian penulis karena terbatas pada wilayah yang sempit dengan mengkaji perilaku pada tingkat individu, kelompok, kelembagaan, dan organisasi. Penggalan informasi melalui waktu dan lokus tertentu untuk mengambil suatu data. Dari data akan diperoleh fakta atau realitas. Peristiwa yang dipilih sesuai dengan definisi pendekatan studi kasus, di mana fenomena studi sedang berlangsung. Peneliti bertujuan untuk mencari tahu informasi apa yang dapat dipelajari atau ditemukan dari sebuah studi kasus yang sedang diteliti. Studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami suatu fenomena secara mendalam, namun tidak dimaksudkan untuk menghasilkan teori baru. Dengan kata lain, studi kasus tidak

bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan atau menciptakan teori baru, melainkan hanya sebagai bagian dari ketertarikan penulis terhadap suatu persoalan tertentu. Peneliti akan menggali informasi melalui wawancara mendalam dengan sumber utama yang akan memberikan data kepada penulis (Hardani,et al., 2020).

## 2. Sumber dan Jenis Data

### 2.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat langsung dari sumbernya untuk memperoleh informasi dengan alat pengambilan data secara langsung (Murdiyanti, 2020). Dalam penelitian ini, sumber data primer adalah jajaran Dinas Pariwisata, Pokdarwis kampung pelangi dan masyarakat Kampung Pelangi selaku selaku pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses implementasi kebijakan program pengembangan kampung pelangi. Peneliti menggunakan beberapa sumber untuk membandingkan dan menemukan inti penelitian. Hal Ini membantu peneliti membuat kesimpulan tentang pelaksanaan kebijakan program pengembangan Kampung Tematik Pelangi. Adapun data primer yang digunakan sebagai berikut :

**Tabel 1. Identifikasi Informan**

No	Nama	Kriteria
1	Bapak Woko	Ketua Pokdarwis Kampung Pelangi
2	Ibu Handini	Pokdarwis Divisi Pemberdayaan
3	Bapak Bugi	Pokdarwis Divisi Keamanan dan Ketertiban
4	Bapak Ali	Tokoh Agama Kampung Pelangi
5	Ibu Citra	Masyarakat
6	Ibu Prih	Masyarakat
7	Ibu Dani	Masyarakat
8	Ibu Ratna	Masyarakat
9	Bapak Taufiq	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Divisi Kelembagaan

### 2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah kategori data studi yang peneliti peroleh secara tidak langsung. Data dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak ataupun peneliti lain sebelumnya, dan berfokus pada pengumpulan informasi mengenai opini, pandangan, persepsi, pengalaman, atau sikap dari individu atau kelompok tertentu. Data sekunder biasanya diperoleh melalui publikasi akademis, dokumen dan arsip tertulis, atau rekaman audio dan video. Penelitian ini memanfaatkan sumber data sekunder berupa

buku, skripsi, jurnal, dokumen, berita, serta website terkait fenomena penelitian mengenai Program Pengembangan Kampung Tematik (Hasan, 2002).

### **3. Teknik Pengambilan Data**

#### **1.1 Wawancara**

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam yang dilakukan secara terstruktur untuk mencapai tujuan penelitian. Pada saat melakukan wawancara, peneliti sudah mempersiapkan pertanyaan dan memberikan batasan narasumber untuk memberikan informasi sesuai konteks yang diteliti. Dengan wawancara mendalam dan terstruktur, membantu peneliti mengidentifikasi masalah secara lebih langsung dengan mengajukan serangkaian pertanyaan kepada pihak-pihak yang dipilih untuk wawancara. Teknik tersebut merupakan pemilihan sampel yang memperhitungkan faktor-faktor tertentu, seperti informan yang dianggap paling tahu tentang hal yang diteliti, atau mungkin yang paling berpengaruh untuk memfasilitasi peneliti dalam mengejar subjek atau fenomena yang sedang diteliti (Abdussamad, 2021).

#### **1.2 Observasi**

Teknik pengambilan data dengan observasi digunakan untuk mengumpulkan data terkait penelitian. Dalam metode pengumpulan data ini, peneliti menggunakan observasi partisipan, yaitu pengamatan peristiwa yang akan diteliti secara langsung di lapangan dan berinteraksi dengan sumber data (Hardani et al., 2020). Peneliti akan menyelidiki kenyataan sosial di Kampung Pelangi melalui unsur pelaksana program yaitu Pokdarwis dan masyarakat Kampung Pelangi. Studi ini akan mengamati keberhasilan program pengembangan di Kampung Pelangi melalui keterlibatan masyarakat dalam kemandirian program yang diberikan.

#### **1.3 Dokumen**

Dokumentasi adalah bahan tertulis yang dapat digunakan sebagai bukti penelitian, seperti risalah rapat, jurnal, surat kabar, buku, arsip kegiatan. Tujuan penggunaan dokumen dalam penelitian adalah untuk mendukung dan meningkatkan kelengkapan data (Abdussamad, 2021). Metode dokumentasi ini akan digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan program pengembangan Kampung pelangi.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif-analitik. Dengan fokus secara sempit dan mendalam pada isu-isu dari sumber primer maupun sekunder tentang implementasi kebijakan program pengembangan Kampung Pelangi melalui pembinaan masyarakat. Isu-isu yang ada kemudian melalui pengambilan sumber data kemudian dianalisis secara analitik untuk mendapatkan hasil dan diskusi untuk menjawab rumusan masalah. Proses analisis data fokus pada saat proses dilakukan di lapangan seiring dengan pengumpulan data menyatakan bahwa aktivitas analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara berkesinambungan dan interaktif sampai tuntas. Kegiatan yang terlibat dalam analisis data menurut Miles dan Huberman dalam Hardani, et. al, (2020) meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan atau verifikasi kesimpulan.

##### **4.1 Reduksi Data**

Reduksi data didefinisikan sebagai pengolahan data dengan memilah materi untuk menyisihkan data yang tidak relevan, meringkas, serta menyederhanakan data pada fokus yang sesuai dengan topik penelitian. Pengurangan data akan memudahkan penulis untuk menghasilkan data yang memiliki fokus dan konsep pada topik penelitian(Hardani et al., 2020).

##### **4.2 Penyajian Data**

Penyajian data dalam penelitian kualitatif berbentuk ringkasan, infografis, penunjukkan korelasi antar kategori, membuat diagram alur, dan representasi visual lainnya. Representasi penyajian data kualitatif banyak digunakan dengan metode teks narasi, namun terdapat pula penyajiannya diloengkapi seperti gambar ataupun diagram untuk memahami peristiwa dan menentukan langkah-langkah selanjutnya berdasarkan apa yang telah diteliti(Hardani et al., 2020).

##### **4.3 Penarikan Kesimpulan**

Menyimpulkan dan memvalidasi temuan adalah tahap ketiga dalam menganalisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan didapatkan berdasarkan data yang ditemukan pada tahap selanjutnya dalam pengumpulan data. Ketika peneliti kembali ke lapangan jika dengan bukti data yang kuat dan konsisten, maka kesimpulan

tersebut dapat diterima sebagai kredibel. Hasil dari penelitian kualitatif mungkin memenuhi tujuan dan rumusan masalah awal, tetapi juga mungkin tidak karena rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih fleksibel dan dapat berubah seiring dengan proses penelitian. Penelitian kualitatif menghasilkan temuan-temuan baru, seperti penggambaran terhadap suatu fenomena, sebab-akibat atau hubungan yang dinamis, ide-ide, atau implikasi teori (Abdussamad, 2021).

## BAB II KAJIAN TEORI

Sejumlah teori yang akan digunakan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan relevansi dengan judul penelitian.

### A. Kebijakan Publik

Secara etimologis, istilah "kebijakan" atau "*policy*" berasal dari bahasa Yunani "polis" yang berarti negara atau kota. Istilah tersebut kemudian masuk ke dalam bahasa Latin sebagai "politia" yang berarti negara. Akhirnya, istilah tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai "*policie*" yang memiliki arti terkait dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Istilah "kebijakan" atau "*policy*" digunakan untuk mengacu pada perilaku seorang aktor, seperti pejabat, kelompok, atau badan pemerintah, atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat digunakan dan relatif memadai untuk pembicaraan sehari-hari, namun kurang memadai untuk pembicaraan yang lebih ilmiah dan sistematis dalam analisis kebijakan publik (Nuryanti Mustar, 2015).

Sementara itu, pengertian publik dalam konteks *Public Policy* memiliki tiga konotasi, yaitu pemerintah, masyarakat, dan umum. Ini dapat dilihat dari sudut pandang subjek, objek, dan lingkungan dalam kebijakan. Konsep kebijakan publik sendiri mengimplikasikan adanya suatu ruang atau domain dalam kehidupan yang bukan bersifat pribadi atau milik individu, melainkan merupakan milik bersama atau milik umum. Dalam konteks pencapaian tujuan kebijakan publik, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik mudah dipahami karena mengacu pada "tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama." Selain itu, kebijakan publik juga mudah diukur karena ukurannya jelas, yaitu sejauh mana kemajuan dalam mencapai tujuan yang diharapkan telah tercapai (Nuryanti Mustar, 2015).

Friedrich memberikan pengertian bahwa kebijakan adalah tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu. Tindakan tersebut dilakukan dengan menghadapi hambatan dan mencari peluang untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan. Thomas R. Dye, mendefinisikan kebijakan pemerintah sebagai "*is whatever governments choose to do or not to do*". Dikemukakan bahwa apabila pemerintah

memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuannya, dan kebijakan itu harus meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pemerintah semata(Nur & Guntur, 2019).

Laswell dan Kaplan mendefinisikan bahwa kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan berbagai tujuan, nilai, dan praktik tertentu (*a projected program of goals, values, and practices*). Menurut Noeng Muhadjir kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni; (1)tingkat hidup masyarakat meningkat, (2)terjadi keadilan : *By the law, social justice*, dan peluang prestasi dan kreasi individual, (3)diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan (4)terjadi(Nur & Guntur, 2019)rkelanjutan(Nur & Guntur, 2019).

Adapun tahapan dalam proses pembuatan kebijakan menurut Dunn adalah sebagai berikut (Fatmariyanti et al., 2023):

1. Fase Penyusunan Agenda(*Agenda Setting*) : para pejabat yang dipilih dan diangkat di sini menjadikan masalah kebijakan sebagai prioritas dalam agenda publik.
2. Fase Formulasi Kebijakan(*Policy Formulation*) : para pejabat menyusun berbagai opsi kebijakan sebagai solusi untuk mengatasi masalah.
3. Adopsi Kebijakan(*Policy Adoption*) : di sini dilakukan seleksi dan penerimaan alternatif kebijakan dengan dukungan mayoritas dan/atau konsensus dari institusi terkait.
4. Implementasi Kebijakan(*Policy Implementation*) : kebijakan yang telah diambil diimplementasikan oleh unit-unit administrasi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, terutama dalam hal keuangan dan sumber daya manusia.
5. Penilaian Kebijakan(*Policy Assesment*) : unit-unit pemeriksaan dan akuntansi melakukan evaluasi terhadap kelayakan lembaga pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan dalam memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan untuk pembuatan dan pelaksanaan kebijakan.

Benang merah dari definisi kebijakan publik yaitu Kebijakan publik harus sejalan dengan nilai-nilai masyarakat dan dinamika yang ada. Implementasi kebijakan publik penting untuk memastikan esensinya. Kebijakan tersebut harus mengkoordinasikan nilai-nilai dan praktik dalam masyarakat, sebagai rencana tindakan untuk mencapai tujuan

yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Kebijakan memberikan petunjuk dan batasan umum bagi pelaku dan pelaksana kebijakan, penting untuk pengolahan organisasi dan pengambilan keputusan. Kebijakan diharapkan menjadi alat pemecahan masalah atas tindakan yang terjadi. Keberhasilan kebijakan publik tergantung pada implementasi dan manfaat positif bagi anggota masyarakat.

## **B. Implementasi Kebijakan**

Implementasi berasal dari kata "*to implement*" dalam bahasa Inggris, yang memiliki arti melakukan atau melaksanakan. Implementasi merupakan proses menyediakan sarana atau upaya untuk menjalankan sesuatu yang akan menghasilkan dampak atau konsekuensi terhadap suatu hal. Tindakan tersebut dilakukan untuk menghasilkan efek atau konsekuensi yang bisa berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam konteks kehidupan negara (Trinanda Meinar, 2018).

Implementasi menurut Mazmanian dan Sebastier merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan (Putri, 2019).

Implementasi kebijakan menurut Nugroho terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikannya, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang telah dijelaskan oleh Nugroho merupakan dua pilihan, dimana yang pertama langsung mengimplementasi dalam bentuk program dan pilihan kedua melalui formulasi kebijakan.

Pengertian implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implmentasi Van Meter dan Van Horn juga mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan : mengarahkan dalam melaksanakan kebijakan, hal tersebut dilakukan agar sesuai dengan program yang sudah direncanakan.
2. Sumber-sumber kebijakan : faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan meliputi pemanfaatan tenaga kerja, aspek finansial, dan faktor waktu.

Tenaga kerja memiliki peran yang sangat penting sebagai penggerak dan pelaksana kebijakan, sedangkan aspek finansial diperlukan untuk memastikan kelancaran pembiayaan yang tidak menghambat proses pelaksanaan kebijakan. Selain itu, waktu juga menjadi faktor kunci dalam implementasi kebijakan, karena waktu merupakan pendukung keberhasilan kebijakan. Penggunaan waktu sebagai sumber daya merupakan faktor penentu bagi pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan.

3. Ciri-ciri atau sifat Badan/Instansi pelaksana : kesuksesan pelaksanaan kebijakan publik sangat ditentukan oleh kesesuaian karakteristik dan kesesuaian dengan lembaga atau instansi yang bertanggung jawab dalam menjalankannya. Kualitas kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau karakteristik dari para pelaku yang terlibat, termasuk tingkat pendidikan, kompetensi di bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moral.
4. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan : koordinasi tidak hanya terkait dengan pertukaran informasi atau pembentukan struktur administratif yang sesuai, tetapi juga melibatkan aspek yang lebih mendasar, yaitu penerapan kebijakan dalam praktik.
5. Sikap para pelaksana : termasuk dalam hal struktur birokrasi, norma-norma, dan pola hubungan internal, sikap dan tanggung jawab pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas mereka harus didasarkan pada kedisiplinan. Kedisiplinan ini memiliki peran penting dalam mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Setiap lembaga atau instansi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan harus merasa bertanggung jawab terhadap tugas-tugas mereka sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik : sejauh mana lingkungan eksternal memberikan dukungan terhadap kesuksesan kebijakan publik yang telah ditetapkan memiliki pengaruh yang signifikan, lingkungan tersebut meliputi dimensi ekonomi, sosial, dan politik. Faktor-faktor ini juga memiliki peranan krusial dalam menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

Dari uraian beberapa ahli diatas, implementasi kebijakan merupakan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Namun, sebelumnya pemerintah perlu melakukan penilaian

untuk mengevaluasi potensi dampak negatif kebijakan terhadap masyarakat. Tujuannya adalah agar kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan tidak merugikan masyarakat. Jika suatu program kebijakan tidak diimplementasikan dengan baik, maka kebijakan tersebut menjadi tidak bermakna. Oleh karena itu, kebijakan yang telah diambil harus dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang menggunakan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini, berbagai kepentingan akan bersaing satu sama lain.

### **C. Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle**

Para ahli dan akademisi telah banyak mengemukakan pengertian dari implementasi. Pada penelitian ini, konsep mengenai implementasi menggunakan model implementasi kebijakan oleh Grindle. Menurutnya, proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan. Hal ini meliputi program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan pada kelompok sasaran. Suatu program hanya akan menjadi catatan elit jika tidak dilaksanakan oleh para aktor dan lembaga pemerintah di tingkat yang lebih rendah sebagai unsur pelaksana. Pelaksanaan kebijakan memerlukan penggunaan sumber daya finansial dan manusia. Untuk mencapai komunikasi yang efektif dari suatu program, penting bagi pelaksana untuk memahami informasi secara jelas, termasuk dalam proses penyebaran informasi, kejelasan informasi, dan konsistensi informasi yang disampaikan (Tunggadewi & Christiani, 2019).

Politik implementasi kebijakan menarik untuk dianalisis di negara-negara Dunia Ketiga. Implementasi menarik perhatian karena melibatkan berbagai faktor dari ketersediaan sumber daya yang cukup hingga struktur hubungan antar pemerintah. Hal tersebut juga meliputi komitmen pejabat tingkat rendah hingga mekanisme pelaporan dalam birokrasi. Istilah kebijakan dan program sering digunakan bergantian. Pelaksanaan kebijakan dianggap tergantung pada hasil program, sulit untuk memisahkan kebijakan dari program-program konstituennya. Terdapat banyak campur tangan antara tujuan program kebijakan yang diharapkan dan proses pencapaian tujuan tersebut dalam masyarakat. Pelaksanaan program kebijakan tergantung pada pelaksanaannya dengan mengasumsikan bahwa program-program tersebut memang sesuai untuk mencapai tujuan kebijakan. Ketidaksesuaian yang sering kali tidak sempurna antara lain adalah kebijakan yang diadopsi dan suatu program yang sebenarnya disampaikan dan direalisasikan. Implementasi kebijakan program melibatkan pertanyaan mendasar tentang konflik,

pengambilan keputusan, dan "siapa yang mendapatkan apa" dalam sebuah masyarakat (Grindle,2017).

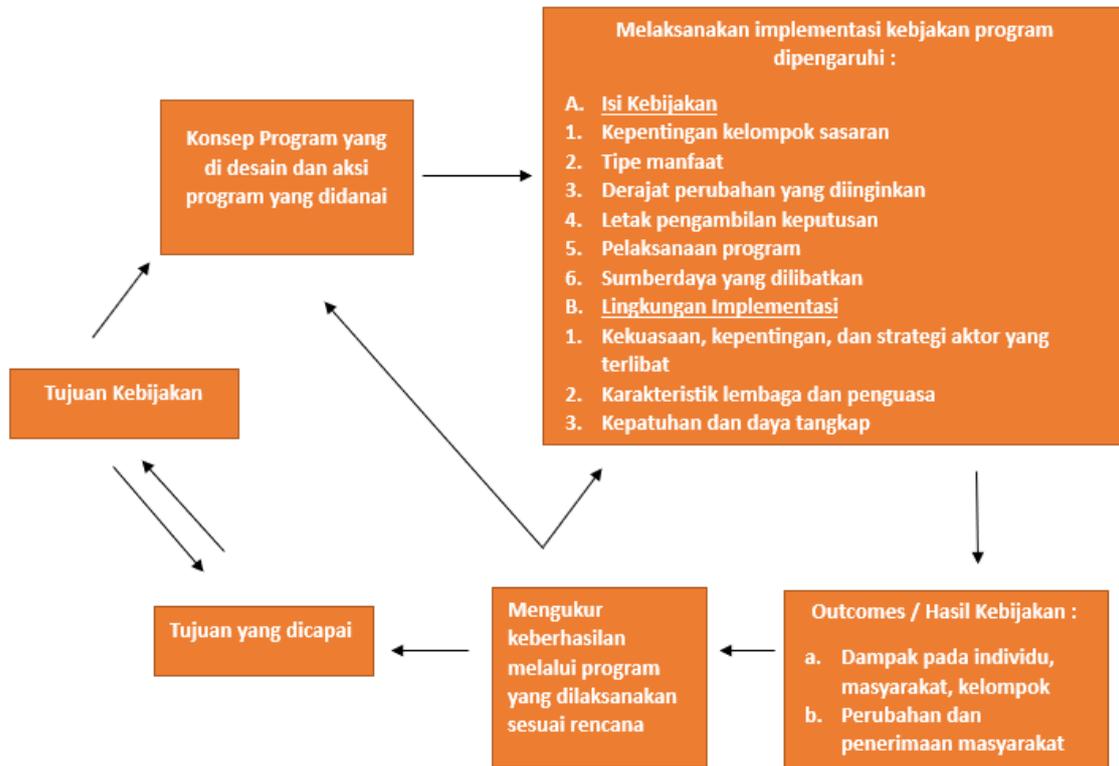
Studi tentang proses implementasi kebijakan selalu melibatkan investigasi dan analisis program tindakan nyata yang telah dirancang sebagai sarana untuk mencapai tujuan kebijakan. Hal ini terlihat dalam studi yang dikumpulkan oleh Grindle di bukunya, salah satunya membahas topik yang sama dengan penelitian yaitu tujuan pengembangan umum yang diharapkan dicapai oleh pemerintahan negara Dunia Ketiga. Fenomena yang menjadi perbincangan adalah eradikasi dan penyelesaian permukiman kumuh yang kemudian diberikan program khusus untuk mencapai tujuan tersebut. Demikian pada penelitian ini yang menganalisis penyelesaian pemukiman kumuh dengan program melalui aspek pariwisata pengembangan lingkungan dan SDM nya. Secara khusus, buku ini ingin mengatasi dua pertanyaan umum tentang implementasi. Pertama, ketertarikan mengenai efek dari isi program kebijakan terhadap implementasinya. Kedua, tentang bagaimana konteks politik dari aksi mencapai tujuan mempengaruhi implementasi kebijakan (Grindle, 2017).

Proses politik dapat terlihat dalam bagaimana keputusan diambil dan melibatkan berbagai pihak dalam suatu kebijakan. Adanya implementasi kebijakan bertujuan untuk memahami program atau proyek yang telah diformulasikan. Model implementasi Grindle menganalisis beberapa keterlibatan aspek termasuk penerima implementasi, konflik antar pihak dan sumber daya yang dibutuhkan. Oleh karena itu, aspek politik sangat mempengaruhi proses implementasi program kebijakan(Assadiqie, 2019). Pendapat tersebut dapat dikaitkan dengan evaluasi kebijakan. Konsep implementasinya meyakini bahwa keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh apakah tujuannya tercapai selama proses mencapai hasilnya(outcomes).

Keberhasilan implementasi kebijakan dalam prosesnya dapat diukur dengan dua faktor yaitu program aksi dan proyek individu yang didesain dan dibiayai berdasarkan tujuan kebijakan. Dari dua faktor tersebut akan mendorong tercapainya keberhasilan tujuan kebijakan dengan menganalisis dua pengaruh variabel yaitu isi kebijakan dan lingkungan(konteks). Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan akan memberikan hasil berupa dampak pada masyarakat, individu dan kelompok sasaran serta perubahan dan penerimaan oleh masyarakat terhadap kebijakan yang terlaksana(Grindle,2017).

Berikut model keberhasilan implementasi kebijakan Grindle melalui skema bagan:

**Gambar 1. Skema Implementasi oleh Grindle**



Sumber : Diolah Penulis

Variabel isi kebijakan menurut Grindle mencakup indikator:

1. Kepentingan Kelompok Sasaran

Saat kebijakan diimplementasikan, kepentingan kelompok sasaran dapat mempengaruhinya. Indikator ini menyatakan bahwa eksekusi suatu kebijakan dipengaruhi oleh banyak kepentingan. Dengan indikator ini, akan membantu mengetahui bagaimana program kebijakan mencerminkan muatan kepentingan yang dibutuhkan untuk kelompok sasaran. Kelompok sasaran pada penelitian ini adalah Pokdarwis dan masyarakat Kampung Pelangi.

2. Tipe Manfaat

Indikator ini bertujuan menunjukkan bahwa suatu program kebijakan harus mempunyai manfaat yang menunjukkan pengaruh baik terhadap kelompok sasaran.

Dalam penelitian ini akan menganalisis sejauh mana manfaat program yang didapatkan oleh Pokdarwis dan masyarakat Kampung Pelangi dalam pengembangan Kampung Pelangi.

### 3. Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai

Setiap kebijakan memiliki tujuan yang dicapai. Isi kebijakan dilihat sejauh mana perubahan yang ingin dicapai dengan skala yang jelas. Program yang berupaya mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran lebih sulit dilaksanakan daripada program yang hanya berfokus pada peningkatan fisik. Indikator ini akan melihat sejauh mana skala perubahan pengembangan Kampung Pelangi melalui program yang dinaungi oleh Dinas Pariwisata sebagai pembuat program dan sejauh mana skala tersebut telah tercapai.

### 4. Letak Pengambilan Keputusan

Indikator ini menjelaskan di mana ketepatan proses pengambilan keputusan suatu kebijakan akan dilaksanakan, karena hal tersebut memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menganalisis apakah suatu program berada di tempat yang tepat. Yaitu, apakah isi program yang diberikan telah sesuai dengan pengembangan pariwisata di Kota Semarang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai sasaran petunjuk pelaksanaan kampung tematik yang mana perkembangannya dinaungi oleh Dinas Pariwisata.

### 5. Pelaksana Program

Untuk menjamin keberhasilan suatu kebijakan atau program, implementasinya harus didukung oleh para pelaksana kebijakan yang kompeten dan berkualitas. Apakah suatu kebijakan menentukan pelaksananya secara rinci atau tidak, fakta ini akan tercermin melalui aktivitas para pelaksana di lapangan. Dalam hal ini adalah menganalisis aktivitas di lapangan terkait melaksanakan program yang diberikan oleh Dinas Pariwisata disosialisasikan kepada Pokdarwis serta masyarakat Kampung Pelangi sebagai unsur pelaksana.

### 6. Dukungan Sumber-Sumber Daya yang Digunakan

Indikator ini menganalisis bagaimana program didukung oleh sumber daya yang memadai. Pelaksanaan kebijakan ini harus didukung oleh sumber daya yang

diperlukan untuk keberhasilan program. Kategori dukungan sumber daya yang digunakan mencakup Sumber Daya Manusia mencakup keahlian, pengalaman, dan kapasitas kelompok sasaran yang diperlukan untuk melaksanakan program. Sumber Daya Keuangan mencakup anggaran, dana, dan alokasi sumber daya. Sumber Daya Informasi mencakup data, informasi, dan sistem informasi yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan dan pelaporan. Sumber Daya Teknis mencakup teknologi, peralatan, dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk melaksanakan tindakan atau kegiatan yang diperlukan.

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup 3 indikator yaitu:

1. Kekuasaan, Kepentingan-Kepentingan, dan Strategi dari Aktor yang Terlibat

Variabel ini menganalisis sejauh mana kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi pelaksanaan program. Kekuasaan dapat berasal dari berbagai sumber, seperti posisi formal, akses terhadap sumber daya, dukungan masyarakat, atau keahlian khusus. Kepentingan-kepentingan merujuk pada kepentingan yang dimiliki oleh berbagai aktor yang terlibat dalam implementasi program. Kepentingan ini dapat bervariasi dan dapat menyebabkan konflik atau persaingan di antara berbagai aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program. Memahami kepentingan-kepentingan yang terlibat dapat membantu para pembuat program untuk mengelola konflik dan memperoleh dukungan yang diperlukan untuk keberhasilan implementasi. Strategi dapat melibatkan berbagai tindakan oleh berbagai aktor yang dapat memengaruhi implementasi kebijakan. Memahami konsep pada indikator ini dapat membantu para implementor dan pembuat program kebijakan untuk merencanakan dan mengelola implementasi kebijakan publik dengan lebih efektif, serta mengatasi tantangan dan hambatan yang mungkin terjadi selama proses implementasi.

2. Karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa

Karakteristik lingkungan tempat suatu kebijakan dilaksanakan juga akan mempengaruhi hasil akhir dari kebijakan tersebut. Dalam indikator ini dimaksudkan sejauh mana rezim politik dan organisasi kelompok sasaran memiliki kekuatan untuk melaksanakan kebijakan yang mereka komitmenkan. Pendapat mengenai rezim pada Grindle(2017) adalah sejauh mana aktivitas pelaksanaan dikendalikan dari pusat politik atau birokrasi yang terlibat. Desentralisasi dapat menjadi strategi yang layak

di mana otoritas pusat tetap mempertahankan kapasitas untuk memastikan bahwa kegiatan pelaksanaan tetap dalam batas-batas tujuan dan struktur program. Di dalam bukunya, beberapa studi menunjukkan bahwa proses pelaksanaan dapat bervariasi tergantung pada rezim politik bersifat otoriter atau sistem yang lebih terbuka terkait muatan program. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan dalam implementasi program, apakah prioritas aktor-aktor politik mempengaruhi suatu program atau kebijakan (Grindle, 2017).

### 3. Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana

Bagian yang penting dalam penerapan kebijakan juga melibatkan kepatuhan dan tanggapan dari pelaksana kebijakan tersebut. Bagian ini menjelaskan sejauh mana pelaksana mematuhi kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Responsivitas juga merupakan masalah penting dalam mencapai tujuan kebijakan dan program dalam suatu lingkungan. Idealnya, institusi harus responsif terhadap kebutuhan para pelaksana kebijakan untuk memastikan implementasi yang sukses dan menguntungkan. Tanpa responsivitas yang memadai selama implementasi, pembuat kebijakan akan kehilangan informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi pencapaian program. Implementor harus memastikan adanya tingkat responsivitas yang memadai untuk memberikan fleksibilitas, dukungan, dan umpan balik, sambil tetap menjaga kontrol yang cukup atas alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mencapai keseimbangan ini merupakan tugas yang rumit dan membutuhkan kecerdasan politik yang tinggi dalam memperhitungkan berbagai respon yang mungkin dari para aktor yang terlibat (Grindle, 2017). Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran yaitu Pokdarwis dan masyarakat Kampung Pelangi.

Menurut Grindle, langkah pengambilan keputusan sebagai fase terpenting dalam model implementasi kebijakan. Seperti disebutkan di atas, enam faktor pengaruh isi kebijakan ditambah dengan tiga konteks atau lingkungan kebijakan menggambarkan interaksi antara pembuat program kebijakan, pelaksana program kebijakan, dan pengguna program kebijakan. Menurut Grindle "model proses politik" menekankan kekuatan model dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan program melalui kontribusi dan capaiannya (Akib, 2010). Memilih program yang sesuai membantu masyarakat memaksimalkan upaya untuk mencapai tujuan. Setelah

memilih kebijakan program, diperlukan pelaksana dengan kekuatan dan sarana untuk melaksanakan program. Lingkungan kebijakan juga memiliki peran yang penting, karena akan mempengaruhi respon dan dukungan masyarakat terhadap suatu program. Jika lingkungan memiliki pandangan positif, akan membantu dalam implementasi program kebijakan yang sukses. Namun, jika lingkungan memiliki pandangan negatif, akan menyebabkan benturan sikap dan mengancam kesuksesan implementasi. Terlebih lagi, kepatuhan kelompok sasaran kebijakan adalah capaian dari implementasi kebijakan dan menentukan pengaruh yang dirasakan masyarakat (Kamarudin, 2017).

Jadi, implementasi program menurut Grindle adalah proses penerapan dan pelaksanaan suatu program atau kebijakan yang melibatkan berbagai aktivitas dan tahapan. Eksekusi program kebijakan mencakup kekuatan politik, ekonomi, dan sosial dan membutuhkan koordinasi dan kerjasama yang baik antara berbagai pihak terkait. Faktor-faktor seperti komitmen pencapaian tujuan, kapasitas unsur pelaksana, sumber daya, dan dukungan masyarakat mempengaruhi implementasi program perlu diperhatikan dan dikelola dengan baik. Jika tidak berhasil dalam capaiannya analisis implementasi Grindle membantu untuk mempersiapkan pelaksanaan meliputi perencanaan sumber daya, metode, mengubah kebijakan menjadi rencana dan tujuan yang dapat disetujui dan dilaksanakan, dan mengukur faktor pendukung dan penghambat.

#### **D. Kampung Wisata**

Kampung wisata adalah sebuah konsep yang mengintegrasikan atraksi wisata, akomodasi, dan fasilitas pendukung dalam sebuah struktur kehidupan masyarakat. Konsep ini memberikan kesempatan bagi sekelompok wisatawan untuk tinggal atau berdekatan dengan lingkungan tradisional masyarakat setempat, sehingga mereka dapat belajar mengenai kehidupan masyarakat tersebut. Berdasarkan integrasi dari ketiga elemen tersebut, desa/kampung wisata dapat dibagi menjadi tiga komponen utama. (De et al., 2021), yaitu:

1. *Primary Elements* : dalam konteks wisata budaya, terdapat dua elemen dasar yang dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu *Activity Places* dan *Leisure Settings*. *Activity Places* mencakup fasilitas budaya seperti museum, galeri, ruang pertunjukan, dan ruang workshop. Selain itu, juga mencakup fasilitas warisan

budaya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Sementara itu, *Leisure Settings* meliputi tatanan fisik seperti pola jalan sejarah, bangunan yang memiliki daya tarik khusus, monumen, dan area taman atau ruang hijau. Selain itu, juga mencakup fitur-fitur sosial-budaya seperti tingkat kehidupan yang nyaman di kawasan tersebut, bahasa yang digunakan, nilai-nilai lokal, dan hubungan antar warga.

2. *Secondary Elements* : elemen-elemen pendukung dalam wisata budaya mencakup fasilitas-fasilitas sekunder yang mendukung kehidupan warga dan wisatawan di suatu destinasi. Fasilitas-fasilitas ini termasuk pasar, toko lokal, kios, layanan makanan, dan akomodasi penginapan.
3. *Additional Elements* : *elemen*-elemen tambahan dalam kawasan budaya adalah fasilitas pendukung tersier yang meliputi aksesibilitas, sarana transportasi dan tempat parkir, serta pusat informasi bagi wisatawan.

Menurut Pitana (Dyah Eka Noviyanti et al., 2018) , potensi pada destinasi wisata dipengaruhi adanya 4 pendekatan yang lebih dikenal dengan istilah pendekatan 4A dalam komposisi kepariwisataan yaitu:

1. Atraksi merujuk pada segala hal yang bisa dinikmati oleh para wisatawan ketika mereka mengunjungi suatu tempat tujuan yang menjadi target mereka.
2. Aksesibilitas mengacu pada sarana yang memudahkan akses untuk mencapai daerah tujuan wisata, di mana tempat tersebut mudah dijangkau dan sarana-sarana dapat dengan mudah ditemukan.
3. Amenitas mengacu pada ketersediaan fasilitas pendukung di tempat tujuan wisata yang memudahkan wisatawan, seperti akomodasi, restoran, hiburan, transportasi, komunikasi, dan sebagainya.
4. Aktivitas mengacu pada kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan selama mereka berada di daerah tujuan wisata. Daya tarik wisata meliputi faktor-faktor seperti:
  - a. Daya tarik ilmiah meliputi faktor-faktor seperti kondisi iklim, keindahan pemandangan alam, keberagaman lingkungan hidup, flora dan fauna yang ada, keberadaan danau, karang, gua, tebing, lembah, gunung, dan sejenisnya.
  - b. Daya tarik manusia meliputi sisa-sisa peradaban masa lalu, dokumen bersejarah, museum, tempat pemakaman bersejarah, dan sejenisnya yang memberikan nilai sejarah dan budaya.

- c. Daya tarik yang bersifat manusiawi merujuk pada daya tarik yang terkait dengan penduduk setempat dan warisan budaya yang mereka miliki, seperti pertunjukan tarian, drama, sandiwara, upacara perkawinan, dan sejenisnya.

### **BAB III**

## **PROFIL KOTA SEMARANG DAN KAMPUNG PELANGI**

#### **A. Profil Kota Semarang**

##### **1. Letak dan Kondisi Geografis**

Kota Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang telah berdiri sejak tanggal 2 Mei 1547. Terletak di tengah-tengah Pulau Jawa, Kota Semarang memiliki posisi geografis antara garis lintang selatan  $6^{\circ} 50'$  -  $7^{\circ} 10'$  dan garis bujur timur  $109^{\circ} 35'$  -  $110^{\circ} 50'$ . Keberadaan Kota Semarang sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jawa Tengah didukung oleh lokasinya yang strategis di jalur lalu lintas ekonomi Pulau Jawa. Hal ini menjadikan Kota Semarang tidak hanya berperan sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai salah satu pusat ekonomi di Jawa Tengah. Kota Semarang memiliki posisi yang strategis sebagai koridor pembangunan di Provinsi Jawa Tengah, dengan empat pintu gerbang utama yaitu koridor pantai utara, koridor selatan, koridor timur, dan koridor barat. Selain itu, Kota Semarang juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas transportasi penting seperti Pelabuhan Tanjung Emas, Bandar Udara Internasional Ahmad Yani, Terminal Terboyo, Stasiun Kereta Api Tawang, dan Stasiun Kereta Api Poncol. Fasilitas transportasi ini semakin memperkuat peran Kota Semarang sebagai pusat aktivitas pembangunan dan pintu gerbang ekonomi di Provinsi Jawa Tengah serta di bagian tengah Pulau Jawa.

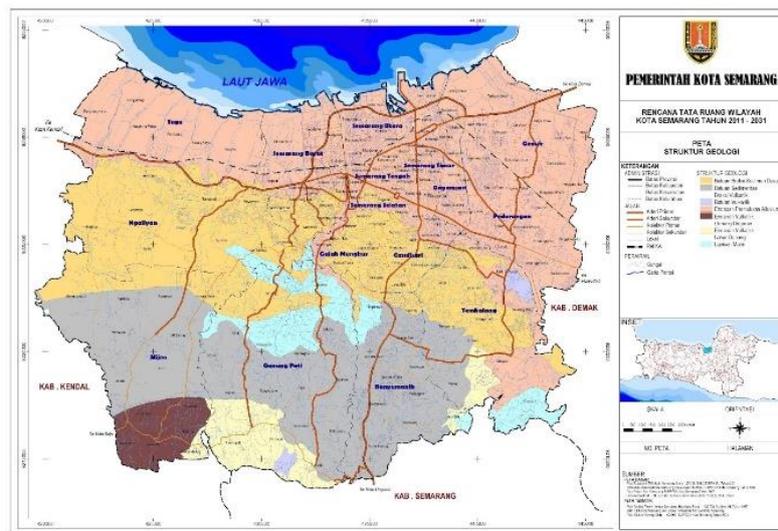
Kota Semarang memiliki batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang
- Sebelah Timur : Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan
- Sebelah Barat : Kabupaten Kendal

Secara topografi terdiri atas daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan. Daerah pantai merupakan kawasan di bagian utara yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa dengan kemiringan antara 0%-2% daerah dataran rendah merupakan kawasan di bagian tengah, dengan kemiringan antara 2-15% daerah perbukitan merupakan kawasan di bagian selatan dengan kemiringan antara 15%-40% dan beberapa kawasan dengan kemiringan diatas 40%.

Jika dilihat secara kewilayahan, Kota Semarang berada dalam wilayah Kedungsepur yang meliputi Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Grobogan. Secara keseluruhan, wilayah ini terdiri dari 85 kecamatan, sementara Kota Semarang sendiri terdiri dari 16 kecamatan. Dalam perkembangan Jawa Tengah, Kota Semarang memainkan peran yang sangat penting. Keberadaan pelabuhan, jaringan transportasi darat (jalur kereta api dan jalan), serta transportasi udara, menjadi potensi penting bagi simpul transportasi Regional Jawa Tengah dan Kota Transit Regional Jawa Tengah. Selain itu, Kota Semarang juga memiliki hubungan yang kuat dengan luar Jawa, menjadikannya sebagai pusat wilayah nasional bagian tengah yang tak kalah pentingnya.

**Gambar 2. Peta Kota Semarang**



Sumber : Bappeda Kota Semarang

Visi Kota Semarang adalah “Semarang Kota Metropolitan yang Religius, Tertib, dan Berbudaya”. Misi Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas.
2. Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik.
3. Mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan.
4. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal.

## **2. Kondisi Demografis**

Dalam aspek administratif, Kota Semarang terdiri dari 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Wilayah kecamatan memiliki variasi luas, di mana terdapat dua kecamatan yang memiliki luas terbesar dan dua kecamatan dengan luas terkecil. Kecamatan yang paling luas terletak di bagian selatan Kota Semarang, dengan sebagian besar wilayahnya masih memiliki potensi dalam sektor pertanian dan perkebunan. Kecamatan Mijen memiliki luas wilayah mencapai 57,55 km<sup>2</sup>, sementara Kecamatan Gunungpati memiliki luas wilayah sebesar 54,11 km<sup>2</sup>. Di sisi lain, Kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Semarang Selatan yang meliputi wilayah seluas 5,93 km<sup>2</sup>, dan Kecamatan Semarang Tengah yang memiliki luas wilayah sebesar 6,14 km<sup>2</sup>. Kedua kecamatan ini merupakan pusat kota dan juga menjadi pusat perekonomian atau bisnis Kota Semarang. Karena itu, sebagian besar wilayahnya didominasi oleh bangunan bersejarah yang terkenal, seperti Kawasan Simpang Lima, Kawasan Tugu Muda, Pasar Bulu, Pasar Peterongan, Pasar Johar, dan sekitarnya, yang secara kolektif dikenal sebagai "Kota Lama" Semarang.

Kota Semarang merupakan sebuah kota yang luas yang berbatasan langsung dengan pantai. Oleh karena itu, penduduk di Kota Semarang sangat beragam dengan berbagai latar belakang suku, etnis, agama, dan ras. Masyarakat Kota Semarang terdiri dari berbagai etnis, seperti Jawa, Tionghoa, dan lainnya. Agama yang dianut oleh penduduk Kota Semarang mayoritas adalah Islam, namun terdapat juga penganut agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Chu. Tingkat keragaman penduduk Kota Semarang yang tinggi sejalan dengan jumlah penduduk yang besar. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Semarang pada tahun 2022, jumlah penduduk Kota Semarang mencapai 1.656.564 jiwa. Berikut ini adalah data mengenai jumlah penduduk Kota Semarang berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin.

**Tabel 1. Jumlah Kependudukan Di Kota Semarang Berdasarkan Umur Dan Jenis Kelamin**

Kelompok Umur Age Groups	Jenis Kelamin Gender		
	Laki-Laki/ Male	Perempuan/ Female	Jumlah/ Total
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	59 504	56 673	116 177
5-9	62 324	59 608	121 932
10-14	64 596	61 052	125 648
15-19	66 546	62 632	129 178
20-24	64 040	61 511	125 551
25-29	64 617	64 356	128 973
30-34	65 580	66 547	132 127
35-39	67 039	68 197	135 236
40-44	66 165	68 233	134 398
45-49	59 085	62 225	121 310
50-54	51 914	56 164	108 078
55-59	44 172	48 986	93 158
60-64	35 730	39 247	74 977
65-69	25 328	28 949	54 277
70-74	12 696	15 245	27 941
75+	10 449	17 154	27 603
<b>Kota Semarang</b>	<b>819 785</b>	<b>836 779</b>	<b>1 656 564</b>

Sumber : BPS Kota Semarang

### 3. Kondisi Sosial Politik dan Ekonomi

#### 3.1 Kondisi Sosial Politik

Kawasan strategis sosial budaya merujuk pada wilayah yang memiliki potensi pengembangan dalam bidang sosial budaya. Pengembangan kawasan strategis ini dapat mempengaruhi pertumbuhan daerah lain dalam hal sosial budaya. Di Kota Semarang, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2011-2031, salah satu kawasan strategis bidang sosial budaya adalah Masjid Agung Semarang atau yang sering disebut Masjid Agung Kauman. Terletak di Kauman Semarang, masjid ini berada di pusat perdagangan dan jasa Petawangi. Kawasan Masjid Agung Semarang memiliki keistimewaan dalam bidang sosial budaya karena memiliki nilai sejarah yang tinggi dan aktivitas sosial yang kaya. Masjid Kauman didirikan pada tahun 1575 M dan memiliki kaitan erat dengan awal berdirinya Kota Semarang. Aktivitas sosial di sekitar Kauman dipengaruhi oleh keberadaan Kampung Kauman, sebuah pemukiman yang dihuni oleh para santri pribumi dan sebagian warga keturunan Arab. Budaya Islam yang kental terasa di Kampung Kauman, sementara di sekitar kawasan tersebut juga terdapat pecinan yang memiliki kebudayaan khas Tionghoa.

Keberagaman nilai-nilai yang ada di kawasan ini mendorong perkembangan budaya di Kota Semarang(BAPPEDA, 2021).

Kawasan strategis sosial budaya lainnya yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2011-2031 adalah Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah. Kawasan ini terletak di Kecamatan Gayamsari, sekitar 4,5 km dari pusat Kota Semarang. Kawasan ini memiliki nilai sosial budaya yang tinggi tidak hanya bagi masyarakat Kota Semarang, tetapi juga seluruh warga Jawa Tengah. Masjid ini relatif baru, didirikan pada tahun 2002 dan diresmikan pada tahun 2006. Kawasan ini memiliki daya tarik wisata karena keindahan arsitektur megah masjidnya yang menggabungkan 3 gaya arsitektur. Sebagai masjid pusat bagi masyarakat Jawa Tengah, kawasan ini mendorong kegiatan sosial di Kota Semarang(BAPPEDA, 2021).

Salah satu kawasan strategis dalam bidang sosial budaya terkait dengan pendidikan. Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang tahun 2011-2031, kawasan pendidikan terletak di Kecamatan Tembalang dan Gunungpati. Hal ini disesuaikan dengan kondisi eksisting, di mana terdapat perguruan tinggi besar seperti Universitas Diponegoro (UNDIP) di Kecamatan Tembalang dan Universitas Negeri Semarang (UNNES) di Kecamatan Gunungpati. Kawasan ini menjadi pusat pelayanan pendidikan tinggi di Kota Semarang dengan jangkauan nasional. Untuk mendukung pelayanan optimal di kawasan ini, pengembangan infrastruktur pendukung yang memadai sangat diperlukan. Keberadaan pusat pendidikan dengan skala nasional juga mendorong perkembangan nilai-nilai sosial dan budaya. Heterogenitas budaya dalam satu kawasan menghasilkan gaya hidup baru yang dipengaruhi oleh aktivitas pendidikan, baik di UNDIP maupun UNNES(BAPPEDA, 2021).

Perkembangan ruang yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa telah mendorong munculnya banyak fasilitas hiburan seperti kafe dan tempat kerja. Salah satu kawasan strategis sosial budaya berikutnya adalah Kawasan Gedong Batu, yang terletak di Kecamatan Semarang Barat. Kawasan Gedong Batu, atau lebih dikenal sebagai Sam Poo Kong, menjadi salah satu ikon pariwisata Kota Semarang. Sam Poo Kong masih digunakan sebagai tempat ibadah bagi umat Tionghoa. Keindahan arsitektur bangunan Sam Poo Kong dan nilai sejarah yang terkandung di dalamnya

menjadikan Kawasan Sam Poo Kong sangat menarik bagi wisatawan. Keunikan Sam Poo Kong terletak pada akulturasi budaya Islam dan Tionghoa, dengan pendiri Sam Poo Kong adalah seorang Tionghoa yang menganut agama Islam. Klenteng ini tidak hanya dikunjungi oleh orang Tionghoa, tetapi juga oleh penganut Islam kejawen yang masih melestarikan budaya leluhur. Hal ini memiliki pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya di Kota Semarang. Kawasan ini mencerminkan kebudayaan Tionghoa dan Islam yang ada di Kota Semarang (BAPPEDA, 2021).

Kawasan strategis Kota Lama juga termasuk dalam kawasan strategis sosial budaya. Gaya arsitektur kolonial Belanda yang khas pada bangunan-bangunannya mencerminkan sejarah dan budaya yang terbentuk di sana. Kawasan Kota Lama dahulu merupakan pusat pemerintahan Belanda pada masa kolonial dan saat ini berfungsi sebagai tujuan wisata sejarah yang mengisahkan masa kejayaan kolonial Belanda di Kota Semarang. Selain menjadi destinasi wisata, kawasan ini juga menjadi tempat banyak acara yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta. Bangunan-bangunan di Kota Lama sebagian dimiliki oleh pemerintah dan sebagian lagi dimiliki oleh individu. Kreativitas dalam menonjolkan arsitektur yang unik dan menarik menjadi bentuk pengembangan ekonomi kreatif. Dengan mempertahankan kekhasan arsitektur yang ada, langkah revitalisasi bangunan lama dapat menjaga keberlangsungan nilai sejarah dan juga menjadikannya sebagai daya tarik wisata yang memperkenalkan nilai-nilai sejarah, terutama dalam perkembangan Kota Semarang. Melalui sektor arsitektur yang khas, aspek sosial budaya suatu kawasan dapat terasa hidup dan terpelihara (BAPPEDA, 2021).

Hevearita Gunaryanti Rahayu sebagai Wali Kota Semarang periode 2021-2026 menggantikan Hendrar Prihadi yang kini menjabat Kepala Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI periode 2022-2027. Ia dilantik oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Gedung Gradhika Bakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Senin 30 Januari 2023. Ita, sebagai Wali Kota Semarang, mencatatkan prestasi baru sebagai wanita pertama yang berhasil menjabat posisi tersebut. Selain sebagai Wali Kota Semarang, Ita juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Semarang. Dia juga telah menerima beberapa penghargaan, antara lain penghargaan Satyalancana Pembangunan Bidang Koperasi dan UKM. Pada tahun 2019, Ita juga meraih

penghargaan Anugerah Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) tingkat Provinsi Jawa Tengah. (Kompas, 2023).

Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu melakukan penandatanganan MoU dengan Pemerintah Kota Fuzhou, yang bertepatan dengan perayaan 20 tahun terjalannya hubungan *sister province* antara Provinsi Jawa Tengah dan Fujian, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu 10 Mei 2023. kegiatan kerja sama ini dari segi ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dan lain-lain yang tentu akan segera ditindaklanjuti. Diharapkan khususnya bisa terjadi tukar menukar pengetahuan tentang pariwisata dan kebudayaan. Kita bisa saling melakukan pertukaran ilmu-ilmu. Misal di sana tidak ada, kami bisa support atau sebaliknya, di sana ada, di kami tidak ada, bisa didukung(KlikWarta, 2023).

### **3.2 Aspek Ekonomi**

Pengembangan Kota Semarang sebagai pusat perdagangan dan jasa memiliki keterkaitan yang erat dengan pengembangan kawasan strategis untuk pertumbuhan ekonomi. Salah satu kawasan strategis ekonomi yang dimiliki oleh Kota Semarang adalah CBD Pemuda-Pandanaran-Gajah Mada (Pandama), yang juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Kawasan CBD Pandama telah mengalami perkembangan pesat dan dikenal dengan sebutan Petawangi. Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2011-2031, Kota Semarang memiliki dua wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan strategis untuk pengembangan ekonomi.

Kawasan strategis pertama adalah Kawasan Peterongan-Tawang-Siliwangi (Petawangi), yang memiliki potensi perekonomian yang besar. Di segitiga Petawangi ini, aktivitas utama berpusat pada perdagangan dan jasa, dengan keberadaan hotel dan pusat perdagangan yang didukung oleh Stasiun Tawang sebagai pintu gerbang kedatangan di Kota Semarang. Perkembangan hotel di kawasan strategis ini sebagian besar dipengaruhi oleh pertumbuhan aktivitas MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) di Kota Semarang. Kontribusi pendapatan dari sektor perhotelan di seluruh kawasan Kota Semarang dapat mencapai 70% dari total pendapatan, yang didukung oleh perkembangan aktivitas MICE tersebut(BAPPEDA, 2021).

Kawasan strategis yang menarik perhatian dalam pengembangan ekonomi adalah Pelabuhan Tanjung Emas. Pelabuhan ini memiliki status nasional dan menjadi

tempat berlabuhnya kapal-kapal internasional, yang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pergerakan barang dan jasa melalui jalur laut. Namun, kawasan Pelabuhan Tanjung Emas juga menghadapi tantangan dari limitasi alam, seperti penurunan permukaan tanah. Oleh karena itu, perlu dicari solusi yang dapat mengatasi masalah ini agar aktivitas ekonomi di Pelabuhan Tanjung Emas tetap berjalan lancar. Dalam hal ini, aktivitas ekonomi yang terjadi di pelabuhan ini akan menciptakan dampak yang luas secara berkelanjutan. Selain itu, adanya industri pengolahan yang banyak terdapat di Jawa Tengah juga meningkatkan aktivitas layanan di Pelabuhan Tanjung Emas. Dengan lokasinya yang berada di antara dua pelabuhan besar, yaitu Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Tanjung Emas semakin penting dalam melayani berbagai aktivitas pelabuhan (BAPPEDA, 2021).

## **B. Perkembangan Pariwisata Kota Semarang**

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 2009, pariwisata didefinisikan sebagai berbagai kegiatan wisata yang didukung oleh fasilitas dan layanan yang disediakan oleh dunia usaha, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Undang-Undang tersebut juga menegaskan bahwa pariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab, sambil tetap menjaga nilai-nilai agama dan budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian lingkungan, serta kepentingan nasional (Sumastuti et al., 2021).

Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang memiliki fasilitas yang sangat memadai. Kota ini dilengkapi dengan pelabuhan, fasilitas pendidikan, kesehatan, pusat perbelanjaan, dan kawasan bisnis. Selain menjadi pusat perdagangan, Semarang juga berkembang sebagai kota layanan pariwisata. Oleh karena itu, semakin banyak hotel yang dibangun di Semarang untuk menampung para wisatawan. Perkembangan sebagai kota layanan tersebut didukung oleh sarana transportasi udara melalui Bandara Ahmad Yani yang telah ditingkatkan statusnya menjadi Bandara Internasional, serta sarana transportasi darat seperti Kereta Api (KAI) dan bus dengan berbagai tujuan. (Sumastuti et al., 2021) :

### **1. Wisata religi**

Yang ada di Kota Semarang relatif lengkap untuk 5 agama (Islam, Nasrani, Buda, Hindu dan kong hu cu), yaitu :

- a. Masjid Agung Jawa Tengah, yang terletak di Jalan Gajah Raya, adalah sebuah masjid dengan kapasitas jamaah yang besar. Fasilitas yang disediakan oleh Masjid Agung Jawa Tengah mencakup perpustakaan, auditorium, convention hall, hotel, ruang kantor, tempat parkir yang luas, dan juga area khusus untuk berbelanja. Masjid ini juga memiliki menara setinggi 99 meter yang memungkinkan pengunjung untuk menikmati pemandangan Kota Semarang dari ketinggian, melihat ke segala penjuru. Pengembangan pariwisata Kota Semarang juga telah memanfaatkan fasilitas ini.
- b. Gereja Blenduk, adalah sebuah gereja yang merupakan peninggalan Belanda dan merupakan gereja pertama yang dibangun di Kota Semarang. Nama "Blenduk" berasal dari bahasa Jawa yang merujuk pada bentuk kubahnya yang menyerupai irisan bola. Oleh karena itu, gereja ini diberi nama "Mblenduk". Lokasi gereja ini terletak di Kota Lama.
- c. Gedong Batu, yang juga dikenal sebagai Sam Po Kong, adalah sebuah candi yang dibangun oleh utusan Cina bernama Sam Po Kong selama perjalanannya menuju Semarang. Candi ini merupakan tempat persinggahan yang penting dalam perjalanan menuju negara-negara Asia lainnya. Gedong Batu memiliki gaya arsitektur yang unik dengan ornamen Cina yang sangat kental dan atap yang mirip dengan gaya joglo. Kombinasi ini menjadikan gedung ini sebagai tempat yang menarik untuk dikunjungi.
- d. Vihara Avalokitesvara, merupakan sebuah obyek wisata yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan, Watugong. Pada obyek wisata ini, terdapat sebuah bangunan pagoda yang terdiri dari tujuh tingkat, dengan empat patung yang menghadap ke segala penjuru mata angin di setiap tingkatnya. Salah satu keunikan dari Vihara Avalokitesvara adalah bahwa seluruh aksesoris pelengkap bangunannya, seperti relief, patung lampu naga, dan genteng, semuanya didatangkan langsung dari Cina.
- e. Pura Agung Giri Natha, terletak di Jalan Sumbing, merupakan sebuah bangunan yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas, termasuk sekretariat dan ruang kelas untuk pendalaman Agama Hindu.

## **2. Wisata Sejarah**

- a. Tugu Muda adalah sebuah tugu yang memiliki bentuk seperti lilin dengan penampang segi lima. Tugu ini terdiri dari tiga bagian, yaitu landasan, badan, dan kepala. Pada setiap sisi landasan tugu, terdapat relief yang menghiasi. Seluruh tugu ini dibuat dari batu. Tugu Muda terletak di sekitar area yang juga mencakup Lawang Sewu, Rumah Dinas Gubernur Jawa Tengah, Museum Mandala Bakti, dan Katedral.
- b. Lawang Sewu berlokasi di kompleks Tugu Muda dan dulunya adalah sebuah gedung megah yang digunakan oleh Belanda sebagai kantor pusat kereta api, dikenal dengan sebutan *Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappij* (NIS). Di masyarakat Semarang, gedung ini lebih dikenal dengan nama Gedung Lawang Sewu. Nama tersebut berasal dari jumlah pintu yang sangat banyak di gedung ini, dalam artian kiasan, "banyak" di sini merujuk pada jumlah yang sangat besar, yakni seribu pintu atau lebih. Dalam bahasa Jawa, "Lawang Sewu" memiliki arti seribu pintu.
- c. Kota Lama, sejak masa penjajahan Belanda, Kota Lama Semarang telah menjadi wilayah pesisir yang strategis sebagai pusat perdagangan. Bangunan-bangunan tua peninggalan Belanda masih berdiri kokoh hingga saat ini, dengan beberapa di antaranya difungsikan sebagai hotel, rumah tinggal, dan kantor perusahaan. Jumlah bangunan tua tersebut cukup banyak sehingga area ini dikenal sebagai kawasan Kota Lama. Beberapa contoh bangunan penting di sana adalah Gereja Blenduk, Stasiun Kereta Api Tawang, Gereja Gedangan, Taman Sri Gunting, Marabunta, dan De Spiegel. Kawasan Kota Lama telah direvitalisasi dan dijadikan kawasan cagar budaya. Untuk mengatasi masalah banjir dan rob air laut, Pemerintah Kota Semarang telah membangun kolam retensi Tawang yang berfungsi sebagai polder pengendali banjir.

## **3. Wisata Seni dan Budaya (Tradisi)**

- a. Dugderan, sejarah tradisi dugderan bermula dari perbedaan pendapat yang sering terjadi dalam menentukan awal bulan Ramadhan, yang ditandai dengan bunyi bedug dan meriam tiga kali di Masjid Agung dan halaman kabupaten masing-masing. Upacara ini mulai menarik perhatian masyarakat sekitar dan juga minat para pengusaha dari berbagai daerah. Mereka menjual beragam

makanan, minuman, dan mainan anak-anak, termasuk mainan dari tanah liat (gerabah), mainan bambu (seperti seruling dan gangsingan), serta mainan kertas berbentuk hewan berkaki empat yang menyerupai kepala kambing dan naga. Mainan tersebut dikenal sebagai warak ngendog. Seiring berjalannya waktu, warak ngendog menjadi simbol ikonik Kota Semarang dan juga menjadi bagian dari tradisi dugderan.

- b. Gubug Rembug, sanggar Seni yang terletak di Desa Kandri, Kecamatan Gunung Pati, memiliki tujuan untuk meningkatkan karakter anak muda melalui seni dan budaya Jawa. Di sanggar ini, berbagai jenis kesenian Jawa diajarkan, termasuk tari dan musik tradisional, geguritan, dan mocapat. Pendirian sanggar ini dilakukan sekitar tahun 2012 dengan tujuan mendidik dan membimbing pemuda desa agar mencintai kebudayaan Jawa, terutama di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat dan membuat anak muda kehilangan pemahaman akan sopan santun.
- c. Semarang Night Carnival. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun, Semarang Night Carnival yang diadakan secara rutin setiap tahun. Acara yang digelar sejak 2010 dan masih menjadi rutinitas sehari-hari di Semarang hingga saat ini. Di Semarang Night Carnival biasanya terdapat berbagai pertunjukan untuk menonjolkan budaya kota. Wisata malam Semarang ini biasanya menampilkan tiga gaya budaya, yaitu Jawa, Arab dan Cina. Hal ini dikarenakan Semarang didominasi oleh tiga etnis tersebut. Tak hanya itu, Semarang Night Carnival juga mengundang negara-negara tetangga untuk tampil. Beberapa negara yang aktif, antara lain Korea Selatan, Malaysia, Sri Lanka, Thailand dan Taiwan.
- d. Apitan (Sedekah Bumi), tradisi ini merupakan ekspresi rasa terima kasih masyarakat kepada Tuhan atas keselamatan, berkah, dan rezeki yang melimpah. Ritual Apitan atau sedekah bumi telah menjadi bagian yang kuat dalam budaya masyarakat di Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajahmungkur. Kegiatan ini diadakan secara rutin setiap kali menjelang dua perayaan besar, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Tradisi ini menarik perhatian karena selalu disertai dengan arak-arakan atau karnaval yang melibatkan warga setempat.

#### **4. Wisata Hiburan dan Kuliner**

- a. Puri Maerokoco, objek wisata ini terletak di dalam kompleks gedung PRPP Tawangmas dan difungsikan sebagai taman mini Jawa Tengah yang mencakup seluruh rumah adat dari 35 daerah dan kota di Jawa Tengah. Di dalam rumah-rumah adat ini, pengunjung dapat melihat industri dan kerajinan tangan yang diproduksi di setiap daerah tersebut. Selain memamerkan rumah adat, tempat ini juga dilengkapi dengan fasilitas rekreasi air seperti sepeda air, perahu, dan kereta api yang dapat digunakan oleh wisatawan.
- b. Pantai Marina terletak di Jalan Arteri Yos Sudarso, berdekatan dengan kawasan PRPP dan Puri Maerokoco. Pantai Marina merupakan destinasi rekreasi yang menyediakan fasilitas lengkap seperti kolam renang, persewaan perahu, dan area bermain anak-anak. Selain itu, pantai ini juga menawarkan pemandangan indah laut.
- c. Waduk Jatibarang, memiliki ukuran yang sangat luas, mencakup luas perairan sebesar 189 hektar. Airnya jernih, dan wisatawan dapat menjelajahi danau besar ini menggunakan perahu. Sambil mengelilingi waduk, mereka dapat menikmati pemandangan alam perbukitan yang memukau.
- d. Taman Margasatwa Wonosari Mangkang, sebelumnya dikenal sebagai Kebun Binatang Tinjomoyo, merupakan lokasi baru bagi kebun binatang tersebut. Tempat rekreasi ini terletak di pintu masuk Kota Semarang dari arah barat, tepatnya di perbatasan Mangkang-Kaliwungu.
- e. Taman Budaya Raden Saleh, setelah kebun binatang dipindahkan ke Wonosari Mangkang, tempat yang sebelumnya merupakan Taman Hiburan Rakyat di Semarang kini telah bertransformasi menjadi Taman Budaya Raden Saleh yang menjadi pusat kegiatan seni dan budaya di Kota Semarang. Tempat ini sering digunakan untuk pertunjukan kesenian, terutama pertunjukan wayang.
- f. Pusat oleh-oleh yang berlokasi di Jl. Pandanaran merupakan daerah yang sangat strategis. Di sepanjang jalan tersebut bisa menemukan bermacam makanan khas Semarang, antara lain bandeng presto, lunpia, wingko babat, tahu petis dan kue moci.

## 5. Desa/Kampung Wisata

- a. Taman Lele merupakan Kampung Wisata taman rekreasi yang berada di daerah Kecamatan Tugu merupakan taman reptil dengan dilengkapi fasilitas arena permainan anak-anak, panggung hiburan dan rumah makan.
- b. Kampung Pelangi Wonosari terletak di kelurahan Randusari Kecamatan Semarang Selatan. Kampung wisata yang dibuat atas inisiasi Pemkot Semarang 2017. Bangunannya diserasikan dengan jalan dan batu-batuan yang berwarna-warni ikut meramaikan daya tarik kampung tersebut. Wisata ini disebut sebagai desa wisata berbasis kebersihan di Kota Semarang. Selain itu, Kampung sudah tersebar luas di sosial media, seperti *facebook*, *twitter*, *BBM*, dan *instagram*. Terdapat dukungan akses kios bunga di depan kampung, transportasi yang mudah karena di tengah kota dan masyarakatnya yang ikut berdagang (DLH Semarang, 2020).
- c. Desa Wisata Kandri, yang terletak di Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah, menawarkan potensi alam dan budaya yang menarik. Desa ini menyediakan paket wisata bagi rombongan siswa mulai dari pra sekolah hingga tingkat sekolah dasar, menengah pertama, dan menengah atas yang ingin menikmati obyek ekowisata dan eduwisata. Paket wisata tersebut mencakup fasilitas camping ground, jelajah desa, river tubing, area memancing, dan sanggar omah alas. Selain itu, potensi budaya di desa ini juga dirayakan melalui berbagai acara tahunan seperti kirab Budaya sesaji rewanda, mahakarya legenda Goa Kreo, nyadran desa, nyadran kubur, nyadran Kali Barikan, dan sedekah waduk. Makanan khas yang dapat dinikmati di Desa Wisata Kandri adalah sego kethek.
- d. Desa Wisata Wonolopo terkenal sebagai destinasi wisata yang khususnya terkait dengan jamu. Pengunjung dapat mencoba membuat jamu di sana. Selain itu, Desa Wonolopo juga menawarkan daya tarik lain seperti kebun durian, kerajinan kedebok pisang, pembuatan sapu ijuk, dan budidaya jamur. Wisatawan dapat mengunjungi desa ini untuk merasakan pengalaman kehidupan masyarakat yang masih menjalankan tradisi-tradisi.
- e. Desa Wisata Jatirejo terletak di Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah. Daya tarik Desa Wisata Jatirejo adalah melihat proses

pengolahan kolang-kaling. Wisatawan juga dapat belajar dan ikut serta membuat kolang kaling secara langsung. Hingga saat ini, ada sekitar 20 pengrajin kolang-kaling yang masih bertahan dengan proses, tradisional (Kompas, 2023).

### C. Profil Kelurahan Randusari

#### 1. Kondisi Geografis

Wilayah penelitian terletak di Kelurahan Randusari, yang terletak di pusat kota dan memiliki dataran luas sebesar 66,95 hektar. Kelurahan Randusari memiliki Pemakaman Bergota, pemakaman umum terbesar di Kota Semarang, yang melayani berbagai lapisan masyarakat, termasuk prajurit pada masa penjajahan Belanda serta para bupati Kota Semarang dan sekitarnya. Untuk mencapai wilayah Randusari, terdapat beberapa pilihan transportasi yang dapat digunakan, seperti *Bus Rapid Trans* (BRT) atau Trans Semarang, taksi, angkutan umum, dan transportasi online. Sarana transportasi ini memudahkan penduduk dalam bergerak dari Randusari ke pusat kota.

Berikut adalah batas-batas wilayah Kelurahan Randusari.

- Sebelah Barat : **Kelurahan Barusari**
- Sebelah Utara : **Kelurahan Pekunden**
- Sebelah Timur : **Kelurahan Mugassari**
- Sebelah Selatan : **Kelurahan Bendungan**

#### 2. Kondisi Penduduk kelurahan Randusari

Berdasarkan data Kelurahan Randusari mengenai jumlah penduduk pada Maret 2023 sebagai berikut :

**Tabel 2. Kependudukan Kelurahan Randusari**

NO	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	465	499	964
2	5-9	308	329	637
3	10-14	358	359	717
4	15-19	353	358	711
5	20-24	334	358	692
6	25-29	271	256	527
7	30-34	285	322	607
8	35-39	295	328	623
9	40-44	218	222	440

NO	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
10	45-49	164	176	340
11	50-54	136	150	286
12	55-59	140	126	266
13	60-64	148	136	284
14	65+	201	156	357
Jumlah		3676	3775	7451

Sumber : Kelurahan Ramdusari

**Tabel 3. Penduduk menurut Mata Pencaharian Bagi Umur 16<sup>th</sup> Keatas**

No	Jenis Pekerjaan	Banyaknya orang
1	Karyawan	1039
2	Wiraswasta	11
3	Petani	0
4	Pertukangan	15
5	Buruh	740
6	Pensiun	127
7	Nelayan	0
8	Pemulung	0
9	Jasa	2762
Jumlah		4694

Sumber : Kelurahan Randusari

**Tabel 4. Penduduk Menurut Pendidikan Bagi Umur 5<sup>th</sup> Keatas**

NO	Jenis Pendidikan	Banyaknya Orang
1	Perguruan Tinggi	462
2	Tamat Akademi	418
3	Tamat SLTA	1371
4	Tamat SLTP	887
5	Tamat SD	1155
6	Tidak Tamat SD	210
7	Belum Tamat SD	1268
8	Tidak Sekolah	449
Jumlah		6220

Sumber : Kelurahan Randusari

**Tabel 5. Penduduk Menurut Kepemelukan Agama**

No	Jenis Agama	Jumlah Pemeluk
1	Islam	6344
2	Kristen Katolik	724
3	Kristen Protestan	376
4	Budha	5
5	Hindu	2
Jumlah		7451

Sumber : Kelurahan Randusari

Apabila melihat dari data di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk di Kelurahan Randusari bekerja di sektor jasa. Hal ini terkait dengan upaya dari instansi terkait, yang memberikan pelatihan khusus untuk harapannya meningkatkan kreativitas penduduk agar dapat menghasilkan penuntunan. Selain itu, masyarakat juga memiliki inisiatif sendiri dalam mengembangkan kreativitas mereka untuk menghasilkan penghasilan. Pembentukan Kampung Pelangi di Kampung Pelangi merupakan langkah untuk meningkatkan taraf hidup penduduk Kelurahan Randusari yang telah mengalami peningkatan, terutama berkat penjualan pernak-pernik Kampung Pelangi oleh para ibu di kelurahan tersebut. Selain itu, Kelurahan Randusari juga terkenal sebagai daerah dengan penjualan bunga yang cukup besar di pusat kota Semarang.

Kelurahan Randusari terdiri dari 7 RW dan 52 RT, dan lokasi kampung pelangi berada di RW 03 dan RW 04. Kelurahan Randusari, banyak berdiri pertokoan bunga yang berada berdampingan dengan Kampung Pelangi. Hal ini pun didukung oleh pemerintah kota Semarang, guna mendukung suatu Kawasan yang berwarna dari wilayah Kampung Wonosari yang awalnya terkesan kumuh, menjadi suatu perkampungan yang berwarna dan memiliki nilai wisata yang tinggi. Berdasarkan data tabel tersebut, meskipun penduduk Kelurahan Randusari memiliki keberagaman agama dan kepercayaan, mereka mampu hidup berdampingan, harmonis, dan saling mendukung. Hal ini terlihat dari kehidupan keagamaan para penduduk serta adanya berbagai kegiatan keagamaan yang berjalan tanpa hambatan atau konflik antar sesama maupun antara agama dan kepercayaan yang berbeda.

## D. Profil Kampung Pelangi

### 1. Sejarah Kampung Pelangi

**Gambar 3. Peta Administrasi Kampung Pelangi**



Sumber: Bappeda Kota Semarang

Sebelum menjadi Kampung Pelangi, wilayah ini terletak di Semarang Selatan dan dikenal sebagai Kampung Gunung Brintik. Kampung Gunung Brintik terletak di belakang Pasar Bunga Kalisari. Pada awalnya, Pemerintah Kota Semarang melakukan renovasi pada Pasar Bunga Kalisari yang terletak di pinggir jalan agar tampil lebih teratur. Namun, kondisi Kampung Gunung Brintik yang berada di sebelah sungai dan berhimpitan dengan Pasar Bunga Kalisari terlihat kurang terawat dan kumuh. Setelah pasar bunga direnovasi dan tampak lebih bersih serta mewakili, Pemerintah memperhatikan bahwa kondisi kampung di belakangnya, yaitu Kampung Gunung Brintik, tidak sepenuhnya mendukung keindahan pasar bunga. Oleh karena itu, Pemerintah memutuskan untuk merenovasi kampung tersebut dengan melukisnya menggunakan cat warna-warni.

Pasar Bunga Kalisari merupakan titik awal dari pembangunan Kampung Pelangi yang diinisiasi oleh pemerintah Kota Semarang. Tujuannya adalah untuk mengubah wilayah Kampung Wonosari yang sebelumnya terlihat kumuh menjadi sebuah perkampungan yang berwarna-warni dan memiliki nilai wisata yang tinggi. Pada tahun 2017, dimulailah proyek pembangunan kampung wisata yang dimulai melalui perhatian besar dari Pemerintah Kota Semarang, terutama dari Walikota

Semarang, Bapak Hendrar Prihadi S.E M.M. Walikota memiliki harapan besar bahwa pembangunan kampung ini akan memberikan kemajuan bagi kampung tersebut serta meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Melalui penggunaan warna-warna cerah yang mencolok, Kampung Gunung Brintik dari perkampungan kumuh berubah menjadi Kampung Pelangi dan dijadikan sebagai salah satu tujuan wisata yang populer di Kota Semarang. Setelah diresmikan sebagai destinasi wisata yang viral, Pemerintah Kota Semarang memberikan pelatihan dan bimbingan kepada warga Kampung Pelangi bekerja sama dengan berbagai dinas terkait, dengan tujuan agar mereka siap menerima pengunjung wisata dengan ramah dan menjaga pengalaman wisata yang baik. Sejumlah kegiatan pelatihan dan sosialisasi dilakukan untuk mempersiapkan Kampung Pelangi agar semakin siap dan berkembang. Salah satu langkah inovatif yang diambil adalah pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang secara resmi disahkan pada tahun 2017 melalui Surat Keputusan (SK) dari Dinas Pariwisata sebagai bagian dari Pemerintah Kota Semarang.

Kampung Pelangi yang secara khusus bernaung di 2 lokasi yaitu RW 3 terdiri dari 10 RT dan RW 4 terdiri dari 9 RT. Kampung Pelangi berlokasi di pusat Kota Semarang, dekat dengan Tugu Muda dan berada di sisi timur Jalan Dr. Sutomo. Permukiman di Kampung Pelangi tumbuh secara alami dengan penyesuaian terhadap kondisi topografi, sehingga pola penempatan rumah membentuk terasiring yang mengikuti kontur dari tepi sungai Kali Semarang ke arah timur hingga ke makam Bergota. Kampung Pelangi merupakan permukiman dengan tingkat kepadatan yang tinggi. Rumah-rumah saling berdekatan dan terletak bersebelahan, hal ini disebabkan oleh peningkatan permintaan akan perumahan yang sementara itu lahan yang tersedia terbatas, ditambah lagi dengan kesulitan dalam pengaturan penempatan perumahan akibat kondisi topografi yang rumit.

Konsep Kampung Pelangi yang memiliki motif warna-warni dan menciptakan kesan yang unik sangat cocok sebagai lokasi untuk swafoto. Sejak tahap awal pengecatan, banyak penduduk Semarang dan sekitarnya yang tertarik untuk melihat perubahan yang terjadi di Kampung Pelangi, dan beberapa wisatawan juga mengambil foto-foto selama mereka berada di sana. Banyak foto hasil tersebut yang diunggah ke berbagai media sosial, sehingga informasi mengenai perubahan Kampung Pelangi semakin tersebar luas. Antusiasme wisatawan terhadap Kampung

Pelangi yang indah terus meningkat, terutama pada akhir pekan. Melihat tingginya minat wisatawan, penting bagi Pemerintah dan penduduk kampung Wonosari untuk melakukan inovasi dan peningkatan kreativitas dengan membangun fasilitas pendukung yang sesuai dengan konsep Kampung Wisata.

Walikota Semarang Hendrar Prihadi, S.E, M.M memulai pencaanaan Kampung Pelangi Kota Semarang dan mendorong untuk dikembangkan dengan tujuan:

- a. Untuk meningkatkan makna fisik kawasan dengan pengecatan bangunan dan lingkungan sehingga dapat membentuk keharmonisan, keserasian lingkungan dan keindahan kota.
- b. Untuk mewujudkan wisata “waterfront city” yang terintegrasi dengan keberadaan kawasan Tugumuda dan Lawangsewu sehingga meningkatkan nilai ekonomis kawasan Pembangunan Kampung Pelangi sebenarnya merupakan kelanjutan dari pembangunan Pasar Bunga Kalisari yang tepat berada di depan Kampung Wonosari (Kampung Pelangi).

Program pembangunan Kampung Pelangi terdiri dari beberapa program, yang dibagi menjadi program fisik dan non-fisik. Program fisik yang dilakukan di Kampung Pelangi mencakup pembangunan 8 gapura yang sesuai dengan jumlah gang di kampung tersebut. Gapura-gamura tersebut berfungsi sebagai pintu masuk ke wilayah Kampung Pelangi melalui gang-gang yang berbeda. Selain itu, revitalisasi jembatan di setiap gang dan pembenahan Kali Semarang juga dilakukan. Proses revitalisasi ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat, seperti pengecatan talud sepanjang gang 1 hingga 8 untuk memberikan tampilan yang indah. Revitalisasi Kali Semarang diperlukan karena kondisi Kali Semarang di wilayah Kampung Pelangi kurang terawat. Setelah dilakukan revitalisasi, Kali Semarang menjadi indah dan menarik bagi penduduk Kampung Wonosari dan masyarakat sekitarnya, bahkan mereka mulai memancing di Kali tersebut. Pemerintah Kota Semarang, termasuk Walikota Hendrar Priadi, mendukung inisiatif ini dan pada tanggal 17 Agustus bersama Pokdarwis Kampung Pelangi, mereka mengadakan Lomba Memancing di Kali Semarang. Selain itu, pembangunan lainnya yang sedang dilakukan mencakup Gardu Pandang, Baliho dengan tulisan "Kampoeng Pelangi", serta peningkatan fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) yang masih dirasa kurang.

Kampung Pelangi dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Bagian Utara : SMP Dominico Savio
- b. Bagian Timur : Pemakaman Umum Bergota
- c. Bagian Selatan : Rumah Sakit Dr. Kariadi
- d. Bagian Barat : Jalan Raya Doktor Sutomo Lokasi Kampung pelangi sendiri terletak di Jalan Doktor Sutomo No.89 Kelurahan Randusari, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah.

## 2. Kondisi Demografis

**Tabel 6. Kependudukan Masyarakat Kampung Pelangi Berdasarkan Usia**

NO	Usia Penduduk	RW 3		RW 4	
		L	P	L	P
1	0-5	73	61	28	29
2	6-10	69	69	30	32
3	11-15	67	69	23	36
4	16-20	50	51	40	36
5	21-25	64	36	28	36
6	26-30	57	48	23	18
7	31-35	57	48	30	31
8	36-40	52	64	28	35
9	41-45	48	49	41	41
10	46-50	39	49	32	44
11	51-55	47	50	33	29
12	56-60	38	48	18	26
13	61+	46	56	49	65
	Jumlah	707	698	403	458
	Jumlah Penduduk	1.405		861	

Sumber : Bappeda Kota Semarang

Berdasarkan data yang diambil dari profil Kampung Pelangi, Jumlah penduduk di kawasan Kampung Pelangi Kota Semarang adalah 2.266 jiwa yang terdiri dari 1.405 jiwa di RW 3 dan 861 jiwa di RW 4. Berdasarkan jumlah penduduk usia, usia penduduk yang mendominasi di Kampung Pelangi RW 3 adalah penduduk dengan usia 0-15 Tahun, sedangkan jumlah penduduk di RW 4 didominasi oleh penduduk dengan usia 36-61 tahun keatas.

**Tabel 7. Kependudukan Kampung Pelangi Melalui Jenis Pekerjaan**

No	Jenis Pekerjaan	RW 3	RW 4	Jumlah
1	Pedagang Kelontong	39	24	63
2	Pedagang Bunga	53	18	71
3	Pegawai Swasta	347	144	491
4	Pegawai Negeri	17	25	42
5	Pengrajin Bunga Kertas	10	0	10
6	Pedagang Makanan minuman	13	0	13
7	Penjahit	2	0	2
8	Penjual sayuran	2	0	2
9	Olahan Makanan	4	0	4
10	Pengrajin Pita Gabus	1	0	1
11	Guru	27	0	27
12	Lain-Lain	128	55	183
	Jumlah	643	266	909

Sumber : Bappeda Kota Semarang

Berdasarkan data tabel di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk Kampung Pelangi bekerja di sektor pariwisata, dengan jumlah mencapai 491 orang. Mayoritas dari mereka bekerja secara serabutan atau tidak memiliki pekerjaan yang tetap, hal ini juga berkaitan dengan tingkat pendidikan yang masih rendah di kalangan penduduk Kampung Pelangi. Selain itu, profesi lain yang ada di Kampung Pelangi adalah pedagang bunga, terkait dengan adanya Pasar Bunga Kalisari yang berlokasi di depan pemukiman Kampung Pelangi. Hal ini juga memberikan peluang kerja bagi masyarakat setempat. Selain itu, terdapat sekitar 13 orang yang berprofesi sebagai pedagang warung klontong atau memiliki usaha mandiri di Kampung Pelangi. Upaya terus dilakukan untuk meningkatkan jumlah ini, karena salah satu tujuan pembangunan Kampung Pelangi oleh Pemerintah Kota Semarang adalah untuk meningkatkan ekonomi dan kualitas hidup penduduk Kampung Pelangi, serta menjadikannya sebagai contoh pengentasan pemukiman dengan pembangunan berkelanjutan sebagai kampung wisata di Semarang.

### **3. Struktur Kelembagaan di Kampung Pelangi**

Susunan Pengurus Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kampung Pelangi :

- a. Pembina : Camat Semarang Selatan
- b. Penasehat : 1. Lurah Randusari  
2. Sukaimi

- 3. Drs. Erwin Sumarah
- c. Ketua : Yosep Tri Prawoko
- d. Wakil Ketua : 1. Kristiawan  
2. Agus Riyanto
- e. Sekertaris : Siswoyo
- f. Wakil Sekertaris : Meita Agustin Nurdiana
- g. Bendahara : Sulmiyati
- h. Wakil Bendahara : Tri Widiati
- i. Sie Keamanan dan Ketertiban : 1. Ketua Limnas RW 3  
1. Ketua Limnas RW 4
- j. Sie Kebersihan dan Keindahan : 1. Eko Setiawan  
1. Khodirin
- k. Sie Daya Tarik Wisata dan Kreatif : 1. Donny  
1. Yatman  
2. Agus S.  
3. Jarot  
4. Gatot  
5. Farida
- l. Sie IT : 1. Doni Sepiya Sukmana  
2. M. Habibullah Yudi Tama  
3. Erwin
- m. Sie Pengembangan Usaha : 1. Maryati  
2. Mardiyah
- n. Sie Pemberdayaan Wanita : 1. Sri Handini  
1. Arvi Maryuti  
2. Aminah
- o. Sie Humas dan Pengembangan SDM : 1. Andhi Iriyanto  
2. Joko Mulyono  
3. Raharjo  
4. Bugi  
5. Supriyanto  
6. Hardiyono

7. Parjono
8. Wahyudi
9. Riyanto

#### Tugas dan Fungsi

- a. Pembina : Pengesahan tempat diadakannya kampung wisata dan menggerakkan masyarakat bersama para pendamping salah satunya Dinas Parriwisata.
- b. Penasehat : Sebagai jalan tengah ketika ada permasalahan internal Pokdarwis
- c. Ketua Umum : Tugasnya meliputi pengawasan dan pengaturan semua kegiatan yang dilakukan baik di dalam maupun di luar Pokdarwis dan Kampung Pelangi, serta melakukan koordinasi dengan Pembina, Penasehat, Pendamping, dan pelindung.
- d. Wakil Ketua : Membantu Ketua Umum dalam menjalankan tugasnya.
- e. Sekretaris : Bertugas mengurus segala kebutuhan yang berkaitan dengan administrasi.
- f. Wakil Sekertaris : membantu sekertaris dengan segala kebutuhan yang berkaitan dengan administrasi
- g. Bendahara : Bertugas mengurus dan mengontrol keungan Pokdarwis demi keberlangsungan Pokdarwis dan Kampung Pelangi.
- h. Wakil Bendahara : Membantu bendahara utama mengurus dan mengontrol keungan Pokdarwis demi keberlangsungan Pokdarwis dan Kampung Pelangi.
- i. Sie Keamanan dan Ketertiban : Bertugas untuk menjaga dan mengatur ketertiban di Kampung Pelangi.
- j. Sie Kebersihan dan Keindahan : Bertugas untuk menjaga dan mengatur lingkungan agar tetap bersih dan indah demi kenyamanan wisatawan.
- k. Sie Daya Tarik Wisata dan Kreatif : Bertugas untuk mengembangkan wisata di Kampung Pelangi Semarang dan mengembangkan kreatifitas warga untuk mengisi kegiatan di Kampung Pelangi sehingga wisatawan tertarik untuk berkunjung.
- l. Sie IT : Bertugas sebagai tim kreativ di bidang sosial media yamng berisi anak-anak muda dalam mempromosikan Kmapung Pelangi secara menarik dan inovatif.

- m. Sie Pengembangan Usaha : Bertugas untuk menggali, mengatur dan melaksanakan usaha atau wirausaha di Kampung Pelangi dalam rangka peningkatan ekonomi di Kampung Pelangi Semarang.
- n. Sie Pemberdayaan Wanita : Bertugas untuk Bertugas untuk mengatur, mengembangkan maupun mengadakan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan kepariwisataan. Ditujukan untuk wanita yang ada di Kampung Pelangi seperti kegiatan keterampilan dan sebagainya.
- o. Sie Humas dan Perkembangan SDM : Bertugas sebagai perantara yaitu memberikan informasi kepada warga terkait perkembangan Kampung Pelangi dan mengadakan kegiatan pelatihan dalam rangka peningkatan SDM seperti kegiatan *Forum Group Discussion dan Guidance*.

## BAB IV

### PROSES IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN KAMPUNG PELANGI

#### **A. Identifikasi Kebijakan dan Program Pengembangan Kampung Pelangi**

Pembangunan Kampung Pelangi lahir dari kelanjutan pembangunan Pasar Bunga Kalisari yang tepat berada di depan Kampung Gunung Brintik yang saat ini telah dikenal Kampung Pelangi. Setelah perbaikan pasar bunga selesai pada Desember 2016, keindahan pasar ternyata belum sesuai harapan. Hal ini dikarenakan pemukiman Kampung Gunung Brintik yang berada dibelakang Pasar Bunga Kalisari merupakan kawasan kumuh dan kurang indah dipandang. Sehingga perencanaan pembangunan Kampung Gunung Brintik dibelakang pasar bunga direncanakan oleh Pak Hendi mantan Walikota Semarang sekaligus sebagai pengentasan pemukiman kumuh atas jawaban kebijakan KOTAKU dan keberlangsungannya dijadikan Kampung Wisata Pelangi melalui SK Pokdarwis. Ketika ada inisiasi tersebut menurut penuturan Bu Handini, Pemerintah Kota Semarang sudah melakukan diskusi terlebih dahulu terhadap perangkat Kampung dan disepakati bersama. Sesuai dengan penuturan Pokdarwis :

*“Waktu Pasar Bunga sudah jadi, memang dari jauh itu kan pemukiman yang dibelakangnya kelihatan dari jalan, soalnya kan struktur tanahnya seperti perbukitan. Dan dari jauh memang terlihat kumuh, karena kan banyak juga warga yang rumahnya belum dicat, hanya tembok-tembok semen, ada juga yang masih papan kayu dan sampah disekitar sungai itu banyak, akhirnya Pak Hendi pasa saat itu masuk kampung melihat-lihat dan akhirnya berbicara ke Pak Lurah, para perangkat kampung seperti Ketua RW dan Ketua RT serta menggerakkan dinas-dinas terkait untuk pembenahan kampung” (Handini, 2023).*

Penuturan tersebut didukung oleh kepala divisi kelembagaan Dinas Pariwisata:

*“Memang rencana awal hanya renovasi pasar bunga kalisari berurusannya dengan dinas perdagangan, tapi dari bawah Pak Hendi yang saat itu masih menjadi walikota Semarang melihat pemukiman dibelakangnya terlihat kuirang cantik. Akhirnya dibicarakan dengan perangkat lurah untuk disepakati pembenahan sebagai pengurangan pemukiman kumuh dan memang di adaptasi dari inspirasi perubahan pemukiman-pemukiman kumuh menjadi kampung pelangi yang ada di kota-kota lain seperti Malang dan Surabaya juga. Lalu dinas-dinas digerakkan untuk membantu pembenahan kampung. Anggaran juga dari pemerintah kota sekitar 3 Milyar untuk merubah jadi Kampung Pelangi” (Taufiq,2023).*

Perencanaan pembangunan kampung wisata buatan tersebut pada 2017 yang mulanya diinisiasi oleh Pemerintah Kota Semarang yaitu Pak Hendi dilatarbelakangi sebagai implementasi Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah 2015-2019 mensyaratkan pembangunan dan pertumbuhan kawasan perkotaan dengan meningkatkan kualitas pemukiman. Untuk mendukung implementasi tersebut, Dirjen Cipta Kerja mencanangkan program kebijakan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang jawaban dari isu pemukiman kumuh tersebut adalah pembangunan Kampung Wisata Pelangi. Pada aspek tujuannya program KOTAKU yaitu pengentasan pemukiman kumuh, menghentikan pemukiman kumuh baru dan mendorong pembangunan berkelanjutan sesuai dengan sasaran yang diharapkan Pemerintah dimaksudkan untuk mengentaskan pemukiman kumuh dan memaksimalkan potensi lokal melalui pembangunan wisata berkelanjutan.

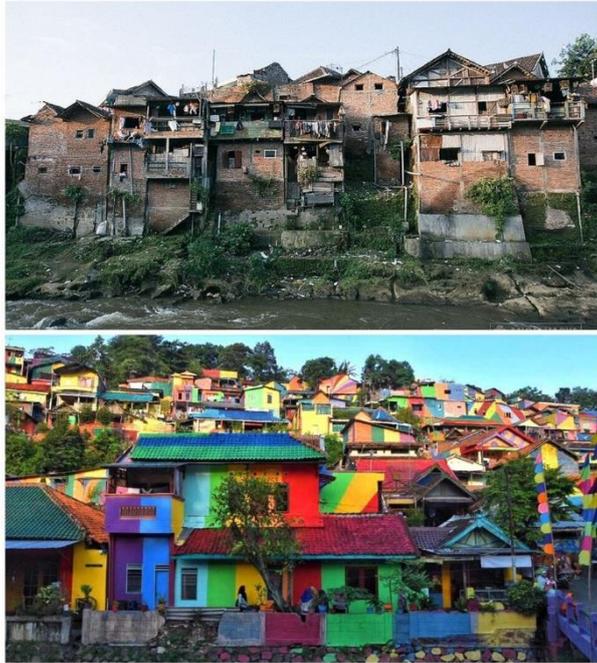
Kampung Gunung Brintik sebagai sasaran pemukiman kumuh pada dasarnya juga sesuai pada indikator pemukiman kumuh. Indikator pemukiman kumuh mengacu pada indikator rumah sehat dan layak huni sesuai standar kesehatan, kualitas bangunan tempat tinggal di Kota Semarang dengan identifikasi luas lantai kurang 50 m<sup>2</sup>, Lantai bukan tanah, Atap bangunan menggunakan beton, genteng, asbes, seng, dan lainnya, Penggunaan dinding tembok yang terbagi menjadi kayu, anyaman bambu, tembok, dan lainnya, Penerangan listrik, Air minum yang digunakan, Jamban sendiri dengan Tanki Septik. Pemenuhan indikator rumah sehat di Kampung Gunung Brintik memang masih jauh dari standart tersebut. Pernyataan ini didukung oleh penuturan Bu Handini

*“Rumah-rumah disini emang sebelumnya terlihat kumuh mba, karena ada yang dindingnya masih seng, masih rumah dari anyaman juga ada. Lantai juga belum bagus, masih beberapa saja. Air bersih juga baru PDAM itu 2015. Rumahnya kan juga sangat berhimpit dan jalannya terjal ya mba dan jalanan diatas dulu itu sangat kurang penerangannya. Terus akhirnya pemerintah mau merenovasi masyarakat sangat senang.” (Handini,2023).*

Pada tanggal 15 April 2017 dilakukan program pengecatan massal sekaligus peresmian Kampung Pelangi bersama dengan perangkat Kampung Gunung Brintik, Walikota, Polres Semarang dan lainnya. Perusahaan cat juga pada saat itu ikut menyumbangkan produk mereka untuk mendukung transformasi kampung. Menurut penuturan Pak Woko selaku ketua pokdarwis, tenaga dalam pengecatan selain dari pemerintah, para masyarakat Kampung Pelangi RW 3 dan RW 4 bergotong royong ikut melakukan pengecatan. Melalui pernyataan berikut

*“Warga saat itu sangat senang, karena kampungnya mau dibenahi. Pada saat mendengar kabar tersebut mereka juga pada ikut mengecat bersama tenaga-tenaga yang diberikan dari pemerintah. Pemukiman ini kan juga tebing-tebing jadi cukup susah untuk meratakan catnya, tapi karena antusiasnya warga semangat bergotong-royong. Saat itu warga juga sampai malam untuk mengecat jalanan dan jembatan, agar tidak rumah-rumah saja yang berwarna-warni” (Woko,2023)*

#### **Gambar 4. Transformasi Kampung Pelangi**



Sumber : Website DLH Kota Semarang

Pada prosesnya, program yang masuk saat tumbuhnya kampung pelangi selain pengecatan rumah warna-warni adalah program fisik yaitu pembangunan talud tahan longsor, program sertifikat gratis, revitalisasi sungai, perbaikan jembatan, pengecatan jembatan, pembangunan pagar tangga tangga jalan, pelatihan bagi warga Kampung Pelangi. Dari program yang bersifat pembangunan fisik itu juga terdapat pembangunan gapura-gapura sejumlah 8 sesuai dengan gang yang ada di Kampung Pelangi, gapura tersebut berfungsi sebagai jalur wisata masuk ke wilayah Kampung Pelangi melalui gang yang berbeda-beda. Berikut peta jalur wisata Kampung Pelangi

**Gambar 5. Peta Jalur Wisata Kampung Pelangi**



Sumber : Bappeda Kota Semarang

Program-program fisik yang dilakukan atas kerjasama oleh OPD Kota Semarang yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pariwisata, Dinas Perikanan dan respon positif pihak swasta yang memberikan sumbangan cat. Dalam hal ini melalui penuturan Pak Woko, masyarakat turut berpartisipasi dalam proses tersebut dengan melukis talud yang terletak di sepanjang gang 1 sampai 8 agar terlihat indah hingga malam hari. Revitalisasi Kali Semarang dilakukan karena kondisi Kali Semarang di wilayah Kampung Pelangi kurang terawat dan mengeluarkan bau tidak sedap. Melalui revitalisasi ini, Kali Semarang menjadi indah dan menarik, sehingga masyarakat Kampung Pelangi dan sekitarnya sempat melakukan aktivitas memancing di Kali tersebut. Perubahan yang terjadi pada kampung tersebut menjadikannya sebagai daya tarik bagi para wisatawan

Dengan transformasi kampung kumuh tersebut, adanya peran pemerintah sebagai pemegang otoritas di suatu wilayah mampu menggerakkan seluruh OPD dalam membenahan kampung. Pemerintah juga memiliki otoritas untuk melangsungkan

perkembangan berkelanjutan kampung wisata tersebut dengan diturunkannya SK Kadisbudpar Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Nomor B/1442/556/IV/2023 sebagai regulasi kebijakan program pengembangan Kampung Pelangi di Kota Semarang. SK tersebut bertujuan mengesahkan Kampung Pelangi sebagai keberlanjutan pariwisata dan disahkannya Pokdarwis untuk menjadi “mitra pemerintah” yang menggerakkan masyarakat setempat akan potensi SDM dan wilayahnya sebagai destinasi wisata. Pada isinya pun menyatakan bahwa Pokdarwis ditegaskan berposisi sebagai mitra pemerintah, motivator, komunikator dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian masyarakat dan berfungsi sebagai motor penggerak akan sadar wisata dan sapta pesona di lingkungan wilayahnya. Sebagaimana dicantumkan pula pada SK Pokdarwis ini didirikan dalam jangka waktu tidak terbatas dengan sumber pendanaan berasal dari swadaya anggotanya, yang diperoleh dari sumber-sumber usaha sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Meskipun pada pembentukan awalnya pendanaan Kampung Pelangi didanai oleh pemerintah. Begitu pun pada pelatihan untuk pokdarwis melalui pemerintah pusat yang dialokasikan setiap Dinas Pariwisata kota untuk mengembangkan Pokdarwis sebagai para pelaksana realisasi program. Dari modal yang telah diberikan pemerintah, tujuannya dari pembentukan Pokdarwis dengan memahami betul adanya kebijakan SK Pokdarwis sebagai implementasi kampung wisatanya yang tidak hanya pada konservasi lingkungannya namun pada pariwisata berkelanjutan dan bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kampung Pelangi secara perekonomian lokal.

Program pengembangan Kampung Pelangi ini bersifat *top down* yaitu dimana program komunikasi ini diterapkan saat target, proyek, dan tugas ditetapkan oleh pemimpin lembaga yaitu Dinas Pariwisata dengan menyebarkan informasi atau tugas tersebut kepada seluruh anggota tim yang ada di kelembagaan Kampung Pelangi yaitu Pokdarwis. Melalui implementasi kebijakan Grindle, keberhasilan implementasi melalui program yang telah dirancang dan adanya aksi dana yang dialokasikan. Dari turunan program kebijakan diturunkan lagi melalui regulasi SK Pokdarwis sebagai implementasi keberlangsungan wisata terdapat berbagai program yang ada sebagai berikut :

#### **1. Program Pengembangan Infrastruktur:**

Program fisik ini bertujuan untuk memperbaiki infrastruktur dasar di kampung wisata. Karena pada mulanya Kampung Pelangi dikenal sebagai kampung

kumuh sehingga perbaikan fisik pada awal pembentukan seperti jalan, pengecatan, pembuatan jembatan, saluran air, normalisasi sungai, penataan pemukiman telah diterapkan di kampung pelangi Kota Semarang. Program ini melibatkan alokasi dana dari pemerintah kota untuk memperbaiki atau membangun infrastruktur yang dibutuhkan guna meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas bagi warga dan wisatawan. Alokasi dana untuk perbaikan fisik di Kampung Pelangi ini yang mulanya dari dana Pemerintah dan keberlanjutannya sesuai dengan SK bahwa sumber dana selanjutnya melalui swadaya dan sumber-sumber usaha yang dikembangkan masyarakat lokal melalui pengembangan kampung wisata.

Temuan di lapangan yang ada bahwa infrastruktur pun saat ini tidak terlihat baik. Seperti cat rumah-rumah yang sudah luntur, gardu pandang yang tidak terurus, sarana dan prasarana seperti MCK yang tidak memadai dan pagar tangga yang roboh di beberapa gang jalan. Melalui penuturan salah satu tokoh agama Kampung Pelangi yang pernah berkecimpung di dalam Pokdarwis :

*“Dulu waktu awal pembangunan, kampungnya indah, cantik, menarik bahkan banyak fasilitas pendukung. Tapi sekarang ini, infrastruktur disini menjadi tidak terurus. Gagang tangga untuk menjadi tumpuan saat menaiki jalanan Kampung Pelangi sudah roboh di beberapa gang jalan atas. Fasilitas penerangan juga masih kurang, kalau dilihat dari bawah mungkin hanya gang 5 ini yang terang. MCK di daerah atas juga belum memadai karena kalau ada wisatawan yang sampai atas kan tidak mungkin harus turun jauh ke kamar mandi. Gardu pandang pun saat ini sudah mulai goyah, terakhir ada lima orang saja sudah goyang” (Ali,2023).*

## **2. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia:**

Untuk mengoptimalkan potensi wisata kampung, program ini berfokus pada pelatihan dan pendidikan bagi masyarakat setempat. Untuk mendukung para Pokdarwis sebagai motor penggerak para pelaksana implementasi serta penghubung antar pemerintah dan masyarakat sekitar perlu diberikan dukungan dengan pelatihan yang berfungsi meningkatkan sumber daya dan pengembangan kampung. Dinas Pariwisata sebagai pembuat program, mencakup beberapa pelatihan. Tujuannya adalah meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat setempat sehingga mereka dapat memberikan pengalaman yang lebih baik kepada wisatawan. Melalui penuturan Pak Taufiq selaku divisi kelembagaan dinas pariwisata memaparkan bahwa memang ada pembinaan yang dilakukan dinas untuk Pokdarwis seluruh Kota Semarang dengan tujuan meningkatkan sumber daya manusianya, beberapa pelatihan

yang diberikan adalah keahlian kuliner, pengelolaan homestay, sharing bersama Pokdarwis, serta branding dan pemasaran.

Implementasi pelatihan tersebut pada awal 2017 pembentukan Kampung Pelangi terjalin bagus. Lalu menjadi pasif setelah 2018, pelatihan tersebut tidak dirasakan oleh para Pokdarwis dikarenakan adanya komunikasi internal antara ketua dan pengurus Pokdarwis yang tidak terjalin dengan baik. Pelatihan dari Dinas Pariwisata mulai aktif kembali pada tahun 2023 awal dengan kepengurusan yang baru.

### **3. Program Pemberdayaan Masyarakat Lokal:**

Program ini berfokus melibatkan masyarakat setempat dalam pengelolaan kampung wisata. Ini dapat meliputi pembentukan kelompok atau koperasi yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan dan pemasaran kampung wisata. Program ini juga dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya, seni, dan kegiatan pariwisata lainnya.

Pada awal transformasi Kampung Pelangi, masyarakat yang memiliki usaha juga didorong untuk dipasarkan. Berdasarkan penuturan Bu Handini, UMKM masyarakat di Kampung Pelangi saat itu menjadi aktif, banyak yang mengembangkan untuk usahanya dan dijual di depan rumah ketika wisata datang. Terdapat keripik-keripik, jamu tradisional, cemilan-cemilan jajanan dari ketela, sambal, dan ada juga es pelangi. Menurut penuturan Bu Handini, untuk UMKM makanan lebih laris dijual kepada wisatawan lokal, karena terkait perbedaan selera dan lidah yang kurang cocok dengan wisatawan asing sehingga mereka kurang tertarik terhadap UMKM nya. Wisatawan mancanegara lebih tertarik pada souvenirnya. Aktivitas pemberdayaan yang ada sedang berhenti dan belum terangkat kembali. Bu Handini menyatakan butuh inovasi pembuatan kerajinan baru karena seperti gantungan kunci, tas, hiasan bunga masyarakat sudah ahli dari pelatihan yang sebelumnya. Oleh karena itu, Bu Handini sangat berharap ada pihak-pihak yang mau membantu untuk memaksimalkan potensi ide-ide kerajinan yang lain dengan melatih dan bisa dipasarkan.

**Gambar 6. Aktivitas Pembuatan Souvenir**



Sumber: Informan, Ibu Handini

Realitas yang ada pada Kampung Pelangi, pada pembangunan awalnya 2017 para masyarakat aktif dengan kegiatan pembuatan souvenir, berjualan, pembuatan pot, pengolahan keripik-keripik, keaktifan pada pelatihan skills. Namun dinamika yang terjadi pada 2018-2023 implementasi kelompok UMKM yang sebelumnya aktif melakukan pemberdayaan khususnya ibu-ibu rumah tangga belum terangkatnya UMKM dan terhentinya pemberdayaan oleh Kampung Pelangi itu sendiri. Saat ini mereka masih terus beradaptasi untuk memasarkan produknya agar dikenal sebagai UMKM Kampung Pelangi. Mereka juga masih menggali inovasi Kampung Pelangi untuk pemberdayaan masyarakat lokal agar kembali aktif. Pemberdayaan masyarakat lokal yang aktif dan menghasilkan nilai jual saat ini adalah kelompok kesenian yang diisi oleh anak-anak yaitu tarian khas “jatilan” yang biasa ditampilkan ketika ada wisatawan datang. Kesenian ini menjadi satu-satunya andalan pemberdayaan masyarakat lokal yang juga didukung oleh Dinas Pariwisata karena biaya pelatihan dan biaya penampilan diberikan kepada anak-anak yang tampil.

**Gambar 7. Kesenian Jatilan**



Sumber : Informan, Bu Handini

Pertunjukan seni tersebut dikelola oleh masyarakat dan dibantu oleh pemerintah. Dalam hal ini, dukungan yang diberikan pemerintah adalah terkait pembiayaan latihan di sanggar. Dinas Pariwisata sebagai OPD Pemerintah melalui penuturan Pak Taufiq selaku bidang kelembagaan Dinas Pariwisata, bahwa saat kesenian jatilan ditampilkan, anak-anak yang tampil pada pertunjukkan diberikan komisi untuk pertunjukannya. Disela-sela penampilannya mereka juga biasanya mendapatkan saweran dari para wisatawan.

*“anak-anak itu yang tampil senang mba, jadi ada kegiatan. Anak-anak juga dapat upah pertunjukkan dari dinas terkadang juga dapat saweran dari wisatawan. Untuk usianya anak-anak usia 6-12 tahun. Memang kan penampilan kesenian itu ditampilkan kalau ada tamu wisatawan dari mancanegara yang datang. Biaya pelatihannya di support pemerintah, tapi untuk berikutnya harus pakai swadaya dan ini yang sedikit kesulitan karena setelah masa Covid-19 juga tidak banyak pengunjung, belum lagi untuk menyewa kostumnya”* (Handini, 2023).

#### **4. Program Pemasaran dan Promosi:**

Untuk meningkatkan daya tarik kampung wisata, program ini fokus pada strategi pemasaran dan promosi yang efektif. Ini melibatkan pengembangan materi promosi, partisipasi dalam pameran pariwisata, pembuatan media sosial untuk mempromosikan kampung wisata, dan kerja sama dengan agen perjalanan atau pihak swasta dalam memasarkan destinasi tersebut. Kampung Pelangi menurut penuturan

Pak Taufiq, sudah dimasukkan menjadi salah satu destinasi wisata yang wajib ketika ada wisatawan mancanegara yang datang.

*“Kampung Pelangi ini sangat penting untuk dikembangkan karena sudah terkenal di mancanegara. Dari Dinas Pariwisata sudah bekerjasama dengan tour dan memang sudah memasukkan paket kubjungan wisata Kampung Pelangi ketika ada wisatawan mancanegara datang. Rangkaiannya pakatnya itu dengan Sam poo kong, Kota Lama, Lawang Sewu lalu Kampung Pelangi”* (Taufiq, 2023).

Dengan dikenalkannya Kampung Pelangi sebagai objek wisata lokal, sudah seharusnya promosi selanjutnya seharusnya bisa dikembangkan masyarakat sendiri memanfaatkan berbagai media sosial yang ada, karena terdapat pelatihan mengenai branding dan pemasaram dari dinas pariwisata yang bisa mendukung pengembangan Kampung Pelangi. Hal tersebut belum diaplikasikan dengan baik karena belum ada campur tangan anak-anak muda sebagai generasi yang lebih aktif dalam berteknologi untuk memberikan inovasi branding yang menarik kembali wisatawan. Pada saat ini, sikap yang direncanakan masih sebatas ide untuk membuat website khusus Kampung Pelangi namun belum terealisasi.

## **5. Program Keberlanjutan dan Konservasi Alam:**

Untuk menjaga kelestarian alam dan budaya di kampung wisata, program ini berfokus pada praktik keberlanjutan dan konservasi. Ini melibatkan pengelolaan sampah, pelestarian lingkungan alam, dan pendekatan yang berkelanjutan dalam pengembangan kampung wisata agar dapat dinikmati oleh generasi mendatang dan para wisatawan. Karena Kampung Pelangi dulunya terkenal kumuh dan terletak di belakang sungai yang dahulunya banyak sampah, transformasinya saat ini yang menjadi bersih harus dibudayakan untuk keberlangsungannya pula. Dengan konservasi alam ini masyarakat merasa mendapatkan manfaatnya. Menurut penuturan warga Kampung Pelangi :

*“Kampungnya saat dirubah jadi bersih mba, senang sekali para warga juga senang kampung nya dicat, rumah-rumah ada yang dibenahi karena kan ada yang letak rumahnya itu kurang kokoh juga mba, dari papan kayu juga dibenahi. Sungai nya juga sudah bersih, pas itu dibantu DLH juga. Rumah-rumah sekarang jadi lebih nyaman ditinggali. Sungai nya digali dan dirapikan. Pokoknya dari bawah jalan itu sudah indah beda kayak dulu, jembatan, lampu penerangan juga lebih memadai pas jadi Kampung Pelangi”* (Prih,2023)

Dengan adanya program pengembangan Kampung Pelangi, langkah awal dalam mengatasi permasalahan lingkungan sangat menarik masyarakat setempat dan mereka sebagai penerima program paling besar merasakan manfaatnya terkait lingkungannya yang berubah menjadi bersih dan nyaman. Dengan itu, tergantung bagaimana keberlanjutan masyarakat setempat dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan yang ada. Saat ini, masyarakat setempat melalui penuturan Pokdarwis sudah minim kepduliannya. Sehingga para Pokdarwis tiada henti menghimbau untuk menjaga kebersihan. Terlebih lagi di depan rumah masyarakat sendiri kembali ada tumpukan sampah yang berserakan, sedangkan dibawah dekat jembatan gang 7 terdapat tempat pembuangan akhir untuk masyarakat Kampung Pelangi, namun mereka terkendala rasa malas sehingga menunggu sampahnya menumpuk baru dibuang ke bawah.

#### **6. Program Kemitraan dan Kerjasama:**

Program ini mendorong kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pengembangan kampung wisata. Ini melibatkan pembentukan kemitraan dengan investor, perusahaan, atau LSM untuk mendukung pengembangan infrastruktur, promosi, dan pengelolaan kampung wisata di Kampung Pelangi terlebih lagi untuk mendukung pendanaan dan peningkatan sumber daya masyarakatnya. Melalui penuturan Pak Taufiq bahwa perusahaan cat dan beberapa bank ikut membantu dalam sumbangan cat dan tenaga. Penuturan tersebut didukung oleh Bu Handini :

*“Tidak hanya pemerintah yang ikut andil saat pembangunan Kampung Pelangi. Dari perusahaan cat Nippon Paint, Bank BRI, Perusahaan Djarum. Brand Kosmetik Wardah juga ikut membantu dana. Untuk dukungan pelatihan juga saat itu sempat ada LSM dan akadmisi dari UNNES dan UNDIP dan yayasan sosial yang memberikan pelatihan kepada ibu-ibu membuat donat, membuat kerajinan dari batok kelapa, pembuatan handsanitizer dari limbah. Banyak kok mba dukungannya saat awal-awal Kampung Pelangi ini terbangun” (Handini,2023)*

Realita yang ada pada saat ini, bahwa Kampung Pelangi sedang kembali merintis masa kejayaannya sebagai kampung wisata. Mereka kembali mencari para CSR maupun LSM yang mau mendampingi perkembangan Kampung Pelangi. Misalnya pun terkait suatu produk makanan. Tidak hanya pemberian materi cara

memproduksi namun, bagi warga setempat yang dibutuhkan sampai pada tahap pemasarannya.

Melalui implementasi kebijakan Grindle, Implementasi pengembangan Kampung Pelangi melalui asal mula tujuan pembangunan Kampung Pelangi dalam indikator isi kebijakan kepentingan yang mempengaruhi menjelaskan kepentingan yang mempengaruhi adalah Pemerintah, sebagai pemimpin di suatu wilayah tindakan tersebut diawali dengan inisiasinya dalam penyelesaian isu pemukiman kumuh yang dilanjutkan sebagai kampung wisata, sehingga menentukan target program kebijakannya yaitu Pokdarwis dan seluruh masyarakat Kampung Pelangi setempat sebagai indikator kepentingan yang terpengaruh untuk diimplementasikannya program tersebut.

Target program kebijakan jelas melalui regulasi SK Pokdarwis yaitu Pokdarwis sebagai mitra pemerintah dan unsur penggerak seluruh masyarakat Kampung Pelangi untuk melanjutkan keberlangsungan perkembangan Kampung Pelangi. Implementasi pada program-program yang berjalan baik fisik dan non-fisik. Dengan adanya SK Pokdarwis, Pokdarwis terpengaruh sebagai ikon pengembangan implementasi kampung wisata pelangi melalui upaya pemberdayaan masyarakatnya melalui hasil penelitian lapangan, pemberdayaan yang dilakukan Pokdarwis Kampung Pelangi hanya berjalan sampai pada 2018, dan untuk saat ini tidak berjalan kembali. Sedangkan pada regulasi SK, Pokdarwis hadir untuk menggerakkan masyarakat dan menggali potensi wisata namun pada kenyataannya Kampung Pelangi belum menonjolkan potensi yang ada serta belum mampu mengangkat warga setempat dalam menciptakan kemandirian ekonomi melalui kampung wisata.

Dengan berbagai program, dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Kampung Pelangi. Terdapat regulasi sebagai penerapan implementasi melalui SK Kadisbudpar. Kepentingan yang terpengaruh dari adanya regulasi SK Pokdarwis Kampung Pelangi dalam implementasi pengembangan Kampung Pelangi adalah kepentingan dari Pokdarwis sebagai unsur pelaksana. Dengan sedemikian rupa Dinas Pariwisata sebagai OPD Pemerintah Kota Semarang memberikan pelatihan kepada Pokdarwis untuk dapat melancarkan tujuannya dalam SK Pokdarwis sebagaimana meningkatkan kepariwisataan dan mengembangkan SDM masyarakat di Kampung Pelangi untuk sadar akan potensi wisata di daerahnya yang bisa mengangkat perekonomian lokal.

Kesadaran masyarakat pun belum maksimal pada implementasinya, terlihat kembalinya rasa minimnya peduli terkait kebersihan lingkungan dan belum menggalinya potensi kampung wisata pelangi.

Wilayah tersebut pada awal transformasinya, selain Dinas Pariwisata transformasinya menjadi kampung wisata mendapat manfaat dalam penambahan objek wisata di Kota Semarang untuk dikembangkan, dari masyarakat sendiri juga mendapat manfaat khususnya terkait nyamannya hunian mereka sebagai tempat tinggal serta banyak diberi perhatian oleh para CSR ataupun LSM untuk dibina masyarakatnya yang bermanfaat untuk berwirausaha. Namun manfaatnya dalam mencari peruntungan sebagai peningkatan ekonomi lokal tidak terimplementasi dengan baik, karena souvenir dan UMKM sudah tidak berjalan secara aktif.

Melalui tujuan pembentukan SK Pokdarwis sebagai regulasinya pengembangan Kampung Pelangi, perubahan yang diharapkan untuk keberlangsungan pengembangan Kampung Wisata sebagai salah satu pariwisata yang ikut mendominasi di Kota Semarang belum maksimal. Karena mereka para pelaksana belum mampu mendongkrak potensi daerah yang ada sebagai peningkatan ekonomi lokal. Program yang diberikan juga tidak berjalan secara kelanjutan.

## **B. Pengembangan Kampung Pelangi Sebagai Kampung Wisata**

Kunjungan wisatawan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menjadi daya tariki, yang mendorong seseorang untuk melakukan perjalanan jauh dan mengeluarkan biaya. Sebagai destinasi wisata, suatu daerah harus memiliki potensi daya tariki yang dapat mendorong wisatawan untuk mengunjunginya. Saat merencanakan pembangunan Kampung Pelangi, pemerintah berharap bahwa destinasi wisata kampung tersebut memiliki potensi daya tarik yang besar. Hal ini terutama disebabkan oleh lokasinya yang berada di pusat kota dan mudah diakses oleh wisatawan. Masyarakat Kampung Pelangi telah beradaptasi dengan lingkungan baru mereka, dengan banyaknya penduduk dari Semarang dan sekitarnya yang datang berkunjung untuk melihat perubahan di Kampung Gunung Brintik. Tema warna-warni yang dibentuk oleh pemerintah Kota Semarang melalui program Kampung Pelangi memberikan identitas baru bagi kampung tersebut sebagai salah satu kampung wisata di pusat Kota Semarang.

Dengan ikon baru sebagai kampung wisata, banyaknya pengunjung yang datang ke Kampung Pelangi menjadi salah satu faktor potensi wisata dengan berbagai sumber

daya yang terdapat di daerah tersebut untuk dikembangkan sebagai suatu atraksi wisata dan bisa dimanfaatkan sebagai kepentingan ekonomi. Untuk mengetahui pengembangan yang terjadi sebagai suatu kampung wisata, berikut analisis potensi pada pembentukan kampung wisata pelangi dengan pendekatan 4A dalam komponen kepariwisataan:

### **1. Atraksi Wisata**

Atraksi wisata yang menjadi daya tarik di Kampung Pelangi umumnya adalah atraksi wisata buatan manusia. Secara garis besar terdapat potensi wisata utama yaitu potensi sosial dan budaya. Bangunan pemukiman rumah-rumah warga ditengah kota yang berwarna-warni diikuti jalanan berbukit menuju atas menjadi daya tarik tersendiri, diikuti dengan dinding-dinding yang digambar wayang-wayang dan mural oleh para warga kampung pelangi, jalanan dan jembatan yang ikut bernuansa warna-warni menjadi salah satu daya tarik dan spot foto para wisatawan.

Kehidupan sehari-hari masyarakat juga mampu menarik wisatawan berkunjung ke kampung tersebut. Pengunjung yang datang bisa berkeliling kampung memasuki gang-gang sempit dan melihat rumah yang saling berhimpitan serta berinteraksi dengan aktivitas warga. Dengan istilah blusukan atau berkeliling kampung melewati 8 gang-gang sempit, rumah-rumah yang berhimpitan, dan jalan yang berbentuk seperti perbukitan di tengah kota bisa melihat pemandangan Kota Semarang dari atas membuat para wisatawan menikmati wisata di Kampung Pelangi. Wisatawan juga kerap berinteraksi dengan masyarakat. Menurut penuturan warga :

*“Kampungnya sudah menjadi cantik, wilayahnya juga bersih makanya saat itu sempat ramai. Wisatawan lokal maupun mancanegara berkunjung dengan menikmati keindahannya yang berwarna-warni, rumah-rumah warga di Kampung Pelangi itu waktu denger dari Bu Handini kurang lebih 800 dan jalanannya yang kecil dan semakin tinggi makanya kelihatan padat dan kalau di warnain kayak gini jadi kelihatan cantik kalau diliat dari luar. Makanya wisatawan pada pingin tau ya, jadi pas viral banyak yang datang datang dari lokal sampai yang mancanegara. Dan mereka bener-bener menyusuri gang-gang kecil tiap rumah itu dan ternyata sampai atas juga di gardu pandang kampung pelangi. Pada foto-foto, rame banget dulu” (Citra,2023)*

Penuturan serupa oleh Ibu Prih bahwa masyarakat juga berfinteraksi dengan wisatawan:

*“Seneng banget dulu mba, biasanya kampung sepi jadi ramai waktu dibuat Kampung Pelangi. Banyak bule-bule juga, seneng pada mau diajak foto. Kadang juga bule-bule nya kalau udah sampe atas nanti beli minum atau duduk-duduk di angkringan atas sambil foto-foto, soalnya kalau dari atas kan*

*bisa lihat jalan raya dan rumah-rumah yang dibawah. Tapi sekarang ya begini mba, catnya pada luntur udah tidak menarik dan wisatawan juga sudah tidak ada yang kesini” (Prih,2023)*

Kehidupan sosial masyarakat yang berubah dan berinteraksi dengan para wisatawan sebagai atraksi wisata sosial-budaya yang sangat baik dan terjalin dengan terbuka. Namun setelah saat Kampung Pelangi di fase surutnya setelah 2019, tidak ada wisatawan yang berinteraksi kepada masyarakat Kampung Pelangi secara intens.

Atraksi wisata lain yaitu potensi budaya dengan adanya kesenian jatilan. Biasanya kesenian ini ditampilkan ketika ada tamu dari mancanegara yang datang. Kampung Pelangi yang masih minimnya budaya, meskipun baru kesenian jatilan mereka terus menggali budaya yang ada.

## **2. Akseibilitas**

Unsur penting dalam menganalisis suatu obyek wisata agar dapat dijangkau oleh wisatawan baik dari segi transportasi serta fasilitas selama perjalanan menuju objek wisata. Melalui kondisi sarana dan prasarana di Kampung Pelangi setelah di perbaiki oleh pemerintah, kondisi jalan di gang-gang sudah bersih terutama pada sungai, jalanan dan bebatuan yang ikut di cat berwarna, jembatan yang sudah bagus tertata rapi, gardu pandang sebagai spot foto, tiang penunjuk jalan, pagar tangga untuk wisatawan menaiki tanga-tangga jalan menuju ke atas gardu pandang ataupun rumah warga. Sarana transportasi yang digunakan untuk menuju kampung pelangi sangat mudah. Karena letaknya di tengah kota, sehingga transportasi apapun bisa digunakan seperti bis, angkutan online maupun konvensional dan transportasi lainnya. Ini juga menjadi faktor destinasi wisata ini seharusnya banyak pengunjung. Namun pada kenyatannya Kampung Pelangi ini sudah sepi pengunjung tdiak terlihat transportasi yang berlalu lalang mengunjungi Kampung Pelangi.

## **3. Amenitas**

Merupakan faktor erat yang berkaitan dengan fasilitas-fasilitas obyek wisata sehingga akan mempengaruhi kenyamanan dan kemudahan wisatawan yang berkunjung. Fasilitas yang ada dikampung pelangi antara lain ada gardu pandang, gardu pandang sendiri terletak di paling atas kampung pelangi fungsi dari gardu pandang yaitu untuk melihat pemandangan Kota Semarang dari sudut tempat wisata

kampung pelangi yang memperlihatkan keramaian Kota Semarang. Diatas gardu pandang ini ada tulisan besar kampung pelangi jika malam hari tulisan tersebut akan menyala yang membuat kampung pelangi masih terlihat bagus ketika malam hari. Kemudian lahan parkir Kampung Pelangi ini berada di bawah di beberapa gang yang ada di kampung pelangi. Gang tersebut menyediakan lahan tempat untuk parkir kendaraan roda dua, untuk kendaraan roda empat sementara ini masih parkir di depan toko bunga yang berada di depan kampung pelangi. Kemudian toilet yang ada dikampung pelangi bisa menggunakan toilet rumah warga atau toilet yang berada di kanan kiri toko bunga yang berada di depan Kampung Pelangi.

Di Kampung Pelangi memang belum dikembangkan rumah-rumah warga untuk bisa dijadikan homestay seperti tujuan pelatihan program yang diberikan dinas sebagai tempat penginapan para wisatawan, namun terdapat rumah makan atau warung – warung di sekitar kampung pelangi, yang berjualan yaitu warga dari kampung pelangi itu sendiri juga ada rumah makan di *food court* yang berada di taman kasmaran. Taman kasmaran sendiri terletak disamping toko bunga yang berada di ujung Kampung Pelangi. Taman kasmasran juga menyediakan berbagai macam jajanan dan makan juga diatas dari taman kasmaran tersebut terdapat cafe baru yang menjadi sasaran anak muda untuk menikmati sore dengan pemandangan kampung pelangi. Kampung Pelangi ini juga sudah memiliki sarana air bersih yaitu PDAM. Melalui penuturan Pak Ali, pengajuan air PDAM sudah sejak tahun 2012 saat dirinya masih menjadi ketua RT. Namun baru bisa diaplikasikannya pada tahun 2015 setelah pergantian RT yang baru dan bersyukur sekarang memiliki sarana air yang bersih.

Kampung wisata pelangi memiliki balai pertemuan yang terletak di jalan masuk gang, Fungsi dari balai pertemuan ini, bisa menjadi fasilitas pertemuan warga dan tempat untuk menjamu wisatawan maupun tamu yang datang kunjungan. Namun realisasi tersebut belum terjadi adanya. Untuk tempat ibadah di Kampung Pelangi sudah memiliki 1 musholla yang terketak di gang 4. Sehingga mayoritas masyarakat lokal yang memiliki agama Islam bisa melakukan ibadah saat berada di kawasan Kampung Wisata Pelangi. Fasilitas merupakan salah satu faktor penting industri pengembangan pariwisata untuk menunjang pengembangan destinasi. Hal-hal yang perlu ditinjau untuk Kampung Pelangi melalui fasilitas demi kenyamanan dan kemudahan wisatawan:

### 3.1 Tiang Penunjuk Jalan

Realitas yang ada saat ini,, kondisi cat rumah-rumah kampung pelangi memburuk, tiang penunjuk jalan yang tidak terbaca, dan banyak tanaman liar tumbuh di sepanjang jalan di antara rumah-rumah penduduk. Gardu yang menjadi spot foto pun saat ini beralih menjadi sarang burung merpati dan juga sudah tidak kokoh. Pada saat malam hari pun tulisan Kampung Pelangi sudah tidak menyala dan belum ada yang mengatasi kendala tersebut sampai saat ini.

**Gambar 8. Kondisi Tiang Penunjuk Jalan Kampung Pelangi Yang Tidak Terbaca**



Sumber : Dokumentasi Penulis

### 3.2 Toilet

Dengan jalanannya yang meninggi di tengah kota, kamar mandi umum untuk para wisatawan belum disediakan di daerah atas dekat gardu pandang. Sehingga nantinya wisatawan yang akan buang air atau hajat besar akan kesusahan jika harus turun jauh ke bawah.

### 3.3 Jasa Pemandu

Kampung Wisata Pelangi yang menjadi rangkaian kunjungan wisatawan mancanegara belum memiliki pemandu dari warga sekitar yang sekiranya bisa meningkatkan potensi dari warga masyarakat sendiri dan juga bisa menjadi

peruntungan swadaya Kampung Pelangi. Melalui penuturan Pak Bugi, sangat dibutuhkan jasa pemandu dari warga lokal agar warga juga lebih berkembang terkait SDM nya:

*“Disini yang paling perlu dibenahi memang SDM nya mba, saya sih berharapnya dikasih pelatihan bahasa inggris secara khusus untuk pemanduan wisata gitu, atau dari LSM. Biar pakainya warga sini aja yang memang faham dengan kampungnya untuk memperkenalkan secara lebih intens khususnya yang remaja-remaja. Terus nanti kan bisa dapet pemasukan juga. Kalau pake tour kan masuknya kesana ” (Bugi,2023)*

### **3.4 Balai Pertemuan**

Balai pertemuan yang ada, tidak sejalan dengan fungsinya. Sampai saat ini balai tersebut yang bisa dijadikan tempat pameran UMKM, souvenir warga serta penyambutan tamu belum berfungsi sebagaimana mestinya. Didukung dengan penuturan Pak Woko

*“Balai pertemuan hanya dipakai sekali saat itu awal-awal untuk pertemuan, setelah itu tidak ada perkumpulan ataupun pertemuan menggunakan balai. Balai pertemuan pun kosong, seharusnya bisa menjadi pameran souvenir-souvenir dari warga setempat”(Woko,2023).*

Penuturan ini didukung oleh divisi keamanan di kepengurusan Pokdarwis

*“Saya dulu juga kan sebagai pengurus Pokdarwis, tidak ada yang namanya perkumpulan. Kampung Pelangi mau dibuat apa sampai akhirnya ada Covid-19 dan mulai aktivitas biasa lagi itu ketuanya juga hilang. Dari awal itu tidak ada pemanfaatan penggunaan balai. Yang aktif dulu hanya wakilnya Pak Erwin dan malah Bu Handini yang menggerakkan pelatihan buat ibu-ibu, terus dijual itu ke para wisatawan tapi belum menggunakan fasilitas balai sebagai pameran souvenir”(Bugi,2023).*

## **4. Aktivitas**

Penunjang kepariwisataan adalah kelembagaan berbentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang mana menjalani aktivitas yang bisa dilakukan bersama warga setempat dan wisatawan. Menikmati bangunan berwarna-warni, spot foto, membuat dan berbelanja kerajinan tangan Kampung Pelangi. Untuk masyarakat kampung pelangi, sebagai faktor penting pelaksanaan program industri pariwisata dalam pengembangan Kampung Pelangi memiliki peran utama dalam melayani dan menmpelakukan wisawatan yang datang ke Kampung Pelangi. Partisipasi masyarakat dari penuturan Ibu Handini pada awal-awal viralnya cukup baik, karena ikut menjaga kebersihan agar tetap terlihat indah ketika dipandang, turut aktif dan

melakukan aktifitas yang berkaitan Kampung Pelangi seperti saat pembuatan kerajinan tangan dan menjamu wisatawan. Mereka juga ada yang menjadi penjual kerajinan tangan, penjual makanan minuman, dan juru parkir.

Seiring berjalannya waktu, terdapat situasi global Covid-19 menyebabkan hambatan segala pergerakan dan aktivitas, salah satunya dalam bidang pariwisata yang berdampak pada Kampung Pelangi. Pada Desember 2019, sebagai puncak Covid-19 merajalela khususnya di Kota Semarang. Sehingga aktivitas perkumpulan, kunjungan yang melibatkan pertemuan banyak orang dihentikan. Dengan itu berbagai destinasi wisata salah satunya juga Kampung Pelangi menjadi vakum.

Namun pada masa transisi virus yang mereda tahun 2022, aktivitas sudah mulai berjalan seperti biasa, dan berbagai destinasi wisata sudah mulai bergejolak kembali, namun konsistensi Kampung Pelangi malah menjadi salah satu destinasi wisata yang tidak nampak dipermukaan. Program-program fisik pun tidak berjalan baik. Pembuat kerajinan warga setempat yang bisa dijual sebagai souvenir saat ini pun sudah tidak. Sudah tidak adanya wisatawan yang datang.

Melalui analisis implementasi dari Gribndle dengan bantuan pendekatan kepariwisataan melalui potensi wisata, peningkatan SDM perlu ditata dan dibangkitkan kembali. Kesadaran akan fasilitas objek wisata serta banyak daya pendukung yang perlu dibenahi, seperti branding, stabilitas Pokdarwis, jasa pemandu, pergerakan para remaja sebagai generasi yang lebih kreatif dan modern. Manfaat yang diharapkan pemerintah pun selaku pembuat regulasi dan pembina, bahwa masyarakat bisa mendapatkan manfaat melalui pengembangan Kampung Pelangi dengan kreativitas SDM nya dan bisa meningkatkan perekonomian namun untuk mencapai itu, para pelaksana belum mendalami potensi daerahnya.

Terkait sarana dan prasarana sebagai indikator sumber daya pendukung juga kurang maksimal dan belum dikembangkan oleh Pokdarwis dan masyarakat untuk memadai kampung sebagai destinasi pariwisata. Serta belum adanya program dari Pokdarwis sendiri untuk meningkatkan semangat kepariwisataan. Program yang diberikan kepada Pokdarwis belum mengangkat pengembangan Kampung Pelangi untuk pencarian dana dan memenuhi fasilitas sarana dan prasarana di Kampung Pelangi. Perubahan yang dicapai pemerintah dan masyarakat hanya pada pengelolaan

pemukiman kumuh meskipun saat ini beberapa masyarakat masih kurang sadra akan kebersihan.

## **C. Kompetensi Personil Sebagai Sumber Daya Yang Mendukung**

### **1. Proses Terbentuknya Kelembagaan Pokdarwis**

Pembangunan Kampung Pelangi memiliki beberapa tahapan. Setelah Tahap pertama yaitu pengecatan pemukiman warga Kampung Gunung Brintik. Kemudian penindakan pemukiman dan segala pembenahan fisik, dan dibentuklah lembaga khusus yang bertugas mengurus keberlangsungan pengembangan Kampung Pelangi, lembaga ini disebut Kelompok Sadar Wisata(Pokdarwis). Dua bulan setelah peresmian dan pembenahan fisik kampung pelangi, Pokdarwis Kampung Pelangi diresmikan oleh Pemerintah Kota Semarang pada sekitar bulan Juli tahun 2017, sedangkan SK dari Pemerintah Kota Semarang turun pada bulan Agustus dengan ketua Pak Slamet. Lembaga inipun telah memiliki Surat Keputusan dari Pemerintah Kota Semarang yang dikeluarkan Dinas Pariwisata sebagai Lembaga resmi yang menangani Kampung Pelangi. SK Kadisbudpar pertama dikeluarkan No 556/110 tahun 2017 yang saat ini diperbarui menjadi SK Kadispudpar No. B/1442/556/IV/2023. SK terbaru tidak merubah isi tujuan, namun hanya meneruskan SK sebelumnya dengan merubah struktur anggota Pokdarwisnya.

Lembaga dan perangkat pemerintahan di Kampung Pelangi merupakan elemen yang berperan penting dalam kelancaran program Kampung Pelangi. Pada prosesnya, pembentukan anggota pokdarwis saat pertama kali tahun 2017 melalui penuturan Bu Handini dan Pak Woko,mulanya para masyarakat dikumpulkan di gedung PKK Kota Semarang yang dihadiri oleh Pak lurah, para ketua RW dan ketua RT serta beberapa warga yang bisa ikut hadir. Pada saat itu Pak Lurah menawarkan untuk diberikan rekomendasi nama-nama yang mau diajukan untuk menjadi ketua Pokdarwis. Lalu terjadi begitu saja, Pak Slamet menawarkan diri untuk menjadi ketua Pokdarwis, karena masyarakat lain merasa belum memiliki pandangan terhadap kampung pelangi mau dibuat seperti apa dan belum memiliki pengalaman yang mumpuni untuk mengkoordinasi destinasi wisata sehingga masyarakat setuju dengan penawaran Pak Slamet sebagai pemimpin jalannya Kampung Pelangi. Begitu pun pada divisi-divisi yang ada, dipilih melalui para masyarakat yang sudah menjadi aktor pemerintahan di kampung seperti para ketua RW dan RT.

Dari terbentuknya SK Pokdarwis sebagai regulasi dan kebijakan pengembangan Kampung Pelangi. Pokdarwis sebagai agen pelaksana merupakan salah satu komponen dalam masyarakat yang memiliki peran dan kontribusi penting dalam pengembangan kepariwisataan di daerahnya. Keberadaan Pokdarwis diharapkan memahami melalui tujuannya dibentuk yaitu sebagai mitra pemerintah dan unsur penggerak masyarakat sebagaimana mengembangkan kampung wisata pelangi dalam keberlanjutan. Pokdarwis pun merasa perlu terus didukung dengan pembinaan sehingga dapat berperan lebih efektif dalam turut menggerakkan partisipasi masyarakat. Untuk mewujudkan lingkungan dan suasana yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan kepariwisataan di sekitar destinasi pariwisata juga merupakan kewajiban Pokdarwis sebagai figur warga setempat.

## **2. Keberlangsungan Pokdarwis**

Keberadaan Pokdarwis dalam konteks pengembangan destinasi pariwisata berperan sebagai salah satu “*unsur penggerak*” yang dalam upayanya meningkatkan kesiapan dan kepedulian masyarakat Kampung Pelangi sebagai lokasi daya tarik wisata. Hal ini dilakukan agar masyarakat kampung dapat berperan sebagai tuan rumah yang baik bagi berkembangnya kepariwisataan, serta memiliki kesadaran akan peluang dan nilai manfaat yang dapat dikembangkan dari kegiatan pariwisata untuk meningkatkan nilai dari kampung dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Tujuan adanya Pokdarwis tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena pada saat ini, kenyataan yang ada di Kampung Pelangi sudah tidak fenomenal seperti awal pembentukan. Peran sebagai unsur penggerak juga belum mendorong daya tarik daerahnya untuk mengangkat kembali Kampung Pelangi.

Setelah ditetapkannya pengurus-pengurus Pokdarwis, implementasi yang terjadi adalah tidak ada koordinasi yang terjalin antara ketua dan para pengurus lainnya. Melalui penuturan para Pokdarwis, pada awal pembentukan sebagai ketua pokdarwis Pak Slamet senang dan bersemangat kampungnya menjadi ramai, namun tidak ada pergerakan dan diskusi bagaimana pengembangan Kampung Pelangi akan dilaksanakan. Evaluasi maupun perkumpulan pengurus tidak terjalin. Pokdarwis sebagai motivator dalam pengembangan SDM untuk meningkatkan perekonomian lokal juga tidak digerakkan ketua Pak Slamet. Oleh karena itu terdapat program pelatihan yang diinisiasi oleh salah satu anggota Pokdarwis yaitu Ibu Handini.

Pada realitasnya, Pokdarwis tidak merasakan bahwasanya terdapat informasi terkait program pelatihan yang dibina oleh Dinas Pariwisata setelah 2018. Penuturan para pokdarwis merasa tidak dibantu Pemerintah terkait keberlangsungan pengembangan Kampung Pelangi. Padahal mereka sangat membutuhkan ilmu-ilmu terkait industri kepariwisataan yang tiba-tiba kampung nya diubah menjadi suatu kampung wisata. Program pemberdayaan untuk meningkatkan kualitas masyarakat sebagai unsur pengembangan kampung hanya terjadi sekali-dua kali saat pembentukan awal kampung. Mereka pun mengatakan, tidak ada sosialisasi sama sekali dari ketua ataupun agenda-agenda yang telah diberikan Dinas Pariwisata.

Terkait program yang diberikan pemerintah, pada nyatanya Taufiq selaku divisi kelembagaan Dinas Pariwisata sudah menginformasikan kepada ketua pokdarwis saat itu yaitu Pak Slamet. Namun kenyatannya , Pokdarwis pada saat itu merasa tidak diperhatikan karena tidak adanya informasi dari Pak Slamet kepada pokdarwis yang lain. Hal itu diketahui oleh Bu Handini melalui interaksinya dengan Dinas Pariwisata.

*“Saat itu saya di telfon mba sama dinas, saya kaget katanya kok tidak pernah ikut pelatihan yang diberikan sama dinas. Lalu dinas juga menanyakan bagaimana kondisi yang terjadi terkait organisasi pokdarwis Kampung Pelangi karena pada saat itu mau ada tamu dari mancanegara dan ketuanya tidak bisa dihubungi. Makanya dinas telfon saya. Saya juga bingung ternyata selama ini ada pelatihan tetapi tidak ada informasi masuk ke pokdarwis yang lain. Dan ketuanya saat itu sangat susah dihubungi menghilang, akhirnya kalau ada tamu wisatawan mancanegara dinas telfonnya ke saya atau Pak Woko”*(Handini,2023).

Dari fakta tersebut, komunikasi yang dijalankan antar ketua dengan anggotanya yang lain tidak berjalan baik. Mulai saat itu pula, ketika ada kebutuhan apapun terkait dinas dan Kampung Pelangi, Bu Handini menjadi penghubungnya. Dan interaksi ini menjadi dua pintu karena seharusnya satu pintu melalui ketua. Keaktifannya sebagai ketua pun juga sudah dipertanyakan karena tidak pernah muncul dan menunjukkan sebagai motivator serta unsur penggerak masyarakat Kampung Pelangi.

Dengan kampungnya yang telah berubah, Pokdarwis merencanakan suatu kegiatan pada 2-3 November 2019 memperingati HUT Kampung Pelangi. Kegiatan ini juga menjadi bentuk syukur dan bahagia karena kampungnya telah menjadi indah.

Para Pokdarwis merencanakan program perlombaan yang lagi-lagi di konsepkan tanpa ketua. Program ini dikenal dengan nama “Festival Kampung Pelangi” terdapat berbagai perlombaan, seperti memancing, melukis mural, mewarnai, memasak lumpia. Perlombaan ini terbuka untuk umum dan antusias para masyarakat umum juga banyak yang turut serta dengan meramaikan rangkaian kegiatan tersebut.

**Gambar 9. Pamflet Festival Kampung Pelangi**



Sumber : Informan, Ibu Handini

Pada prosesnya, konsep festival Kampung Pelangi ini melalui penuturan Bu Handini dimulai oleh para Pokdarwis yaitu Pak Erwin yang pada saat itu selaku wakil ketua dan Bu Handini sebagai Bendahara yang memberikan ide untuk mengadakan festival tersebut sebagai rasa syukur dan timbal balik kepada kampung dengan memberikan suatu kegiatan. Kemudian saat dikumpulkannya dengan para anggota pokdarwis, ketua menyangkal untuk diadakannya festival kampung pelangi karena rincian anggaran pasti akan besar dan tidak ada dana yang masuk. Namun sesuai kesepakatan, festival tersebut akan tetap direncanakan dan ide-ide perlombaan pun disarankan oleh beberapa anggota pokdarwis. Melalui penuturan Ketua Pokdarwis :

*“Memang pada saat itu kami para pokdarwis berkumpul di balai untuk merencanakan festival kampung pelangi sebagai bentuk keberadaannya. Pro-kontra terjadi dengan ketua pada saat itu karena ketakutannya pada*

*dana. Tetapi pokdarwis yang lain tidak masalah dan tetap mau merencanakannya dan akhirnya kami semua berbagi ide untuk perlombaan yang kemudian di rincikan terkait dana yang dibutuhkan oleh Bu Handini pada saat itu”(Woko,2023).*

Anggaran yang dirincikan memang cukup besar, melalui penuturan Bu Handini yaitu sekitar 150 juta. Para pokdarwis pun berkumpul lagi, dan ketua lepas tangan karena masih tidak setuju dan merasa acara tidak akan berhasil karena dana dan kebutuhan yang cukup besar untuk membuat acara seperti itu.

*“Saat rincian anggaran saya paparkan ke para pokdarwis, ketua pun pada saat itu memandang bahwa acara ini tidak akan berhasil dengan menanyakan apakah acara ini bisa dilakukan? Karena memang anggaran saat itu cukup besar, tetapi pengurus yang lain tetap mau berusaha sehingga kami tetap mengusahakannya meskipun tanpa ketua” (Handini, 2023)*

Penuturan Bu Handini juga didukung oleh ketua Pokdarwis

*“Ketika sudah sepakat merencanakan acara itu, kami berbagi tugas. Salah satunya partisipasi yang saya lakukan adalah menyebarkan proposal acara untuk mencari dana. Kebetulan saat itu ada anak KKN dari UNDIP yang membantu membuat proposal, namun yang menyebarkan tetap anggota. Bu Handini dan teman-teman yang lain menyebarkan pamflet melalui sekolah-sekolah, media sosial dan media cetak koran. Akhirnya ada pihak-pihak swasta yang ikut andil. Seperti perusahaan cat, bank-bank, brand kosmetik, brand makanan-minuman, dan pihak lainnya” (Woko,2023).*

Pelaksanaan kegiatan tersebut lancar meskipun tanpa andil ketua. Festival Kampung Pelangi ini sebagai salah satu program yang dibuat dan dilaksanakan Pokdarwis dengan bentuk masih eksisnya Kampung Pelangi. Perlombaan pun pada saat itu banyak diikuti oleh masyarakat umum dan sangat ramai. Menurut penuturan Bu Handini dan Pak Woko, festival ini sebagai puncaknya keberadaan Kampung Pelangi karena acara yang sukses dan kompak para pokdarwis dalam mendukung acara. Seperti perlombaan mewarnai banyak diikuti anak-anak SD di Kota Semarang, perlombaan membuat lumpia oleh Ibu-Ibu PKK Kota Semarang, lomba memancing oleh masyarakat Kota Semarang, lomba fotografi dan mural yang juga banyak diikuti oleh para seniman-seniman yang bahkan dari luar kota seperti Jogja, Solo. Hingga acara selesai pun, ketua pokdarwis pada saat itu melalui penuturan Bu Handini dan Pak Woko tidak menampakkan diri. Sedangkan

harapannya walaupun tidak bisa support dana, mereka mengharapkan ketua bisa mengayomi dengan support dukungan ataupun penyaluran ide-ide dan tidak hanya langsung pesimis akan keadaan.

Struktur Pokdarwis semakin tidak stabil setelah masa transisi Covid-19 yang juga menjadi kendala pengembangan objek wisata. Melalui penuturan Ibu Handini, para Pokdarwis Kampung Pelangi mendukung struktur pengurus pokdarwis perlu direkonstruksi mengingat kejadian di lapangan terkait pengembangan Kampung Pelangi yang tidak terimplementasi dengan baik. Beberapa dari warga setempat pun menanyakan keberlangsungan Kampung Pelangi, karena ketika destinasi wisata yang lain membumi kembali setelah Covid-19. Namun Kampung Pelangi malah semakin redup. Adanya kesamaan rasa bahwa ketua pokdarwis dirasa acuh pada perkembangan Kampung Pelangi. Namun, pada dasarnya Bu Handini serta pokdarwis maupun masyarakat lainnya tidak memiliki kekuasaan dalam perubahan kepengurusan Pokdarwis.

Pada perjalanannya, Kampung Pelangi diharapkan oleh Dinas Pariwisata sebagai destinasi yang harus bisa memanfaatkan potensi daerahnya. Namun melalui penuturan Pak Taufiq selaku Dinas Pariwisata, merasa Pokdarwis pun masih belum faham betul apa itu pokdarwis dan fungsinya sebagai mitra pemerintah sekaligus motor penggerak. Meskipun program bersikap *top down* yang mulanya dari pemerintah, tapi karena bentuknya sebagai kampung wisata sudah seharusnya bergerak melalui swadaya dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada sesuai SK Pokdarwis. Menurut penuturannya, kendala internal antara pokdarwis juga menjadi salah satu masalah terhambatnya program pengembangan. Karena berbagai komunikasi tidak tersampaikan dengan baik. Seperti halnya ketika ada tamu wisatawan, acara perlombaan Pokdarwis, serta pelatihan-pelatihan yang seharusnya bisa direalisasikan kepada Pokdarwis lain namun tidak tersampaikan.

*“Saya itu juga bingung, ketuanya Pak Slamet saat itu dihubungi sangat susah, tidak pernah terlihat juga. Sebenarnya dari dinas itu sudah membantu melalui pembinaan yang melibatkan Pokdarwis seluruh Kota Semarang untuk mendapatkan pelatihan yang diharapkan bisa diaplikasikan di lokasi. Pada saat itu ada tamu dari mancanegara juga tidak bisa dihubungi akhirnya saya menghubunginya ke Bu Handini dan memang saat ada tamu tidak terlihat. Padahal itu masa-masa pariwisata sudah aktif kembali di Desember 2022 akhir” (Taufiq,2023).*

Penuturan tersebut didukung oleh Ibu Handini

*“Saya pikir waktu masa transisi Covid-19, ketuanya Pak Slamet akan muncul mba, ternyata juga tidak muncul. Benar-benar dari awal tidak berkontribusi dengan perannya sebagai ketua. Malah saya yang sering dihubungi dari dinas. Biasanya Pak Woko juga yang malah dihubungi. Waktu itu ada tamu dari mancanegara orang-orang Australia dan saya di telfon itu jam 11 malam dari dinas, karena ternyata dari pagi Pak Ketua tidak bisa dihubungi. Dari situ saya langsung menghubungi ibu-ibu PKK untuk besoknya membuat kalungan bunga buat menjamu tamu. Dan pagi-pagi itu anak-anak udah repot latihan jatilan juga. Tapi kita juga untungnya dibantu dari dinas untuk peralatan yang kurang seperti meja, vas bunga”*(Handini,2023)

Berbagai kejadian internal di kepengurusan Pokdarwis yang menjadi salah satu penghubung pemerintah dan masyarakat setempat menjadi terhalang untuk implementasinya. Pak Taufiq pada akhirnya setelah semakin yakin pada peristiwa lomba Pokdarwis sekitar Januari 2023, akhirnya mendesak Pak Lurah untuk rekonstruksi pengurus. Pak Taufiq selaku pengawas dan pembina dari Dinas Pariwisata juga menyimpulkan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi, bahwa Pokdarwis belum benar memahami fungsinya apa itu Pokdarwis sesungguhnya. Saat kepengurusan tidak stabil pun Pokdarwis yang muncul hanya itu-itu saja dan tanpa figur kepemimpinan ketua yang juga menghilang. Sehingga program-program pengembangan kampung pelangi pada fase-2019-2022 akhir mengalami kekosongan.

#### **D. Adaptasi Dalam Pelaksanaan Program Pengembangan Kampung Pelangi**

Perubahan lingkungan pembangunan di Kampung Gunung Brintik menghasilkan perubahan yang positif dalam segi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Ketika Kampung Pelangi didirikan, penduduk Kampung Gunung Brintik mulai beradaptasi dengan perubahan lingkungan baru, terutama dengan banyaknya kunjungan penduduk Semarang dan sekitarnya yang datang untuk melihat perubahan permukiman di Kampung Pelangi. Program Kampung Pelangi yang menciptakan tema warna-warni oleh pemerintah Kota Semarang memberikan identitas baru sebagai salah satu tujuan wisata di pusat Kota Semarang. Perubahan lingkungan yang lebih baik dan menarik ternyata memiliki efek positif pada aspek-aspek kehidupan lainnya.

Salah satu cara masyarakat beradaptasi dengan pembangunan Kampung Pelangi adalah melalui pelaksanaan berbagai kegiatan terkait lingkungan di kampung tersebut. Dalam hal ini, kegiatan fisik menjadi yang paling menonjol. Awalnya, konsep pewarnaan warna-warni diterapkan di sekitar Kampung Gunung Brintik, kemudian masyarakat mulai menghias rumah mereka dengan tema warna-warni dan meningkatkan kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan. Usaha ini dimulai dengan mengurangi kebiasaan membuang sampah sembarangan di wilayah Kampung. Sebelumnya, warga Kampung Gunung Brintik cenderung tidak peduli dengan kebersihan, karena mereka seringkali membuang sampah sembarangan di depan rumah atau di lorong antara rumah-rumah, dan juga sering menumpuk barang-barang yang tidak berguna di depan rumah.

Dengan adanya inisiatif dari pemerintah, masyarakat Kampung Gunung Brintik mulai menyadari manfaat lingkungan yang bersih dan sehat. Melalui pengalaman yang disampaikan oleh Pak Woko saat kampungnya direnovasi, warga mendapat pengarahannya untuk membuang sampah pada tempat pembuangan sementara yang terletak di sepanjang Pasar Bunga Kalisari. Sebelumnya, kebiasaan warga adalah membuang sampah secara sembarangan, termasuk membuang sampah rumah tangga ke kali. Praktik ini menjadi salah satu faktor mengapa Kali Semarang di depan wilayah Kampung Gunung Brintik sebelumnya penuh dengan sampah dan memiliki bau yang tidak sedap. Selain upaya dari kelurahan dan pemerintah Kota Semarang dalam menyosialisasikan kebersihan lingkungan wisata, kesadaran masyarakat juga mulai timbul ketika wisatawan mulai mengunjungi Kampung Pelangi. Hal ini diakui oleh penuturan salah satu warga :

*“Semenjak kampungnya berubah dan jadi tempat wisata itu banyak pengunjung, saya dan warga sekitar jadi lebih perhatian terhadap kebersihan sekitar mba, kan kampungnya udah terkenal menjadi berwarna-warni dan bersih jadi merasa malu dan kasihan kalau mereka sudah jauh-jauh ingin berkunjung malah melihat Kampung Pelangi ternyata kotor dan tidak nyaman” (Prih,2023).*

Kesadaran akan kebersihan lingkungan juga dirasakan oleh Ibu Handini selaku Pokdarwis yang melihat warga sekitar sangat mendukung perubahan kampungnya, Bu Handini menuturkan dengan kesempatan perhatian dari pemerintah sebagai kampung wisata, warga sangat senang karena wilayah jadi indah, sungai menjadi bersih dan rumah-rumah dibenahi. Tidak sedikit juga dengan adanya

pembangunan Kampung Pelangi masyarakat pada saat itu mulai memanfaatkan kondisi tersebut untuk mencari peruntungan. Keberadaan kampung wisata memiliki potensi untuk menciptakan peluang pekerjaan dan berperan penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat dengan *multiplier effect* yang signifikan, terutama saat kunjungan wisatawan meningkat. Dampak dari kegiatan pariwisata ini menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan UMKM di kampung tersebut. Berbagai jenis usaha pendukung pariwisata seperti makanan dan minuman tradisional seperti jamu, kripik-kripik, angkringan, es pelangi, serta berbagai cenderamata seperti kaos, gantungan kunci, dan sebagainya menjadi semakin hidup. UMKM ini mendapatkan keuntungan dengan memenuhi kebutuhan wisatawan yang membutuhkan makanan dan minuman saat mereka menjelajahi Kampung Pelangi. Karena trek menuju kampung tersebut cukup panjang dan menanjak, wisatawan dengan mudah merasakan kelelahan dan membutuhkan makanan dan minuman untuk menghilangkan kelelahan tersebut. Didukung melalui penuturan warga:

*“Dulu di gang 5-6 itu banyak angkringan-angkringan yang buka, terus ya warga-warga jualan makanan dan minuman di depan rumah. Dulu rame banget mba waktu viral. Apalagi jalannya ini kan bukit naik-naik, wisatawan itu juga menyusuri gang-gang dan emang pada nongkrong di angkringan itu buat istirahat sebentar. Kalau dari gang 5 itu Ibu Masinah bedagang angkringan gitu dapet Rp. 300.000 per hari mba, membantu juga soalnya ibu rumah tangga”* (Ratna, 2023)

Kreasi UMKM yang lain berupa cenderamata seperti kaos, gantungan kunci, pembuatan tisu dari bungkus limbah, vas bunga, tas dari bungkus-bungkus limbah, kerajinan bunga kertas yang bermanfaat bagi warga setempat untuk dijual dan bisa menambah pemasukan bagi warga sendiri menjadi hidup dari pelatihan pemberdayaan masyarakatnya yang di programkan Pokdarwis untuk warga setempat khususnya ibu-ibu rumah tangga. Warga juga senang banyak pengunjung yang datang, mereka pun senang bisa berfoto-foto dengan turis, mengajarkan turis dengan berbagai kerajinan tangan yang mereka beli juga.

Dampaknya mulai terasa oleh masyarakat sekitar yang sebelumnya tidak memiliki mata pencaharian, terutama para ibu rumah tangga. Proses pembuatan kerajinan tangan yang dapat dijual kepada wisatawan telah menjadi sumber pendapatan yang memanfaatkan potensi ekonomi di daerah tersebut, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Secara ekonomi,

pariwisata memberikan efek positif pada perekonomian masyarakat lokal, menciptakan peluang kerja dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pengembangan Kampung Pelangi diharapkan dapat meningkatkan standar hidup masyarakat dan mendukung perkembangan ekonomi daerah setempat. Hal ini menjadi dasar utama untuk melanjutkan program pengembangan Kampung Pelangi.

Adanya interaksi antara penduduk Kampung Pelangi dan para wisatawan telah menghasilkan perubahan dalam sikap sehari-hari masyarakat. Awalnya, warga Kampung Wonosari jarang berinteraksi dengan orang-orang di luar kampung. Namun, sejak adanya Kampung Pelangi, masyarakat mulai menunjukkan sikap yang ramah dan memberikan informasi kepada para wisatawan. Masyarakat Kampung Pelangi saat ini aktif berinteraksi dengan para wisatawan dan dengan senang hati memberikan informasi tentang rute dan atraksi wisata di kampung tersebut. Seiring waktu, Kampung Wonosari telah terkenal sebagai salah satu destinasi wisata yang terletak di pusat Kota Semarang

Secara keseluruhan, warga setempat tidak mengekspresikan kekhawatiran terhadap dampak negatif sosial budaya yang mungkin timbul akibat pengembangan Kampung Wonosari sebagai Kampung Pelangi. Temuan mengenai persepsi terhadap dampak sosial budaya menunjukkan bahwa pembangunan awal Kampung Pelangi di Semarang berhasil meningkatkan kualitas hidup penduduk. Pengembangan Kampung Pelangi mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas perumahan dan infrastruktur di kampung tersebut. Peningkatan kualitas permukiman dilakukan untuk mendukung pariwisata di Kampung Pelangi agar objek wisata tersebut semakin berkualitas. Akibatnya, wisatawan lebih mudah untuk berkunjung, dan hal ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan pariwisata.

Pada awal pembangunan Kampung Gunung Brintik menjadi Kampung Pelangi, masyarakat setempat merasa memiliki kesempatan untuk rekreasi yang baru. Pemukiman yang sebelumnya kumuh telah berubah menjadi tempat yang menarik untuk dinikmati sebagai lokasi rekreasi oleh warga. Selain itu, kedatangan wisatawan juga memberikan hiburan bagi penduduk setempat dan menghilangkan rasa jenuh. Perkembangan pariwisata berdampak pada destinasi tersebut. Kegiatan pariwisata membantu dalam melestarikan budaya lokal melalui pengembangan kegiatan budaya yang dilakukan oleh penduduk setempat yang ditujukan untuk wisatawan. Masyarakat

merasakan bahwa berbagai kegiatan budaya, seperti kerajinan dan seni di Kampung Pelangi Semarang, telah berkembang sejak Kampung tersebut dikembangkan menjadi Kampung Wisata. Sebagai contoh, grup jathilan merupakan salah satu bentuk seni yang dikembangkan di kampung ini. Meskipun demikian, tetap diperlukan pendampingan dalam hal pemasaran kerajinan warga dan seni.

Setelah melewati tahun 2019, program-program tersebut seperti UMKM souvenir dan peruntungan melalui berdagang makanan dan minuman sudah tidak terlaksana dan meredup. Hal ini dikarenakan para wisatawan yang sudah tidak datang. Adapun hanya wisatawan mancanegara ataupun beberapa wisatawan lokal. Sedangkan hidupnya berbagai aktivitas di Kampung Pelangi melalui kegiatan aktif masyarakatnya terbukti mendorong perekonomian masyarakat lokalnya dan memperindah kampungnya menjadi salah satu destinasi pariwisata. Kegiatan yang masih aktif saat ini adalah kesenian jathilan.

Pada masa transisi Covid-19, setelah suatu acara sukses yaitu Festival Kampung Pelangi, perkembangan Kampung Pelangi sempat vakum karena adanya situasi global. Eksistensinya berusaha kembali menyeimbangi objek pariwisata yang lain dengan ketidakstabilan Pokdarwis pada saat itu di tahun 2022. Respon masyarakat terkait Kampung Pelangi yang tidak ikut membumi turut mempertanyakan mengapa tidak bisa ramai lagi seperti dahulu kala. Warga yang berjualan angkringan pun sudah tutup karena sepi pengunjung. Namun, manfaat yang masih bisa dirasakan warga adalah dengan adanya pelatihan yang sempat diberikan oleh Bu Maryati selaku anggota Pokdarwis Kampung Pelangi oleh dorongan Bu Handini menjadikan warga-warga yang mayoritas ibu rumah tangga memiliki penghasilan sampingan yaitu membuat bunga papan yang disetorkan ke Pasar Bunga Kalisari di depan kampung. Didukung penuturan warga :

*“Sehabis covid memang kampung pelangi tidak aktif lagi ya mbak, kalau untuk efeknya terhadap saya tidak berpengaruh besar secara individu karena ya memang dibentuknya kampung pelangi untuk memperbaiki lingkungan. Kalau untuk pelatihan mandiri dengan ibu PKK memang sudah tidak ada, sekarang warga secara mandiri membuat kerajinan bunga papan yang pernah dilatih bersama saat dulu diperjualkan juga untuk wisatawan, namun saat ini sudah sepi wisatawan akhirnya secara individu pada disetorkan ke pasar bunga di depan dan bisa menghasilkan yang sekiranya menambah untuk dana sampingan.”(Prih,2023)*

Penuturan tersebut juga didukung oleh warga serupa

*“Masa selesai covid memang belum aktif lagi kampung pelangi. Tapi dari pelatihan ibu-ibu PKK dulu kami rata-rata RW 03 bisa mendapat manfaat membuat kreativitas tangan yaitu bunga papan terus disetor ke pasar bunga kalisari. Untuk upahnya tidak mesti stabil paling sehari Rp. 100.000 – 200.000 sudah alhamdulillah”*(Dani,2023).

Berjalannya masyarakat secara individu memang menjadi manfaatnya sebagai salah satu sumber daya yang kreatif. Namun dengan bunga papan tersebut belum terimplikasi kepada efek Kampung Pelangi agar bisa dikenal lagi sebagai destinasi wisata dan bermanfaat bagi seluruh elemen Kampung Pelangi. Pemerintah Kota Semarang membangun Kampung Pelangi selain untuk meningkatkan makna fisik kawasan dengan pengecatan bangunan dan lingkungan untuk membentuk keharmonisan, keserasian lingkungan dan keindahan kota juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Kampung Pelangi. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya manusia yang ada merupakan salah satu faktor utama dalam pengembangan Kampung Pelangi. Dimulai dengan pembangunan kesadaran akan pola pikir dan ekonomi masyarakat Kampung Pelangi supaya menjadi lebih mandiri dan kreatif. Hal ini harus dibuktikan kembali dengan adanya usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Pelangi.

Sebagai unsur pelaksana, melalui penuturan dari beberapa informan warga setempat, pengetahuan masyarakat Kampung Pelangi mengenai tujuan dibangunnya Kampung Pelangi oleh Pemerintah Kota Semarang tidak menyeluruh, bahkan mereka hanya sekedar tahu. Hal ini terjadi karena masyarakat menganggap tujuan dibangunnya Kampung Pelangi oleh Pemerintah Kota Semarang bukan hal yang penting untuk di dipahami, mereka lebih cenderung menerima program yang diberikan oleh Pemerintah, asalkan tidak merugikan mereka. Seperti halnya pada perubahan lingkungan yang mereka rasakan menjadi bersih dan terbaiki secara fisik. Pemahaman mereka hanya sebatas menerima tanpa faham jika seharusnya warga setempat juga menjadi subjek pengembangan Kampung Pelangi dengan menjaga kebersihan itu, serta memberikan ide-ide dan mengaplikasikan melalui suatu kegiatan untuk menarik potensi wisata di Kampung Pelangi.

Bentuk dukungan dan partisipasi aktif dari warga setempat adalah turut sertanya membantu kegiatan ketika ada wisatawan asing yang datang. Seperti halnya ikut bersih-bersih ketika diberikan informasi wisatawan mancanegara yang datang.

Mereka juga menahan kebiasaannya dulu terkait mencuci dan menjemur di depan rumah agar tidak terlihat bergelantungan pakaian di depan rumah. Warga setempat di Kampung Pelangi adalah para pelaksana sekaligus indikator sumberdaya, karena mereka sebagai subjek sekaligus objek pengembangan Kampung Pelangi. Oleh karena itu pembangunan kepariwisataan di Kampung Pelangi harus memperhatikan posisi, potensi dan peran masyarakat baik sebagai subjek maupun objek yang dapat menjadi penerima manfaat pengembangan, karena dukungan masyarakat lokal turut menentukan keberhasilan jangka panjang pengembangan kepariwisataan.

**BAB V**  
**INTERAKSI ANTAR AKTOR KEBIJAKAN DAN ANALISIS DAMPAK**  
**DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM**

**A. Pemetaan Para Pihak Yang Terlibat Dalam Implementasi**

Wilayah dengan potensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Pengembangan pariwisata ini tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial semata, tetapi juga memprioritaskan aspek keagamaan, pendidikan, budaya, lingkungan hidup, serta ketentraman, ketertiban, dan kenyamanan. Peraturan yang menjadi dasar pengembangan destinasi wisata ini tidak hanya memberikan manfaat bagi pemerintah, tetapi juga bertujuan untuk memberdayakan masyarakat sekitar agar dapat mengembangkan potensi mereka. Keberadaan Kampung Pelangi sebagai objek wisata sesuai dengan tujuan kebijakan yang tercantum dalam SK Pokdarwis, diharapkan dapat menjadi peluang bagi penduduk setempat untuk mengembangkan potensi ekonomi kreatif yang dapat memenuhi kebutuhan hidup dan kampung mereka.

Kampung Wisata Pelangi adalah sebuah destinasi wisata buatan yang dapat dilihat dari seberapa baik kerjasama yang terbangun di dalamnya. Ini berarti bahwa kerjasama yang terjalin antara berbagai aktor yang terlibat dalam pembangunan Kampung Pelangi, seperti pemerintah, CSR, Pokdarwis, dan warga setempat, perlu dipertimbangkan sejauh mana tanggung jawab atau tugas yang telah mereka jalankan. Menurut teori Implementasi Kebijakan Grindle, kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat juga perlu dipertimbangkan dalam suatu kebijakan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan dan evaluasi program serta mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin terjadi. Dalam konteks pengembangan Kampung Pelangi, indikatornya dapat dilihat dari sosialisasi program pengembangan tersebut. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi para aktor yang terlibat dalam program pengembangan kampung wisata Pelangi melibatkan sosialisasi berbagai program yang diusulkan sebagai salah satu strategi untuk mencapai tujuan program, yaitu peningkatan kepariwisataan dan kesejahteraan ekonomi lokal masyarakat setempat.

## **1. Pokdarwis dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**

Dalam melancarkan suatu tujuan program, terdapat *Stakeholder* kunci, merupakan *stakeholder* yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan. *Stakeholder* kunci yang dimaksud adalah unsur eksekutif sesuai levelnya, *legislative*, dan instansi. Adanya *stakeholder* kunci untuk suatu keputusan suatu proyek level daerah. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai salah satu OPD Kota Semarang sebagai *stakeholder* kunci dalam keberhasilan suatu tujuan yang telah diharapkan.

Dengan posisinya sebagai lembaga pemilik kekuasaan, Dinas Pariwisata memiliki kekuasaan dalam mengesahkan struktur Pokdarwis yang baru. Ketika berbagai dorongan untuk mengesahkan struktur baru dari Pokdarwis ke Kelurahan, tidak ada respon apapun. Namun ketika Dinas Pariwisata yang mendorong Kelurahan Randusari, perubahan struktur tersebut terjadi. Hal ini dilakukan Dinas Pariwisata karena melihat posisi Kampung Pelangi yang sudah masuk dalam kunjungan wisata mancanegara membuat Dinas Pariwisata memang memiliki perhatian khusus dalam pengembangannya. Oleh karena itu, dengan komposisi struktur yang semakin tidak kondusif peran dinas pun secara khusus adalah Pak Taufiq, mendesak Pak Lurah sebagai pemilik wilayah sekaligus penasihat wilayah untuk mengkomunikasikan dengan Pokdarwis Kampung Pelangi terkait perubahan ketua dan anggotanya yang memang benar-benar bisa diajak untuk berkembang.

Dinas Pariwisata memiliki kekuasaan dalam pengesahan perubahan struktur Pokdarwis. Sebelum memutuskan untuk dirubah, Dinas Pariwisata semakin membangkitkan semangat dari Pokdarwis untuk mengembangkan Kampung Pelangi ditengah-tengah komposisi struktur organisasi yang tidak stabil. Menurut penuturan Bu Handini dan Pak Woko, mereka sebagai Pokdarwis sudah sempat memberikan aspirasi untuk mengganti struktur organisasi Pokdarwis agar Kampung Pelangi bisa lebih berkembang. Dari beberapa masyarakat pun yang bukan Pokdarwis, juga sudah menanyakan bagaimana perkembangan Kampung Pelangi yang menjadi redup setelah masa transisi Covid-19. Dinas Pariwisata masih memantau perkembangan Pokdarwis dan memberikan kesempatan untuk Pak Slamet sebagai ketua saat itu untuk nampak di permukaan. Dinas mengikutsertakan Pokdarwis Kampung Pelangi dalam perlombaan Pokdarwis se-Kota Semarang berlokasi di TBRS. Dinas sudah memfasilitasi namun

Pokdarwis Kampung Pelangi tidak hadir dan membuat Pak Taufiq meyakini harus adanya restruktur pengurus :

*“Saya kan sebagai kepala kelembagaan dan secara langsung berurusan dengan Kampung Pelangi. Dari kejadian-kejadian dan informasi sebelumnya Pak Slamet itu memang tidak nampak di berbagai kegiatan. Tapi sebelum meyakini perubahan anggota, saya memberikan kesempatan untuk melihat keseriusannya, tetapi juga tidak ada pembuktian. Saat itu di TBRS Januari 2023 ada loma pokdarwis Kampung Pelangi malah tidak ada yang datang. Padahal kami sudah memfasilitasi tenda dan snack. Saya pinginnya mereka hadir itu biar menunjukkan kalau Pokdarwis Kampung Pelangi itu masih ada dan masih mau berkembang tapi malah tidak datang. Dan akhirnya yang datang itu malah PKK Kampung Pelangi nya dan hanya menampilkan UMKM tidak kesenian jatilannya. Itu saja dari saya yang mendesak pak lurah, akhirnya pak lurah yang menghubungi Bu Handini. Karena memang yang paling aktif itu Bu Handini dan Pak Woko. Ketuanya Pak Slamet saat itu malah menghilang. Akhirnya dari kejadian itu saya menghendaki untuk perubahan pengurus anggota baru” (Taufiq,2023).*

Pola interaksi yang terjalin dengan Dinas Pariwisata adalah sikap Pokdarwis yang memberikan usulan kepada Dinas untuk mengesahkan adanya pemberian karcis sebagai tanda masuk di Kampung Pelangi. Dengan karcis itu paling tidak sebagai dana masuk kas Kampung Pelangi. Namun sampai saat ini belum disetujui oleh Dinas. Pada saat 2017 ramainya Kampung Pelangi, karena tidak ada karcis akhirnya beberapa pokdarwis dengan warga setempat setiap gang mencari peruntungan melalui biaya parkir. Melalui penuturan Pak Bugi :

*“Saya itu menyayangkan sejak dulu awal viral sampai sekarang dinas itu tidak mau mengesahkan adanya karcis masuk. Padahal dari situ bisa lumayan pemasukannya. Saya saja dulu akhirnya mengajak warga setempat setiap gang untuk mencari peruntungan lewat jaga parkir ya lumayan dapetnya 8 gang bisa dapat 5 jutaan. Itu dibagi per individu yang jaga dan sisanya masuk ke kas Kampung Pelangi” (Bugi,2023).*

Melalui Hasil observasi peneliti dilapangan, relasi yang dibuat oleh dinas pariwisata dan kebudayaan dengan Pokdarwis Kampung Pelangi sebagai sasaran pengembangan Kampung Pelangi adalah memberikan alokasi kegiatan-kegiatan pelatihan yang anggarannya telah di alokasikan dari pemerintah pusat. Kegiatan-kegiatan pelatihan ini tentunya sebagai suatu aktivitas sebagai perwujudan dukungan pemerintah dalam kelancaran implementasi masyarakat di lapangan. Pelatihan-pelatihan ini mencakup pengelolaan homestay, pengelolaan deswita, inovasi dan

higenitas sajian kuliner, branding dan pemasaran. Melalui penuturan Pak Taufiq selaku divisi kelembagaan dinas pariwisata dan kebudayaan, pelatihan ini diberikan kepada seluruh Pokdarwis Kota Semarang termasuk Pokdarwis Kampung Pelangi. Kegiatan pelatihan ini diberikan 3 bulan sekali dengan rentang waktu pelatihan lima hari dan fasilitas penginapan, makan dan tentunya mentor yang sudah ahli dalam bidangnya.

Interaksi yang terjadi oleh dinas pariwisata dengan Pokdarwis Kampung Pelangi adalah sebagai fasilitator dalam pengembangan Kampung Pelangi. Kampung Pelangi sebagai salah satu rangkaian destinasi wisata yang telah dikenal di mancanegara memiliki perhatian khusus dan harapan besar bagi Kampung Pelangi menjadi destinasi wisata buatan yang berkembang lebih besar dan bermanfaat bagi masyarakat lokal. Menurut Penuturan Pak Taufiq :

*“Harapan besar bagi dinas pariwisata agar Kampung Pelangi yang telah direnovasi bisa berkembang menjadi destinasi wisata yang tidak hanya menambah referensi pariwisata di Kota Semarang namun juga posisi SDM nya yang semakin kreatif dan berinovasi untuk kampung wisatanya. Sebenarnya kami itu sangat perhatian dengan Kampung Pelangi, karena prosesnya dari konflik internal pengurus pokdarwis, komunikasi yang kurang baik, hingga memaksimalkan pelatihan dengan memberikan posisi lebih kepada kampung pelangi. Biasanya pelatihan itu kami informasikan untuk dikirim Pokdarwis 2-3 orang. Namun untuk kampung pelangi adalah 5 orang. Harapannya ya mereka bisa betul-betul paham makna Pokdarwis dan potensi Kampung Wisata. Ini juga sebagai bentuk menguatkan kelembagaan masyarakat itu sendiri juga yaitu Pokdarwis agar saling belajar dan membahu” (Taufiq, 2023).*

Interaksi yang diberikan pemerintah kepada Pokdarwis Kampung Pelangi memang dirasakan oleh Para Pokdarwis. Dinas sigap ketika mereka membutuhkan bantuan. Seperti halnya adalah support untuk peningkatan potensi budaya yaitu kesenian jatilan yang mana biaya pelatihan di fasilitasi oleh anggaran pemerintah. Terlebih lagi bentuk dukungannya adalah memberikan upah tampilan kepada anak-anak di Kampung Pelangi yang menyuguhkan tarian tersebut untuk semakin membangkitkan semangatnya. Bantuan fisik berupa papan gapura di Kampung Pelangi, perbaikan pedestrian, fasilitas MCK di lokasi atas Kampung Pelangi, pemeliharaan cat yang sudah ke tiga kali ini dipoles ulang menggunakan anggaran pemerintah. Padahal yang diharapkan pemerintah, dengan adanya pelatihan-pelatihan yang diberikan dapat membuka ide serta potensi Pokdarwis untuk menggali

hal menarik di kampungnya agar menarik para investor sehingga sumber dana untuk kebutuhan sarana dan prasarana kampung tidak bergantung pada pemerintah.

Pola koordinasi yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selain melalui pelatihan adalah kegiatan “sinau bareng.” Menurut penuturan Pak Taufiq, kegiatan ini mengumpulkan Pokdarwis se-Kota Semarang dengan agenda bertukar ilmu-ilmu mengenai kepariwisataan. Kegiatan ini dilakukan 3 bulan sekali selama 1 hari diluar rangkain kegiatan pelatihan. Kegiatan sinau bareng ini dicetuskan oleh Dinas Pariwisata di Kota Semarang untuk memenuhi kebutuhan dalam melancarkan tujuannya yaitu dalam meningkatkan kesadaran Pokdarwis sebagai mitra pemerintah sekaligus penanggungjawab di wilayah nya akan potensi lokal yang ada untuk dijakan peningkatan ekonomi lokal. Kegiatan sinau bareng ini biasanya berlokasi di Desa/Kampung wisatanya yang maju. Harapannya bisa bertukar ilmu dalam melaksanakan aksinya untuk mengembangkan objek wisata yang tentunya tidak lepas dari para Pokdarwis yang saling bergandengan dalam menggali potensi-potensi daerahnya. Baik saat pelatihan maupun program kegiatan sinau bareng ini, dinas pariwisata tidakhenti mensosialisasikan bahwa Pokdarwis sebagai kapasitas dan kompetensi pelaksanaan suatu program kebijakan.

Selain dinas pariwisata yang sebagai OPD di Kota Semarang dalam mewujudkan pengembangan kampung pelangi sebagai destinasi wisata yang berkelanjutan, berbagai OPD lain juga turut serta dalam pengembangan Kampung Pelangi. Dinas Lingkungan Hidup yang sampai saat ini masih bekerjasama membantu Kampung Pelangi untuk revitalisasi sungai yang ada di depan kampung. Karena pada perencananya, sungai tersebut akan dibuat wisata air. Dinas Pekerjaan Umum dibantu juga dengan Dinas Lingkungan Hidup masih sering mensterilkan sampah-sampah yang ada di Kampung Pelangi, karena dari masyarakat sendiri pun mulai hilang sikap kesadarannya dalam menjaga lingkungan. Dinas perikanan yang setiap minggunya menyetorkan ikan di depan sungai kampung Relasi juga terjalin dengan dinas perdagangan karena kampung pelangi berhimpitan di belakang kios pasar bunga kalisari yang mana hubungan intensif para pemilik kios yaitu dengan dinas perdagangan. Dinas perdagangan sering menegur para pemilik kios untuk tetap menjaga kebersihan kiosnya, agar wisatawan yang datang melihat lokasinya cantik, bersih serta terurus. Karena pada posisinya pasar bunga kalisari sebagai garda depan

untuk masuk ke Kampung Pelangi, sehingga keindahan tetap perlu dikontrol dan dijaga.

Pokdarwis dan masyarakat Kampung Pelangi sebagai kesatuan dalam proses pengembangan Kampung Wisata Pelangi. Mereka harus diberdayakan sebagai penentu utama dalam proses pengambilan keputusan, yaitu melibatkan masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat. Masyarakat yang terkait dengan kegiatan tersebut merujuk kepada seluruh warga Kampung Pelangi yang diidentifikasi sebagai penerima manfaat dan terdampak dari kegiatan tersebut. Tokoh-tokoh masyarakat adalah anggota masyarakat yang dihormati oleh warga setempat dan dianggap mampu mewakili aspirasi masyarakat setempat, khususnya dalam konteks pengembangan Kampung Pelangi, peran ini diemban oleh Pokdarwis. Sehingga aspirasi-aspirasi yang akan diberikan Pokdarwis seharusnya bisa terjalin dengan baik karena sebagai pelaksana di lapangan, Pokdarwis bisa membantu evaluasi program kedepannya.

Dalam suatu pembangunan dan pengembangan kota, figur kepemimpinan dari Pemerintah Kota terbukti memiliki kekuasaan yang mampu mempengaruhi dinas-dinas terkait. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Semarang harus mampu mengikutsertakan kolaborasi dengan berbagai OPD. Untuk keberlanjutannya Pokdarwis sebagai sasaran pengaruh terbesar untuk melanjutkan dan mengembangkan kreativitas kampungnya. Dalam urusan warga setempat tentunya Pokdarwis lah yang memiliki pengaruh besar kepada warga setempat untuk menggerakkan pengurus inti dan masyarakat setempat dalam mengembangkan kampung pelangi dalam mencapai implementasi program yang ada. Oleh karena itu, sangat penting relasi yang terjalin dengan lancar bersama para Pokdarwis.

## **2. Pokdarwis dengan Pokdarwis**

Peran Pokdarwis sangat penting bagi implementasi program pengembangan Kampung Pelangi. Mereka harus menjadi motivator masyarakat setempat dalam kesadaran pariwisata yang berfungsi meningkatkan sumber daya manusia setempat untuk mengetahui potensi daerahnya agar menjadi destinasi wisata yang bisa bermanfaat juga bagi peningkatkan perekonomian lokal. Mereka juga sebagai aktor yang saling memiliki kepentingan dan tujuan yang sama yaitu keberlangsungan program pengembangan Kampung Pelangi.

Dalam struktur organisasi tentunya peran ketua sangat penting sebagai figur berbagai koordinasi dan pergerakan anggota dibawahnya. Namun nyatanya, keberlangsungan Pokdarwis pada masa ketua Pak Slamet tidak beraturan. Tidak ada komunikasi, tidak ada evaluasi, tidak ada program mandiri, komunikasi yang terjadi malah di berbagai pintu tidak satu tuju melalui ketuanya. Sehingga semua peristiwa berjalan dengan seadanya aja bahwa Kampung Pelangi hanya menjadi suatu wisata pemukiman yang berwarna-warni. Keberadaan kerajinan-kerajinan tangan yang ada di awal juga tidak dikembangkan dan tidak berjalan lagi.

Posisi Kampung Pelangi yang sudah masuk dalam kunjungan wisata mancanegara membuat Dinas Pariwisata memang memiliki perhatian khusus dalam pengembangannya. Oleh karena itu, pada prosesnya dengan komposisi struktur yang semakin tidak kondusif peran dinas pun secara khusus adalah Pak Taufiq, mendesak Pak Lurah sebagai pemilik wilayah sekaligus penasihat wilayah untuk mengkomunikasikan dengan Pokdarwis Kampung Pelangi terkait perubahan ketua dan anggotanya yang memang benar-benar bisa diajak untuk berkembang. Melalui penuturan kepala kelembagaan Dinas Pariwisata :

*“Akhirnya dari berbagai kejadian, terlebih saat lomba pokdarwis membuat saya semakin yakin untuk memutuskan perubahan struktur. Terlebih ketuanya yang saat itu yang memang sudah tidak kooperatif. Saya menghubungi pak lurah untuk merubah anggota Pokdarwis. Tapi pada saat itu saya tidak ikut. Awal maret 2023 itu dilakukan musyawarah di Kantor Kelurahan dan akhirnya Pak Woko yang menjadi pemilik posisi ketuanya. Setelah itu baru kelurahan mengeluarkan surat pengantar kepengurusan Pokdarwis yang baru. Dan kemudian dari dinas mengesahkan SK atas kepengurusan yang baru 4 April 2023. SK nya hanya sebagai penerus saja tidak merubah apapun hanya komposisi kelembagaan Pokdarwisnya.”(Taufiq,2023).*

Penuturan Bu Handini mendukung penuturan Pak Taufiq terkait perubahan pengurus

*“Akhirnya mba, dari dinas yang punya wewenang mendorong perubahan anggota kesampean. Saya ya maunya yang memang benar-benar bergerak dan mau bangkit bersama mengembangkan kampung ini. Saat itu awal maret 2023 dikumpulkan di kantor kelurahan ada Pak Lurah, Sekertaris Kelurahan, UMKM Kelurahan Randusari, Pengurus Pokdarwis sebelumnya, dan beberapa RT yang bisa hadir di RW 3-4 Kampung Pelangi. Saat itu pemilihannya voting dan memang warga memilihnya Pak Woko. Tapi saat itu Pak Slamet sebagai ketua lama masih mengukuhkan dirinya untuk menjadi ketua. Saat ditanyakan kontribusi*

*dan plan kedepannya tidak ada tanggapan. Akhirnya Pak Woko yang menjadi ketuanya” (Handini,2023)*

Kepercayaan yang diberikan kepada Pak Woko menjadi ketua membuatnya dia semangat dalam membangkitkan Pokdarwis untung saling bersinergi. Terkait komposisi anggotanya, Pak Woko melakukan pemilihan berdiskusi dengan Pak Erwin selaku penasihat dan wakil sebelumnya serta Bu Handini sebagai tokoh pokdarwis yang paling aktif. Keanggotaan mencampurkan anggota yang lama, anak-anak muda dan pemilik kios. Pak Woko pun langsung menghampiri satu persatu untuk penunjukannya sebagai anggota. Penuturan ini didukung oleh Pak Woko

*“Saya ditunjuk sama teman-teman menjadi ketua secara vooting. Ketua sebelumnya, Pak Slamet sebenarnya masih kokoh mau menjadi ketua pada saat itu tapi teman-teman sudah tidak bisa memberikan kepercayaan lagi. Akhirnya pada tanggal 21 Maret itu surat kepengurusan yang baru dari kelurahan sudah terbuat lalu diserahkan ke dinas. Untuk pemilihan anggotanya saya memang menghampiri para orang-orang yang berperan di Kampung Pelangi untuk memberikan usulan nama keanggotaan baru. Lalu saya datangi rumahnya dan mengajak bergabung. Dari pemilihan anggota saya meminta saran tentunya dengan Bu Handini selaku tokoh yang paling aktif dalam perkembangan Kampung Pelangi dan Pak Erwin selaku wakil ketua sebelumnya yang saat ini saya jadikan penasehat. Saya juga merangkul pemilik kios untuk dimanfaatkan kreativitasnya dalam melukis mural dinding. Para anak muda juga direkrut untuk keberlangsungan branding dengan inovasi kreatif” (Woko,2023).*

Penuturan serupa juga didukung oleh Pak Bugi

*“Pada pemilihan kepengurusan baru, itu termasuk agenda yang saya tunggu-tunggu karena perlu kelompok organisasi yang saling mendukung dan perlu arahan dari ketua yang benar-benar terbuka. Saya ikut di kantor kelurahan dan memang semuanya setuju bahwa Pak Woko menggantikan posisi ketua yang baru. Memang sempat terjadi konflik karena ketua lama masih ingin pada posisinya. Namun musyawarah tetap pada vooting yang menunjuk Pak Woko. Untuk anggota-anggota pengurus yang lain saya tidak tau, setelah ketua ditetapkan akhirnya ya saya dapat nama-nama anggotanya dan saya tetap masuk menjadi Pokdarwis. Lalu sudah ada grup WA yang semoga komunikasinya berjalan lancar tidak seperti sebelumnya” (Bugi,2023)*

Pada nyatanya, harapan yang diharapkan dari Pokdarwis lain adalah saling keterbukaan dan transparansi dana. Para Pokdarwis seharusnya saling merangkul dan berkembang bersama. Melalui implementasi kebijakan Grindle, keberhasilan program bisa dikatakan berhasil melalui indikator para pelaksana dan sumber daya

yang mendukung. Pada kenyataan yang ada ternyata para pelaksana sendiri pun memiliki masalah internal yaitu komposisi kelembagaan yang tidak stabil. Harapan dari para pengurus Pokdarwis yang lain dengan struktur baru adalah keterbukaan khususnya dalam dana, informasi satu pintu, dan evaluasi terkait program pengembangan Kampung Pelangi.

Melalui penuturan Pak Bugi

*“Ya saya senang mba, kepengurusan sudah dirubah semoga komunikasi lebih berjalan lancar seperti adanya pelatihan-pelatihan dari dinas. Saya itu sempat di telfondari dinas untuk mengirimkan perwakilan dari Pokdarwis untuk mengikuti pelatihan karena saat itu ketuanya Pak Slamet tidak ada respon. Saat ada perkumpulan RW pun tidak ikut padahal ada agenda untuk membahas Kampung Pelangi. Saat ada tamu dari mancanegara, ternyata juga sempat dapat upah kunjungan dari tamu tapi tidak ada informasi dana itu kemana. Makanya saya dan teman-teman dengan pergantian ketua ini Pak Woko bisa lebih transparan”* (Bugi,2023).

Keinginan para Pokdarwis semangat agar Kampung Pelangi ramai dikenal lagi, apalagi sudah ada tamu-tamu lagi dari mancanegara. Dan yang terpenting adalah terjalannya informasi harus satu pintu. Transparansi dana juga harus ada agar rasa percaya yang hilang dulu tidak terjadi lagi. Dengan sikap ketua sebelumnya yaitu Pak Slamet yang tertutup, suka menghilang begitu saja membuat Pokdarwis lain bertanya-tanya terkait dana atau informasi yang di dapat itu seperti apa. Dan menjadi merasa tidak dianggap.

Stabilisasi dilakukan melalui himbauan Pak Woko untuk setiap pengurus Pokdarwis membuka aspirasi kepada warga setempat melalui rapat RT yang harapannya warga setempat ikut berkontribusi terkait ide-ide untuk mengembangkan Kampung Wisata. Pak Woko dan para Pokdarwis lainnya sedang mempersiapkan wisata air dengan memanfaatkan sungai yang ada di depan kampung. Rencananya akan dibuat dengan perahu karet, namun semua itu masih proses dan membutuhkan dana serta bantuan dari pemerintah untuk mengikis sungai agar lebih dalam lagi. Penegasan dalam pembagian tugas yang ada juga ditekankan oleh Pak Woko ketika pertemuan pertamanya dengan keanggotaan yang baru sekaligus pengesahan syukuran pada tanggal 21 Mei dihadiri oleh Pak Lurah, Sekertaris Kelurahan, dan para Pokdarwis serta beberapa masyarakat setempat dengan tumpengan.

Dengan merintis perkembangan Kampung Pelangi lagi, Pak Woko selaku ketua juga akan memaksimalkan perkumpulan dengan para Pokdarwis paling tidak 2 bulan sekali untuk melakukan diskusi terkait ide-ide dari masyarakat yang diserap melalui pertemuan RT atau PKK lalu dibawa ke pertemuan khusus Pokdarwis. Beliau juga merencanakan bahwa pembahasan Kampung Pelangi menjadi agenda khusus yang belum dilaksanakan di kepengurusan sebelumnya. Pembahasan tersebut nantinya akan menghadirkan Pak Lurah dan dari Dinas Pariwisata sehingga tidak digabung dalam rapat RW/RT seperti sebelumnya namun memiliki ruang khusus untuk pembahasan Kampung Pelangi agar lebih berfokus. Seperti halnya perkumpulan yang pertama kali terjadi saat kepengurusan baru bersama Pak Lurah, Sekertaris Kelurahan dan ada Pokdarwis untuk saling bertukar ide dan diskusi atas aspirasi warga setempat.

Komposisi anggota Kampung Pelangi ini juga menarik para anak-anak muda. Harapannya oleh Pak Woko dan pengurus Pokdarwis yang lain adalah, para generasi muda bisa mengimbangi kebaruan teknologi yang akan dipadukan dengan branding Kampung Pelangi. Menurut penuturan Pak Bugi:

*“Di kepengurusan ini anak-anak muda diikutsertakan. Niatnya juga mau buat profil Kampung Pelangi. Saya juga dengar-dengar nanti mau diberikan peralatan IT yang bisa dikelola para remaja Kampung Pelangi untuk mempromosikan Kampung Wisata”*(Bugi,2023)

Didukung oleh penuturan Pak Woko:

*“Strategi saya juga secara khusus menarik dan membangkitkan semangat pengurus-pengurus muda. Saya juga pinginnya nantinya ada web sendiri bukan ikut di website Pemkot. Mau membuat profil Kampung Pelangi yang bisa di shoot dari atas, soalnya kan pasti indah. Apalagi anak-anak muda yang baik dalam akademis sangat dibutuhkan untuk perencanaan ide selanjutnya, karena rata-rata disini berpendidikan dan SDM rendah”* (Woko,2023).

Dalam prosesnya, strategi Pak Woko selaku Ketua yang baru adalah mengembalikan kepercayaan para pengurus Pokdarwis agar saling bergandengan untung mengimplementasikan berbagai program. Melalui pernyataannya, beliau merenovasi dan membersihkan balai pertemuan namun belum adanya konfirmasi dari ketua yang lama terkait fasilitas kunci balai yang masih dipegang dan belum diserahkan kepada Pak Woko selaku ketua baru. Akhirnya Pak Woko membuat kunci baru sendiri untuk meminimalisir konflik. Sebagai kepengurusan baru juga Pak Woko

kembali menyebarkan proposal pengembangan Kampung Pelangi untuk menarik investor-investor swasta. Harapannya selain memberi dana bisa memberikan pelatihan-pelatihan bagi warga setempat. Seperti halnya pelatihan pemandu wisata agar bisa menggunakan dari warga setempat sendiri yang benar-benar mengenal Kampung Pelangi, tidak lagi dari tour wisata. Pelatihan-pelatihan seperti kerajinan tangan lagi untuk dikembangkan diberikan inovasi pelatihan dari akademisi ataupun LSM. Karena kalau mau dilakukan seperti pelatihan yang berbayar mereka tidak memiliki dana yang mumpuni seperti swadaya desa atau kampung wisata lainnya.

### **3. Pokdarwis dengan Masyarakat**

Pokdarwis sekaligus para warga setempat menjadi stakeholder utama yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program ataupun proyek. Mereka harus ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses pengambilan keputusan yaitu masyarakat dan tokoh masyarakat. Masyarakat yang terkait dengan kegiatan yaitu seluruh masyarakat Kampung Pelangi yang diidentifikasi akan memperoleh manfaat dan yang akan terkena dampak dari adanya kegiatan. Tokoh masyarakat merupakan anggota masyarakat yang oleh masyarakat setempat ditokohkan di wilayah itu dan dianggap dapat mewakili aspirasi masyarakat setempat yaitu para Pokdarwis dalam konteks pengembangan Kampung Pelangi.

Pokdarwis sebagai penggerak masyarakat mengimplementasikan program mandiri yang diinisiasi oleh Bu Handini pada tahun 2017 kepada masyarakat adalah mengajak mereka untuk diberikan pelatihan pembuatan souvenir. Berdasarkan penuturan Bu Handini pelatihan tersebut melibatkan anggota Pokdarwis Ibu Maryati yang sudah ahli dalam membuat souvenir sebagai tutor warga setempat yang lain. Pada saat kampung pelangi viral, Ibu PKK dikumpulkan di balai untuk melakukan pelatihan sebulan tiga kali dipimpin oleh Ibu Maryati. Didukung oleh penuturan ketua Pokdarwis yang pada saat itu sebagai divisi pengembangan.

*“Dulu Ibu-ibu itu memang ada pelatihan dengan berbagai kerajinan tangan yang akhirnya bisa diperjualbelikan seperti bungkus kopi yang menjadi tas, bunga hias, wadah tisu, gantungan kunci, pot hias. Para masyarakat, khususnya ibu-ibu rumah tangga sekiranya mendapat hal positif karena dengan kegiatan tersebut dapat mengisi waktu luang dan menambah sumber pendapatan karena nantinya barang-barang yang terjual hasilnya juga dibagikan kepada ibu-ibu PKK. Program ini pun berlangsung tanpa arahan ketua pada saat itu. Karena ketuanya itu tidak*

*ada komunikasi dan ketika dipertanyakan malah hilang mba, jadi yang bergerak ya didorong Bu Handini dan Pokdarwis yang lain ikut mendukung. Buktinya wisatawan asing juga banyak yang suka dan beli” (Woko,2023)*

Masyarakat yang memiliki usaha juga didorong untuk dipasarkan. Berdasarkan penuturan Bu Handini, UMKM masyarakat di Kampung Pelangi saat itu menjadi aktif, banyak yang mengembangkan untuk usahanya dan dijual di depan rumah ketika wisata datang. Terdapat keripik-keripik, jamu tradisional, cemilan-cemilan jajanan dari ketela, sambal, dan ada juga es pelangi. Menurut penuturan Bu Handini, untuk UMKM makanan lebih laris dijual kepada wisatawan lokal, karena terkait perbedaan selera dan lidah yang kurang cocok dengan wisatawan asing sehingga mereka kurang tertarik terhadap UMKM nya. Wisatawan mancanegara lebih tertarik pada souvenirnya. Aktivitas pemberdayaan yang ada sedang berhenti dan belum terangkat kembali. Bu Handini menyatakan butuh inovasi pembuatan kerajinan baru karena seperti gantungan kunci, tas, hiasan bunga masyarakat sudah ahli dari pelatihan yang sebelumnya. Oleh karena itu, Bu Handini sangat berharap ada pihak-pihak yang mau membantu untuk memaksimalkan potensi ide-ide kerajinan yang lain dengan melatih dan bisa dipasarkan.

Kegiatan Pokdarwis di Kampung Pelangi diprogramkan dan dilaksanakan untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pembentukan organisasi Pokdarwis. Lingkup kegiatan Pokdarwis Kampung Pelangi antara lain bersifat mengembangkan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan wawasan para anggota Pokdarwis dalam bidang kepariwisataan, yaitu berupa pelatihan-pelatihan kepariwisataan yang diberikan oleh Dinas Pariwisata. Biasanya dihubungkan melalui Pokdarwis sehingga kegiatan ini bisa disebar oleh tokoh penting masing-masing RT/RW yang nantinya akan diinformasikan kepada masyarakat melalui pertemuan rutin RT/RW.

Dengan komposisi pengurus yang baru, selain anak-anak muda, para anggota yang dilibatkan adalah warga kios pasar bunga kalisari yang juga tinggal di wilayah Kampung Pelangi RW 03/04. Harapannya, relasi bisa lebih terjalin dan mereka bisa tergerak ketika ada tamu mancanegara datang, bisa langsung menyiapkan karangan bunga. Para pemilik kios yang dimasukkan ke anggota Pokdarwis juga diharapkan bisa mengangkat wisata air di depan pemukiman. Karena pada mulanya pemilik kios

bunga kalisari memiliki perahu karet tetapi hanya untuk pribadi. Oleh karena itu digandeng menjadi anggota Pokdarwis untuk bergerak bersama dan menjalin relasi yang baik karena kios bunga kalisari secara langsung berhubungan dengan wilayah Kampung Pelangi karena lokasi yang berhimpitan depan belakang.

Kampung Pelangi kembali merintis ikoniknya dengan pemukiman bersih berwarna-warni. Dengan salah satu wilayahnya menjadi destinasi pengambilan syuting sinetron SCTV yang mendatangi aktris titi kamal dan lainnya pada Maret awal 2023. Dari pemilihan lokasi tersebut, membuktikan Kampung Pelangi di Kota Semarang masih eksis di benak masyarakat. Dengan posisinya sebagai ketua baru, Pak Woko mengkoordinasi kepada tim media TV mengenai upah tempat dan pengambilan pemain figuran yang tentunya dari masyarakat setempat. Pak Woko menuturkan bahwa beliau ingin memberikan langkah awal keterbukaan, salah satunya dengan ini bahwa segalanya informasi tersampaikan dan transparan. Menurut penuturannya masyarakat senang karena mendapat upah menjadi figuran dan Kampung Pelangi Semarang masih dikenal. Warga setempat yang menjadi figuran sekitar 5 orang masing-masing mendapat Rp. 1.000.000 selama 3 hari kerja dan ada juga warga yang dipinjam kendaraannya mendapatkan Rp. 500.000. Untuk kas penggunaan tempat Kampung Pelangi yang dilakukan shoot 2 minggu mendapatkan dana Rp. 2.000.000. Dana kas tersebut bisa membeli sound system untuk perkumpulan Pokdarwis di balai pertemuan.

Melalui implementasi kebijakan Grindle, Pokdarwis mendapatkan manfaat dari isi program yaitu terkait 5 macam pelatihan dari Dinas Pariwisata yang diwakilkan oleh 2-3 orang. Pada kepengurusan baru, pelatihan-pelatihan dari dinas diikuti oleh para Pokdarwis dan merasa itu sangat bermanfaat bagi asupan pengetahuan kepariwisataan pengelolaan kampung. Melalui penuturan Pak Taufiq, berbagai fasilitas penginapan, mentor telah disiapkan Dinas Pariwisata melalui anggaran dari Dinas Pariwisata pusat, yang memang bertujuan untuk mengembangkan SDM masyarakat lokal melalui Pokdarwis lalu harapannya ketika kembali ke wilayah masing-masing menyebarkan ilmu dan manfaatnya. Namun, implemetasi tersebut belum berjalan dengan baik karena Pokdarwis sendiri terbatas dengan ide-ide serta dana ketika ingin membuat sesuatu acara lagi seperti HUT

Kampung Pelangi 2019 saat itu. Belum ada potensi yang bisa dikembangkan secara keberlanjutan bukan hanya temporer.

Pelatihan-pelatihan yang ada untuk diterapkan sebagai unsur pelaksana seperti, menerapkan homestay sesuai pelatihan yang ada, warga setempat juga belum bisa berkontribusi penuh mengenai kepekaannya terhadap kampung. Hanya beberapa warga yang memang peduli. Terlalu pelatihan kerajinan juga saat ini sedang terhenti karena masih bingung akan mengembangkan kerajinan apa lagi, mereka membutuhkan fasilitator seperti LSM-LSM untuk pendampingan secara berkelanjutan karena kendala riwayat pendidikan yang ada di kampung pelangi. Begitu pun UMKM. Kurang berkembangnya dan belum memiliki ciri khas sebagai UMKM wilayah Kampung Pelangi. UMKM warga setempat pun masih sulit berkembang. Hanya sebatas pelatihan lalu untuk pemasaran dan brandingnya tidak terjalani. Pokdarwis memang perlu mengencangkan kembali daya tarik wisatawan di Kampung Pelangi. Dengan berbagai pelatihan ataupun program yang di support pemerintah, sudah seharusnya bisa memiliki inovasi kampung wisata yang tidak hanya penampilan kesenian jatilan dan rumah warga yang berwarna-warni.

Kehadiran Kampung Pelangi telah memicu adopsi budaya partisipasi baru di masyarakat melalui kolaborasi, di mana semua anggota masyarakat bekerjasama dalam menentukan prioritas kegiatan. Dalam kerjasama ini, setiap elemen masyarakat berperan sebagai mitra. Selain model partisipasi kolaboratif, dalam pengelolaan Kampung Pelangi, semua elemen masyarakat juga terlibat dalam proses pembelajaran bersama. Mereka saling berbagi pengetahuan, sehingga memungkinkan mereka untuk memperoleh pengetahuan baru dan bahkan mengembangkan keterampilan baru. Namun, untuk mencapai pemberdayaan yang berkelanjutan, keberadaan komponen kelembagaan menjadi sangat penting. Komponen ini harus memiliki struktur yang baik dan mampu membangun kesepakatan bersama. Salah satu lembaga atau kelompok yang memainkan peran penting dalam hal ini adalah Pokdarwis, yang tidak hanya sebagai alat untuk mengimplementasikan kebijakan, tetapi juga sebagai wadah pemberdayaan bagi kelompok-kelompok yang kurang beruntung melalui partisipasi kelompok.

Proses partisipatif di dalam kelompok ini dimulai sejak pembentukan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pembagian hasil yang dicapai oleh kelompok.

Melibatkan anggota dan pengurus kelompok dalam seluruh proses tersebut menjadi inti dari upaya pemberdayaan kelompok yang pada akhirnya menciptakan keyakinan akan kemampuan diri, tanggung jawab, dan komitmen. Bu Handini, salah satu pengurus Pokdarwis, juga menyampaikan hal ini. Menurutnya, Pokdarwis Kampung Pelangi menjadi pilar yang penting dalam membentuk kesadaran dan loyalitas bersama terhadap pentingnya komitmen dan tanggung jawab berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing individu. Hal ini akan memastikan bahwa Kampung Pelangi akan terus berkembang di masa yang akan datang.

Dengan struktur yang baru, kedatangan wisatawan dari mancanegara sudah kembali banyak. Melalui penuturan beberapa warga sekitar juga mulai Maret 2023 awal banyak kunjungan dari wisatawan lokal seperti anak-anak sekolah SMP, Paguyuban Ibu-ibu dan lainnya. Namun yang masih disayangkan interpretasi yang didapatkan oleh wisatawan hanya sekedar melihat rumah-rumah yang di cat warna-warni. Warga sekitar berharap dari Pokdarwis yang memiliki peran penting sebagai penghubung dengan pemerintah mempunyai inovasi dalam mengembangkan kampung ingin dikembangkan seperti apa. Namun dari Pokdarwis sendiri pun juga masih bingung karena juga membutuhkan sumbang asih ide-ide dan masukan dari warga setempat, tidak yang hanya menggantungkan pada Pokdarwis.

Program kegiatan yang dilakukan telah menempatkan masyarakat sebagai penerima manfaat. Pelatihan-pelatihan dan kegiatan yang diberikan dinas didasarkan kebutuhan Pokdarwis yaitu terkhusus pada pengelolaan SDM-nya. Pokdarwis sebagai tokoh masyarakat diharapkan menjadi contoh ataupun tonggak perubahan yang mencerminkan dampak positif dari adanya Kampung Pelangi. padahal dari pelatihan yang ada seperti branding dan pemasaran diharapkan memunculkan souvenir khas Kampung Pelangi yang menarik para wisatawan untuk datang kembali. Namun pada nyatanya, Pokdarwis belum mampu mengangkat Kampung Pelangi dengan fasilitas program yang telah direncanakan oleh pemerintah. Kegiatan di Kampung Pelangi pun belum berjalan lagi, belum lagi sikap dari masyarakat setempat yang menggantungkan keberlangsungan program Kampung Pelangi.

#### **4. Pokdarwis dengan Para Aktor Pendukung**

CSR sebagai stakeholder pendukung (sekunder) tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program, proyek atau kegiatan, tetapi memiliki kepedulian dan keprihatinan sehingga ikut bersama untuk merealisasikan program. Seperti halnya adalah lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat yang bergerak di bidang yang sesuai; kelompok akademisi dari perguruan tinggi memiliki pengaruh penting dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah; Pengusaha (badan usaha) yang terkait. Aktor-aktor pendukung ini ikut terjun dalam pemberdayaan masyarakat. Seperti ada akademisi yang datang untuk memberikan pelatihan pembuatan sabun, pemberian materi dalam kepariwisataan, serta kreativitas lainnya. Namun peran mereka hanya sampai pada bagaimana cara pembuatannya, belum adanya peran untuk mendampingi pemasarannya. Para masyarakat Kampung Pelangi juga sangat membutuhkan pelatihan bahasa Inggris dan berharap para LSM bergerak untuk memberikan dukungan. Namun pada nyatanya, belum ada yang bergerak untuk memfasilitasi kegiatan tersebut.

Adanya respon positif saat pertama kali pembangunan Kampung Pelangi adalah relasi oleh akademisi seperti dosen UNDIP dan UNNES yang memberikan pelatihan pembuatan seperti Handsanitizer, membuat kerajinan dari batok kelapa, wirausaha makanan bahkan dari lembaga-lembaga sosial di Kota Semarang. Melalui penuturan Pokdarwis, Bank BRI, Brand Kosmetik Wardah juga membantu keberhasilan program saat adanya festival Kampung Pelangi. PLN juga sempat menyumbangkan donasi cat kepada Kampung Pelangi. Dukungan pembinaan pelatihan tata boga juga oleh yayasan sosial dari mana-mana memberikan pengajaran kepada ibu-ibu namun tidak sampai pada tahap pemasarannya yang disayangkan. Namun saat ini pihak-pihak tersebut menjauh dan sangat dibutuhkan respon-respon positif dari para CSR untuk membantu meningkatkan potensi SDM di Kampung Pelangi.

Aktor pendukung dalam Kampung Pelangi yang erjalin adalah juga oleh perusahaan cat. Pemolesan pertama tahun 2017 dan ke tiga pada tahun 2021 oleh PT. Nippon Paint mereka membantu sumbangan cat. Untuk keberlangsungannya Pokdarwis mengandalkan pemerintah kembali. Karena pemeliharaan cat paling tidak harus dipoles ulang setelah 2-3 tahun sekali. Pada tahun 2023 ini, cat-cat rumah warga

sudah mulai kusam dan tidak terlihat indah. Mereka masih dan sangat perlu bantuan dari pemerintah terkait fasilitas cat yang membutuhkan dana tidak sedikit.

**Gambar 10. Dokumentasi Kerjasama dengan PT. Nippon Paint**



Sumber : Informan, Ibu Handini

Stakeholder pendukung lain yang pernah berperan pada Kampung Pelangi adalah PT. Djaroem. Saat adanya Festival Kampung Pelangi, mereka membantu keberhasilan acara tersebut dengan menyumbangkan dana dan produk rokok ke warung-warung masyarakat Kampung Pelangi. Saat ini, mereka kembali tertarik pada Kampung Pelangi. Melalui penuturan Pak Woko pada saat ini mereka tertarik lagi dengan Kampung Pelangi tersebut untuk dikembangkan. Namun melalui respon Pak Woko, tawaran yang diberikan tidak sesuai konteksnya dengan pengembangan Kampung Pelangi. Kesepakatan yang akan dijalankan adalah sepenuhnya pemegang kekuasaan terletak pada PT. Djaroem, sedangkan Pak Woko sebagai ketua berkeinginan para stakeholder pendukung hanya memfasilitasi pemasukan dana ataupun support pada pelatihan-pelatihan kepada warga setempat yang belum didapatkan dari dinas pariwisata. Pak Woko tidak ingin kampungnya disetir oleh pihak swasta. Keinginannya adalah mengembangkan kampung dengan menggali potensi lokal yang ada secara apa adanya dari masyarakat setempat sendiri.

Ketertarikan pada aktor yang ingin terlibat pada ketua UMKM Kota Semarang juga menggiring potensi UMKM yang ada di Kampung Pelangi. Usaha yang dilakukan adalah memberikan inovasi dan motivasi kepada masyarakat setempat

dalam mengembangkan kampung melalui UMKM. Dengan branding personal nya yang memberikan motivasi kepada warga setempat, terjadi konflik kepentingan melalui penuturan Bu Handini, bahwa ketua UMKM meminta namanya untuk dimasukkan ke dalam Pokdarwis Kampung Pelangi. Tujuannya untuk menyetir para pemilik UMKM di Kampung Pelangi nantinya ketika ada acara di kelurahan ataupun cakupan kota. Namun tujuannya tidak di atasnamakan Kampung Pelangi yang seharusnya sebagai ikon pengembangan kampung, namun menjadi tujuan individu bahwa ketua UMKM yang bisa mengangkat beberapa produk-produk warga yang ada di Kelurahan Randusari, konsep tidak mengatasnamakan Kampung Pelangi sebagai perwujudan eksistensi kampung wisata membuat Bu Handini tidak terpengaruh akan idenya untuk memasukkan posisi ke Pokdarwis meskipun adanya iming-iming pelatihan dan branding yang menjanjikan.

Para pelaku atau aktor yang terlibat seharusnya memiliki tujuan yang seragam. Namun, dalam kenyataan lapangan, terdapat aktor yang terlibat dengan kepentingan masing-masing dalam implementasi suatu kebijakan. Setiap pihak berupaya untuk memenuhi kepentingannya dengan mengalokasikan sumber daya dan mengarahkan proyek agar dapat mencapai hasil yang diinginkan. Terkadang, tujuan untuk memprioritaskan kepentingan masing-masing aktor ini memunculkan konflik politik mengenai pemberian kekuasaan, kepentingan yang harus diprioritaskan, dan strategi dari aktor-aktor yang terlibat.

Berdasarkan beberapa penerapan dalam pengembangan kampung pelangi yang melibatkan berbagai aktor, masih menghadapi permasalahan ataupun pemahaman kepentingan dari aktor yang terlibat dan masih terdapat kelemahan dari strategi yang diterapkan oleh pelaku program kebijakan. Pemerintah Kota Semarang dalam mengembangkan kampung pelangi menggerakkan para OPD sebagai langkah awal melakukan perubahan kampung kumuh menjadi kampung wisata yang secara khusus diawasi oleh Dinas Pariwisata sebagai salah satu OPD Kota Semarang yang sesuai dengan peran bagiannya. Akan tetapi, langkah-langkah program yang diberikan untuk pengembangan kampung harus disertai dengan strategi yang baik salah satunya memperkuat koordinasi antar unit organisasi yaitu Pokdarwis sendiri. Melangkahakan bagaimana relasi dan kesepakatan yang akan dijalin dengan berbagai aktor-aktor yang terlibat untuk sesuai pada tujuan adanya kampung wisata tersebut.

Pokdarwis sekaligus para warga setempat menjadi stakeholder utama yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program, dan proyek. Mereka harus ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses pengambilan keputusan yaitu masyarakat dan tokoh masyarakat. Masyarakat yang terkait dengan kegiatan, yaitu masyarakat yang diidentifikasi akan memperoleh manfaat dan yang akan terkena dampak dari adanya kegiatan. Tokoh masyarakat merupakan anggota masyarakat yang oleh masyarakat ditokohkan di wilayah itu sekaligus dianggap dapat mewakili aspirasi masyarakat yaitu Pokdarwis Kampung Pelangi.

Program kegiatan yang dilakukan telah menempatkan masyarakat sebagai penerima manfaat. Pelatihan-pelatihan dan kegiatan yang diberikan dinas didasarkan kebutuhan Pokdarwis yaitu terkhusus pada pengelolaan SDM-nya. Pokdarwis sebagai tokoh masyarakat diharapkan menjadi contoh ataupun tonggak perubahan yang mencerminkan dampak positif dari adanya Kampung Pelangi. Namun pada nyatanya, Pokdarwis belum mampu mengangkat Kampung Pelangi dengan fasilitas program yang telah direncanakan oleh pemerintah. Kegiatan di Kampung Pelangi pun belum berjalan lagi, padahal dari pelatihan yang ada seperti branding dan pemasaran diharapkan memunculkan souvenir khas Kampung Pelangi yang menarik para wisatawan untuk datang kembali.

Dalam pengimplementasian suatu program, tiap pelaksana harus memahami pula strategi atau cara memudahkan pelaksanaan program itu sendiri, sehingga membuka peluang yang lebih besar dalam perwujudan tujuan kebijakan. Melalui observasi lapangan yang ada, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang sampai sejauh ini mengimplementasikan perannya dengan baik sebagai aktor pengembangan Kampung Pelangi. Namun penerapan dari beberapa dukungan aktor-aktor yang ada belum tercapai dengan baik dikarenakan pemahaman dan kepentingan aktor yang terlibat masih belum cukup baik dan belum sinergis.

Dalam pengimplementasian suatu program, tiap pelaksana harus memahami pula strategi atau cara memudahkan pelaksanaan program itu sendiri, sehingga membuka peluang yang lebih besar dalam perwujudan tujuan kebijakan. Melalui observasi lapangan yang ada, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang sampai sejauh ini mengimplementasikan perannya dengan baik sebagai aktor pengembangan Kampung Pelangi. Namun penerapan dari beberapa dukungan aktor-aktor yang ada

belum tercapai dengan baik dikarenakan pemahaman dan kepentingan aktor yang terlibat masih belum cukup baik dan belum sinergis.

Para pelaku atau aktor yang terlibat seharusnya memiliki satu tujuan yang sama. Pada realita lapangan, terdapat aktor yang terlibat memiliki kepentingan tertentu di dalam implementasi suatu kebijakan dan masing-masing pihak berusaha agar kepentingan dapat terpenuhi dengan cara menuntun adanya pengalokasian sumber-sumber dan pengarahan proyek untuk mencapai hasil yang diinginkan. Seringkali tujuan untuk mengedepankan masing-masing aktor menimbulkan konflik politik kepada siapa kekuasaan diberikan, kepentingan siapa yang diperhatikan dan strategi dari para aktor yang terlibat.

Berdasarkan beberapa penerapan dalam pengembangan kampung pelangi yang melibatkan berbagai aktor, masih menghadapi permasalahan ataupun pemahaman kepentingan dari aktor yang terlibat dan masih terdapat kelemahan dari strategi yang diterapkan oleh pelaku program kebijakan. Pemerintah Kota Semarang dalam mengembangkan kampung pelangi menggerakkan para OPD sebagai langkah awal melakukan perubahan kampung kumuh menjadi kampung wisata yang secara khusus diawasi oleh Dinas Pariwisata sebagai salah satu OPD Kota Semarang yang sesuai dengan peran bagiannya. Akan tetapi, langkah-langkah program yang diberikan untuk pengembangan kampung harus disertai dengan strategi yang baik salah satunya memperkuat koordinasi antar unit organisasi yaitu Pokdarwis sendiri. Melangkahkannya bagaimana relasi dan kesepakatan yang akan dijalin dengan berbagai aktor-aktor yang terlibat untuk sesuai pada tujuan adanya kampung wisata tersebut.

## **B. Karakteristik Kelembagaan**

Lingkungan dimana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada uraian indikator ini sesuai dengan implikasi Grindle mengenai karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa akan dijelaskan karakteristik dari lembaga yang akan turut mempengaruhi keberhasilan program kebijakan. Karakteristik lembaga dan penguasa yang baik untuk pelaksanaan program pengembangan Kampung Pelangi adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Program kebijakan ini tidak hanya dibutuhkan pemerintah untuk meningkatkan keahlian dalam memunculkan pariwisata baru di Kota Semarang tetapi juga masyarakat Kampung Pelangi, seperti dapat mensejahterahkan masyarakat. Pemerintah terkait program pengembangan kampung

pelangi sebagai lembaga penguasa setempat harusnya menyediakan sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan segala keluhan terkait keberlangsungan program.

Dalam kaitan dengan pelaksana yang terlibat yaitu Pokdarwis dan warga setempat Kampung Pelangi dengan pemerintah, mereka belum terwadahi dalam hal aspirasi. Menurut penuturan para Pokdarwis mereka menginginkan aspirasi mereka sebagai para pelaksana di lapangan untuk didengar, karena merekalah para masyarakat yang menghadapi berbagai fenomena terkait berbagai kendala pengembangan Kampung Pelangi. Menurut penuturan Ketua Pokdarwis :

*“Dinas Pariwisata memang sangat perhatian dan terbuka ketika membutuhkan bantuan fasilitas pendukung ketika menjamu tamu. Kita sebagai Pokdarwis juga senang dapat ilmu-ilmu baru dari pelatihan Pokdarwis yang sangat bermanfaat. Namun untuk beberapa usulan-usulan dari Pokdarwis yang ada, sampai saat ini belum didengar dan belum mampu memengaruhi para dinas pariwisata. Seperti halnya dikatakan bahwa Kampung Pelangi ini diperhatikan lebih karena menjadi salah satu rangkaian destinasi wisata yang datang oleh karena itu kami membutuhkan pembinaan SDM yang lebih kuat dan fokus seperti pengajaran pemandu wisata berbahasa Inggris, peningkatan kreativitas kerajinan yang dibimbing sampai pada tahap pemasaran. Usulan mengenai tambahan kesenian tarian khas Gunung Brintik untuk menciptakan tampilan budaya yang khas serta adanya karcis masuk.” (Woko,2023)*

Penuturan ini juga didukung oleh Pokdarwis :

*“Saya senang mba dinas komunikasinya memang baik ketika mau ada tamu datang, kita disuruh menyiapkan segala rupa dan menyambut. Tapi untuk keterbukaan usulan dari kami belum bisa sampai mempengaruhi program yang diberikan dinas kepada kami. Pokdarwis sih karena masih sangat minim pengetahuan dan keahliannya sangat membutuhkan support yang mungkin secara eksklusif untuk dibina. Karena berkali-kali kami ditekankan untuk menggali potensi wisata tapi kita sendiri masih bingung terkait hal yang bisa dilakukan dalam jangka panjang, butuh diskusi secara terbuka dengan dinas tapi dari awal juga belum ada sih mba, kekurangannya disitu” (Handini,2023).*

Sejauh perjalanan Kampung Pelangi yang difasilitasi dinas pariwisata melalui pemaparan narasumber, bahwa karakteristik lembaga nya diperlukan keterbukaan yang lebih. Mereka juga terkendala pada kebaruan data. Pokdarwis memberikan aspirasi kepada Dinas untuk melakukan update data pada website di pemerintah Kota Semarang terkait kampung wisata pelangi dengan strategi branding dan promosi yang terbaru. Dari Pokdarwis sendiri, berharap pada dinas bisa membranding Kampung Pelangi dengan profil yang cantik tidak hanya profil singkat dan sejarah terbangunnya Kampung Pelangi.

Strategi yang dibuat Pokdarwis adalah mereka akan membuat website sendiri khusus Kampung Pelangi yang tidak bergandeng dengan website pemerintah. Mereka akan mendorong para anak muda untuk mempromosikan kampung pelangi melalui media sosial secara lebih luas. Namun yang menjadi kendala adalah, inovasi Pokdarwis ingin membuat suatu video profil Kampung Pelangi yang terlihat dari atas namun membutuhkan alat IT yang mumpuni. Terkait hal itu belum adanya respon dari pemerintah.

Mereka masih sangat membutuhkan bimbingan untuk menciptakan atraksi wisata baik dari budaya maupun sosial yang khas bagi wisatawan. Aspirasi-aspirasi yang ada pada Pokdarwis bisa menjadi evaluasi perkembangan Kampung Pelangi kedepannya. Pokdarwis juga membutuhkan sosialisasi yang difasilitasi dari dinas kepada seluruh warga Kampung Pelangi agar para pelaksana yaitu masyarakat Kampung Pelangi benar-benar tergerak dalam pengembangan kampung. Sehingga sosialisasi tidak hanya melalui Pokdarwis.

Sebagai kelembagaan Pokdarwis, struktur kepengurusannya sebagai lembaga penguasa juga di Kampung Pelangi terbuka dalam menampung aspirasi masyarakat. Posisi struktur birokrasinya saat ini jelas dengan meratakan posisi pada anak-anak remaja dan mengambil anggota dari pengurus pasar bunga kalisari untuk berkolaborasi. Sarana dan relasi yang diciptakan Pokdarwis sebagai lembaga di Kampung Pelangi melalui pertemuan RT/RW ataupun ibu-ibu PKK untuk mensosialisasikan perkembangan Kampung Pelangi dan pentingnya partisipasi seluruh masyarakat dalam penyaluran ide. Dan nantinya dari pertemuan kecil itu akan dibawa ke pertemuan khusus Pokdarwis untuk didiskusikan perencanaan kedepannya. Namun yang disayangkan masyarakat juga tidak aktif dalam memberikan saran. Yang sedang ditekankan kepada seluruh masyarakat Kampung Pelangi saat ini adalah menjaga kebersihan karena mulai datangnya para wisatawan baik lokal maupun mancanegara.

Kepengurusan Pokdarwis baik yang dulu dan sekarang masih beradaptasi dengan posisinya masing-masing. Hanya beberapa yang masih sadar akan pembagian tugasnya sesuai divisinya. Seperti Bu Handini pada divisi pengembangan, masih menggali akan potensi yang bisa menghasilkan dari UMKM. Bu Handini sedang berusaha membuat kerjasama dengan Koperasi, agar masyarakat yang memiliki UMKM bisa bergabung dengan koperasi, Mereka akan berpeluang mendapatkan akses pasar. Adapun berpeluang

mendapatkan bantuan dalam proses produksi produk hingga kegiatan pemasarannya agar laku di pasaran. Oleh karena itu, Bu Handini sedang di tahap mengobarkan semangat masyarakat dan mendata UMKM yang akan dimasukkan ke koperasi. Untuk divisi lain, menurut penuturan Pak Woko belum ada pergerakan sedangkan sosialisasi mengenai tanggungjawab sesuai divisi telah disampaikan pada pertemuan Pokdarwis. Pak Woko juga sedang mendorong dan memproses sekretaris dan anggota muda untuk membuat proposal dan strategi pemasaran yang bisa disebarluaskan ke media bahwa kampung pelangi masih aktif.

Berdasarkan gambaran dan pembahasan di atas dinyatakan bahwa implementasi program pengembangan Kampung Pelangi belum didukung oleh karakteristik lembaga dan penguasa yang ideal. Sehingga pelaksanaan program masih menemui beberapa kendala. Dinas Pariwisata sebagai lembaga penguasa terbukti memberikan pengaruh yang cukup besar pada pelaksanaan kebijakan ini. Program-program dan responnya membantu peningkatan informasi yang menunjang kepariwisataan melalui pemberdayaan masyarakat lokalnya. Namun komunikasi yang terjalin belum ideal karena salah satunya adalah belum terbukanya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam menerima aspirasi dari Pokdarwis sebagai pelaksana untuk mempengaruhi perencanaan program kedepannya. Namun, untuk Pokdarwis yang berposisi sebagai lembaga perwakilan masyarakat telah terbuka dalam menerima aspirasi namun masyarakatnya sendiri yang belum sampai pada tahap pemberian ide. Untuk struktur kelembagaan Pokdarwis sendiri juga masih kurang jelas karena fungsi-fungsi dari pihak-pihak divisi terkait belum maksimal dalam penerapan pengembangan Kampung Wisata Pelangi.

### **C. Respon Masyarakat Melalui Kepatuhan dan Daya Tanggap**

Menurut Grindle, tingkat kepatuhan dan respons dari para pelaksana merupakan faktor penting dalam pelaksanaan suatu program kebijakan. Oleh karena itu, dalam konteks pengembangan Kampung Pelangi, penting untuk mengevaluasi sejauh mana kepatuhan dan respons para pelaksana terhadap program tersebut. Hal ini merupakan aspek penting dalam proses implementasi kebijakan, di mana tingkat kepatuhan dan respons dari para pelaksana merupakan tindakan konkret yang menunjukkan kesungguhan mereka dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka dalam melaksanakan program pengembangan Kampung Pelangi secara efektif, optimal, dan bermanfaat bagi masyarakat sebagai subjek sekaligus objek pengembangan.

Dalam implementasi kebijakan melalui program yang didistribusikan terdapat hal-hal yang harus diperhatikan, bukan hanya mensosialisasikan program yang dibuat namun bagaimana pemerintah dapat memastioakan para pelaksana di lapangan mengaplikasikannya dengan efektif. Para pokdarwis sebagai mitra pemerintah menjadi tonggak pertama dalam sosialisasi program dan tujuan pengembangan kampung wisata pelangi. Pokdarwis mendorong masyarakat tidak hanya melalui ucapan lisan tetapi dengan tindakan. Menurut penuturan Bu Handini, beliau sudah sering melibatkan warga untuk ikut menjamu tamu wisatawan asing dan ikut memberikan kalungan bunga. Namun terkadang warga setempat masih cuek dan menganggap segala urusan yang terkait Kampung Pelangi hanya tugas Pokdarwis. Pada saat rapat pertemuan PKK atau perkumpulan RT/RW para pokdarwis juga telah didorong saran/ide-ide yang bisa diberikan untuk inovasi kampung. Namun warga juga pasif dan cenderung ikut pada apa yang ada selagi tidak merugikan. Penuturan ini didukung oleh warga :

*“Kalau Pokdarwis sendiri sih biasanya yang paling saya tau itu Bu Handini kalau pertemuan PKK menanyakan ada saran apa, atau mau ada yang ikut pelatihan apa dari dinas. Cuma warga ya bingung juga mba, pinginnya kampung terkenal lagi tapi ya merasa urusan Pokdarwis untuk bagaimananya. Kami bagian ngikut”*(Prih,2023).

Penuturan ini juga didukung oleh warga yang lain

*“Bu Handini biasnaya memberi informasi sih mba, kalau ada pelatihan atau mau ada masukan apa. Kan nanti masukan dari warga dibawa ke pertemuan Pokdarwis. Tapi saya sendiri juga bingung kalau mau usul soalnya yang paling tau kan Pokdarwis seharusnya. Pinginnya ya pokoknya warga tetap jaga kebersihan karena sekarang mulai berantakan lagi membuang sampah pada sembarangan.”*(Citra,2023).

Menurut penuturan para Pokdarwis, secara khusus yang perlu dibenahi adalah pola pemikiran masyarakat dari Kampung Pelangi sendiri. Karena pengembangan kampung ini merupakan suatu kerja sosial, jadi perlu dorongan dari hati dan keikhlasan dari para individu untuk mengembangkan kampung wisata secara bersama-sama, seperti halnya desa wisata di lain-lain tempat yang juga bisa berkembang dengan kerjasama seluruh elemen masyarakat lokal. Pola pikir masyarakat jika ingin diubah prosesnya akan lama, karena semua itu berdasarkan pengaruh hati dan tindakan yang tergerak. Pola pemikiran warga setempat rata-rata masih terpacu dengan keuangan. Rata-rata mereka mengasumsikan bahwa ketika melakukan sesuatu untuk kampung “berapakah yang akan didapatkan” atau “apakah yang akan didapatkan tetapi dengan bentuk dana”, bukan

menyerap manfaat sosial dan kesejahteraan bersama. Sedangkan jika para masyarakat setempat ikut berkontribusi lebih, pasti mereka juga bisa bersama-sama kembali memaksimalkan potensi wisata dan mencari peruntungan.

Orientasi pada mindset yang ada pada warga Kampung Pelangi memang sebagian besar terkait dana. Saat adanya tamu wisatawan ataupun kampungnya menjadi tempat shooting sinetron, melalui penuturan Pokdarwis yaitu Pak Woko dan Bu Handini bahwa dana yang diberikan dari upah lelah ataupun upah sewa tempat dipandang beberapa warga sekitar dana tersebut masuk ke para Pokdarwis. Padahal dana tersebut masuk ke kas Kampung Pelangi untuk nantinya bisa membenahi sarana prasarana yang tidak mendukung dengan swadaya masyarakat. Sedangkan dari beberapa partisipasi masyarakat sebagai figuran, mereka juga mendapat uang lelah. Namun masih ada mindset para masyarakat bahwa Pokdarwis mengambil untung berlebih. Jalan pemikiran tersebut memang perlu ditanamkan agar orientasinya tidak selalu terkait dana yang akan didapatkan secara pribadi.

Kegiatan yang dilakukan oleh Pokdarwis Kampung Pelangi meliputi pengembangan dan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan anggota pokdarwis di bidang pariwisata. Hal ini mencakup pelatihan-pelatihan pariwisata yang didukung oleh Pemerintah Kota Semarang dan Kelurahan Randusari. Kegiatan ini biasanya dihadiri oleh tokoh-tokoh penting Pokdarwis lalu didistribusikan kepada setiap RT/RW yang kemudian akan disampaikan kepada masyarakat melalui pertemuan rutin RT/RW. Daya tanggap yang diharapkan pemerintah untuk Pokdarwis dan masyarakat Kampung Pelangi adalah memahami kampungnya telah menjadi kampung wisata yang perlu direalisasikan dengan segala kegiatan atau aktivitas yang tercipta dari pelatihan-pelatihan yang telah diberikan.

Melalui penuturan warga setempat memang pelatihan dari dinas mereka dominan tidak tahu menahu. Mereka hanya tau tokoh-tokoh Pokdarwis yang ikut terkait pelatihan. Meskipun melalui penuturan Pokdarwis telah disampaikan pada pertemuan PKK/RT/RW tidak banyak dari masyarakat yang tau adanya pelatihan dari Dinas. Namun memang pelatihan diikuti hanya oleh para Pokdarwis, warga menganggap mereka hanya sebagai penikmat. Sedangkan pokdarwis juga sudah menginformasikan untuk warga setempat bisa ikut pelatihan tersebut yang kurang lebih 5 hari di hotel:

*“Saya senang dinas support berbagai program khususnya pelatihan SDM. Cuma memang ketika Pokdarwis memberi ruang, warga setempat tidak mau*

*ikut. Yang ingin ikut pun terkendala karena pekerjaan rata-rata kan pegawai pabrik. Dan pelatihannya itu 5 hari kerja. Warga juga tidak mungkin ijin karena pelatihan tersebut tidak menggantikan gajinya selama lima hari. Paling hanya digantikan uang transport kurang lebih Rp. 200.000” (Woko,2023).*

Perkembangan Kampung Pelangi yang saat ini, memang sedang redup dan dibina melalui pelatihan-pelatihan dari Dinas Pariwisata. Proses tersebut tidak mudah karena perlu inovasi dari masyarakat sendiri untuk dikembangkan. Lokasinya sebagai prospek wisata buatan yang di tengah kota dan tidak berorientasi dengan alam memang perlu pemikiran bersama untuk menaikkan popularitas Kampung Pelangi lagi jika tetap ingin berjalan. Menurut para pokdarwis, respon masyarakat setempat yang saat ini juga kurang dalam kebersihan dan tidak turut serta dalam ide seharusnya mereka bersyukur dengan adanya Kampung Pelangi, wilayahnya menjadi salah satu yang diperhatikan pemerintah dengan diberikannya program sertifikat gratis untuk warga Kampung Pelangi RW 03 dan 04. Pokdarwis perlu membangkitkan semangat yang lebih kepada masyarakat dan menggandeng masyarakat walaupun tidak mudah. Menurut penuturan Pokdarwis, setidaknya mereka harus memiliki rasa timbal balik kepada Kampung Pelangi, akan dibawa seperti apa konsep kampung wisata ini. Dengan program sertifikat gratis itu pun, rata-rata warga setempat disitu sangat terbantu dimana kurang lebih 300 rumah diberikan program sertifikat tanah gratis tersebut.

Beberapa hal yang menjadi faktor masih acuhnya masyarakat sebagai subjek kampung wisata karena rata-rata penduduk disitu adalah bukan penduduk asli. Sedangkan dengan dia menjadi penduduk disitu, menurut sosialisasi Pokdarwis, seharusnya mereka berterimakasih dengan Kampung Pelangi mereka mendapat perhatian sertifikat tanah gratis dan harus memberi timbal balik apa yang bisa mereka lakukan untuk kampung. Tetapi nyatanya mereka hanya mengikuti alur selama tidak merugikan. Hanya beberapa dari warga setempat yang mau turut serta Pokdarwis dalam pengembangan ide ataupun berpartisipasi dalam persiapan kedatangan wisatawan. Mayoritas merasa itu sudah urusan Pokdarwis dan berorientasi pada upah. Apa yang akan mereka lakukan harus didasari adanya upah terkait tetapi mereka juga tidak mau memberikan ide ataupun saran. Warga setempat juga merasa kampung wisata buatan ini tidak tahu harus dibuat seperti apa karena Pokdarwis dan warga setempat yang ikut berdiskusi masih terus menggali potensi

yang ada. Mereka juga merasa kampung wisata buatan ini adalah musiman. Penuturan ini didukung oleh warga:

*“Sekarang ini yang jadi hambatan juga mungkin kan dulu waktu viral sangat ramai ya, wisatawan berbondong-bondong kesini, foto-foto, souvenir-souvenir jadi sudah tau apa aja yang ada disini. Kan juga udah banyak artikel-artikel dan mulut ke mulut tentang apa aja yang ada di Kampung Pelangi jadi Cuma ohh kampung pelangi seperti itu. Jadi kita mau menganbkat Kampung Pelangi lagi ini masih meraba-raba bagaimana yang bisa membuat wisatawan betah dan akan kembali kesini lagi”*(Citra,2023).

Penuturan tersebut didukung oleh warga serupa :

*“Memang wisatawan yang datang itu paling yaudah ya mba kesini ya foto-foto di mural, gardu pandang. Terus dulu bikin kerajinan tangan yang diajarkan Bu Maryati. Yaudah mba gitu-gitu aja. Apalagi habis Covid tidak ada kegiatan, kerajinan tangan, kegiatan-kegiatan gitu juga sudah tidak ada. Sekarang warga ya dari pelatihan kerajinan itu nyetor secara individu dijual ke kios bunga. Warga juga pasif sih mba kalau ide-ide gitu maunya ya dari pemerintah atau Pokdarwis yang mengurus saja lah”*(Ratna,2023).

Dari pokdarwis, dengan pola pemikiran masyarakat yang perlu dibenahi, menjaga kebersihan sekarang yang kurang diperhatikan oleh warga setempat juga. Masyarakat setenpat juga masih kurang peduli terhadap lingkungan rumah yang kotor, sungai yang tertumpuk sampah lagi dan bisa menyebabkan bau, prasarana lampu di area jalanan pemukiman yang mati, serta plang yang tidak terbaca. Hanya beberapa warga saja yang aktif dalam perkembangan Kampung Pelangi. Oleh karena itu sangat dibutuhkan respon aktif dari masyarakat yang tidak hanya adaptasi dari perubahan kampung kumuh menjadi kampung wisata, namun juga dalam hal perkembangannya.

Strategi yang diterapkan oleh Pokdarwis berhubungan dengan respon masyarakat. Setiap organisasi memiliki hubungan dengan masyarakat, yang merupakan kelompok di luar organisasi yang tidak dapat dikendalikan. Dalam masyarakat yang tidak terkendali tersebut, diperlukan loyalitas melalui pemerintah dan berbagai kelompok seperti kelompok penekan, kelompok politik, dan kelompok sosial lainnya. Dalam konteks strategi organisasi, terlihat adanya hubungan antara organisasi dan masyarakat, dengan sejauh mana interaksi tersebut dapat menguntungkan organisasi. Strategi ini juga menunjukkan bahwa organisasi benar-benar bekerja dan berusaha memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Pokdarwis berperan sebagai fasilitator dan pelaku dalam promosi pariwisata, dikenal sebagai fasilitator karena mereka dapat mengajukan fasilitas penunjang kepada Dinas Pariwisata. Strategi Pokdarwis dalam

memperkuat kampung wisata pelangi, seperti yang disampaikan oleh Bu Handini, melibatkan promosi wisata melalui media publikasi seperti wartawan dan content creator, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), memberikan motivasi kepada masyarakat seperti ibu PKK, kelompok wisata, dan karang taruna, serta pembinaan bagi pengelola kampung wisata dengan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat melalui sosialisasi setiap pertemuan rutin baik itu PKK, RT, RW.

Tanggapan masyarakat terhadap strategi yang dilakukan oleh Pokdarwis untuk memperkuat Kampung Wisata Pelangi adalah bahwa strategi tersebut masih perlu diperbaiki karena sarana, prasarana, dan fasilitas yang tersedia belum memadai. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya dukungan keuangan dari swadaya kas Kampung Pelangi. Masyarakat setempat juga memiliki perspektif yang masih kurang menyadari perannya sebagai objek pembangunan Kampung Wisata. Terdapat faktor-faktor yang bisa memengaruhi keberhasilan strategi Pokdarwis dalam memperkuat kampung wisata, salah satunya adalah melibatkan peran aktif masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan sektor pariwisata. Pembangunan kampung wisata tidak dapat terlepas dari partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan situasi dan kondisi di masyarakat yang memiliki kesadaran akan pentingnya pariwisata. Diharapkan dengan menerapkan sikap sadar wisata, pemahaman dan pengertian yang seimbang dapat meningkat di antara semua pihak, sehingga masyarakat akan lebih aktif terlibat dalam sektor pariwisata

Dari kondisi yang ada, pengembangan Kampung Wisata Pelangi mendapatkan dukungan dari sebagian masyarakat setempat, terutama dari mereka yang patuh dalam menjaga dan merawat kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Namun, dukungan ini hanya terbatas pada sejumlah warga. Upaya melestarikan budaya, baik secara fisik maupun non-fisik, serta partisipasi mereka dalam mendukung berbagai kegiatan atraksi wisata masih kurang. Pokdarwis terus mendorong partisipasi masyarakat untuk secara bersama-sama menghidupkan konsep kampung wisata. Sebagai penggerak utama dan mitra pemerintah, Pokdarwis akan terus memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat sekitar mengenai konsep kampung wisata. Namun, terkait dengan mindset tersebut, masih diperlukan perbaikan pada warga setempat dan loyalitas mereka. Mereka perlu menyadari bahwa mereka tidak hanya menjadi penerima program, tetapi juga

sebagai perencana program yang terlibat dalam prosesnya, dan tidak menganggap bahwa semua urusan telah ditanggung oleh Pokdarwis tanpa partisipasi mereka.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, program pengembangan Kampung Pelangi dilatarbelakangi oleh pengentasan pemukiman kumuh yang diberlanjuti menjadi kampung wisata. Program pengembangan bersifat *top down*, untuk implementasinya melalui SK Pokdarwis No. B/1442/556/IV/2023 dikembangkan oleh masyarakat Kampung Pelangi selaku subjek dan objek pengembangan melalui potensi kampung wisata untuk mengangkat perkeomian lokal dengan atraksi wisata yang digali. Dinamika pengembangan Kampung Pelangi selama 2017-2022 melalui model analisis implementasi oleh Grindle, terdapat dua aspek. Yang pertama yaitu melalui analisis isi kebijakan. Pada prosesnya, melalui program-programnya baik fisik maupun non-fisik mulanya menjadikan peruntungan bagi penambahan tempat rekreasi di Kota Semarang dan peruntungan bagi masyarakat lokal karena melakukan aktivitas perdagangan dan pembuatan kerajinan. Terdapat faktor yang dominan dari isi kebijakan adalah pada tipe manfaat yang sampai saat ini masih dirasakan masyarakat dengan adanya program tersebut, masyarakat merasa hunian pemukimannya sudah lebih nyaman untuk dihuni. Pada prosesnya, keberlanjutan implementasinya tidak berjalan di fase 2018-2022 karena dipengaruhi sumber daya yang kurang mendukung terkait program fisik yang tidak terurus karena minimnya anggaran, tidak terjalinnya komunikasi yang baik antar Pokdarwis, dan terhentinya program pemberdayaan kepada masyarakat karena dirasa masih kurangnya inovasi antar pokdarwis serta masih kurangnya partisipasi aktif masyarakat dan hanya menyerahkan solusi kepada Pokdarwis.

Pada aspek lingkungan implementasi, membantu menganalisis indikator mengenai relasi program oleh aktor-aktor terkait. Banyaknya ketertarikan para pihak swasta saat Kampung Pelangi terbentuk. Ketertarikannya membantu pendampingan pelatihan ataupun yang bermanfaat bagi kepariwisataan karena para Pokdarwis merasa minimnya pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan Kampung Wisata. Dinamika pengembangan Kampung Pelangi yang meredup dibutuhkan para aktor-aktor terkait yang sejalan dengan tujuan pengembangan kampung. Keberlanjutannya terdapat aktor yang tidak selaras pada tujuannya. Terdapat kepentingan-kepentingan aktor tertentu

yang ingin mendominasi sedangkan aktor kunci yang paling dominan bagi Pokdarwis Kampung Pelangi adalah Dinas Pariwisata. Kampung Pelangi memiliki posisi intens oleh Dinas Pariwisata melalui dukungan yang diberikan sangat memadai, namun untuk keterbukaan aspirasi masih minim. Pokdarwis sebagai mitra pemerintah juga masih kurang terkait kompetensinya untuk menggali potensi wisata secara kreatif, hanya beberapa aktor aktif dalam penyumbangan ide dan dominannya perspektif masyarakat yang menganggap kampung pelangi ini adalah wisata musiman dan membutuhkan upah timbal balik untuk membangkitkan kampung wisata pelangi sehingga para aktor terkait belum saling bersinergi.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan diatas, maka saran atau rekomendasi yang dapat penulis ajukan adalah sebagai berikut:

1. Lebih terbukanya aspirasi oleh Dinas Pariwisata sebagai pembuat program yang tepat sasaran untuk keberlangsungan program yang ada. Dengan melakukan pengembangan kapasitas melalui pengembangan Sumber Daya Manusia(SDM) secara lebih intens sesuai kebutuhan.
2. Mengoptimalkan Pokdarwis dengan penguatan organisasi sesuai dengan divisinya masing-masing untuk mengencarkan strategi dalam membangun kemitraan dan kolaborasi dengan komunitas lokal, organisasi non-pemerintah, dan pihak swasta yang sejalan untuk mendapatkan dukungan finansial, sumber daya, dan pengetahuan yang diperlukan untuk pengembangan Kampung Pelangi. Khususnya dalam inovasi kerajinan lokal, keahlian tata boga, keahlian jasa pemandu wisata atau keahlian teknis tertentu.
3. Dihidupkannya kembali kegiatan pemberdayaan yang dibuat oleh Pokdarwis seperti pembuatan gerabah, pembuatan gantungan kunci atau kreativitas lainnya yang kemudian diolah menjadi penawaran paket wisata. Sehingga bisa menarik pengunjung tidak hanya menikmati pemukiman yang berwarna-warni dan pemandangan jalanan dari atas namun bisa melakukan atraksi wisata melalui kegiatan.

4. Kembali mengadopsi program kebersihan dan lingkungan yang berkelanjutan, seperti pengelolaan sampah yang efektif, penghijauan, dan program daur ulang. Melibatkan penduduk kampung dalam program-program ini juga penting untuk menciptakan kesadaran dan tanggung jawab kolektif terhadap lingkungan mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afriska Yoga Saputri. (2019). *Analisis Stakeholders Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung Tematik Kota Semarang (Studi Kasus : Kampung Tematik Jajan Pasar, Kelurahan Gajahmungkur)*. Journal of Politic and Government Studies. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/25049/22301>
- Akbar, T., & Faqih Alfian, dan. (2018). KAMPUNG TEMATIK SEBAGAI BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERMASALAHAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA MALANG. *Wahana*, 70(2), 37–48. <https://doi.org/10.36456/WAHANA.V70I2.1741>
- Akib, H. (2010). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Haedar Akib/ Jurnal Administrasi Publik*, 1(1).
- Alvionita, E. (2018). Implementasi Komunikasi Pariwisata Dalam Destination Branding Pariwisata Berbasis Masyarakat Di Kampung Lawas Maspati Surabaya. *JURNAL UNTAG*.
- Andi Lestari Sulaiman. (2021). Proses Kolaborasi Penanganan Permukiman Kumuh Melalui Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Bandung (Studi Kasus di Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan). *Majalah Media Perencana*, 2(1), 1–23. <https://mediaperencana.perencanapembangunan.or.id/index.php/mmp/article/view/10>
- Aryaningtyas, A. T., Aprilliyani, R., & Soehari, H. (2021). Pengembangan Kawasan Kampung Pelangi Semarang: Persepsi dan Dukungan Masyarakat. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 8(1), 278 – 304–278 – 304. <https://doi.org/10.24843/JUMPA.2021.V08.I01.P15>
- Assadiqie, J. G. (2019). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAMPUNG TEMATIK BAMBU MEWEK KELURAHAN TUNJUNGSEKAR KOTA MALANG*.
- BAPPEDA. (2021). *RPJMD KOTA SEMARANG 2021-2026*. BAPPEDA Kota Semarang. <https://bappeda.semarangkota.go.id/rpjmd-kota-semarang>
- Bawole, P. (2019). MENINGKATKAN KAPABILITAS MASYARAKAT MELALUI PROSES PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KAMPUNG KOTA DI YOGYAKARTA. *MEDIA MATRASAIN*, 16(1), 49–63. <https://doi.org/10.35792/MATRASAIN.V16I1.25284>
- BBC Indonesia. (2017). *Kampung Pelangi Semarang yang menarik perhatian dunia*. BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-39958580>
- Berutu, N. N. (2020). IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG WISATA RAMAH ANAK DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK ANAK DI BELAWAN

BAHARI KOTA MEDAN. *SKRIPSI*. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/5417>

- Chrischa, L., Vikitha, M., Liey, P., & Anom, P. (2021). Implikasi Pengembangan Kampung Wisata Jodipan Terhadap Aspek Lingkungan Di Kota Malang, Jawa Timur. *JURNAL DESTINASI PARIWISATA*, 9(1), 152–157. <https://doi.org/10.24843/JDEPAR.2021.V09.I01.P19>
- De, G., Lai, J., Pratiwi, N. N., & Septianti, A. (2021). ANALISIS POTENSI PENGEMBANGAN KAMPUNG WISATA KREATIF DESA SEKIDA KECAMATAN JAGOI BABANG. *JeLAST : Jurnal PWK, Laut, Sipil, Tambang*, 8(1). <https://doi.org/10.26418/JELAST.V8I1.44676>
- Dewi Nofita Sari. (2020). Penerapan smart environment pada Pemukiman Kumuh di Bantaran Kali Code Kota Yogyakarta. *GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan*. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/8854>
- DLH Semarang. (2020). Desa Wisata di Semarang Ternyata Cocok Banget untuk Anak Muda – Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. *Dlhsemarangkota.Go.Id*. <https://dlh.semarangkota.go.id/desa-wisata-di-semarang-ternyata-cocok-banget-untuk-anak-muda/>
- Dr. Eko Murdiyanti. (2020). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Dr. H. Zuchri Abdussamad, S. I. K. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Dyah Eka Noviyanti, U., Nilzam Aly, M., Fiatiano, E., Studi DII Kepariwisata, P., Wisata, B., Vokasi, F., & Srikana No, J. (2018). Potensi Pengembangan Kampung Wisata Lawas Maspati Sebagai Destinasi Wisata Baru Surabaya. *Jurnal Sains Terapan Pariwisata*, 3(2), 218–231. <https://journal.polteksahid.ac.id/index.php/jstp/article/view/76>
- Faisal Natsir, L. (2019). KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK DALAM PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH. *ASPIRASI*, 9(2), 151–155. <https://aspirasi.unwir.ac.id/index.php/aspirasi/article/view/22>
- Fatmariyanti, Y., Fauzi, A., Uin, S., Maulana, H., & Banten, I. (2023). PUBLIC POLICY BY WILLIAM DUNN: ANALYSIS AND IMPLEMENTATION. *HUMAS JOURNAL (JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES)*, 1(1), 1–9. <https://humasjournal.my.id/index.php/HJ/article/view/3>
- Firdaus, A. (2020, October 5). *Kampung Pelangi, Warna-warni di Jantung Kota Semarang*. Gaya.Id. <https://www.medcom.id/gaya/read/aNrXWRak-kampung-pelangi-warna-warni-di-jantung-kota-semarang>

- Handika, V., & Yusran, R. (2020). Implementasi Program Kotaku dalam Upaya Mengatasi Pemukiman Kumuh di Kabupaten Lima Puluh Kota. *Journal of Civic Education*, 3(3), 277–286. <https://doi.org/10.24036/JCE.V3I3.397>
- Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Andriani Helmina, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, & Ria Rahmatul Istiqomah. (2020). *METODE PENELITIAN KUALITATIF & KUANTITATIF* (A. Md. ,AK Husnu Abadi, Ed.; I). CV. Pustaka Ilmu.
- Hartono, I. W., Farhan, W., Hardiyanti, I. F. E., Dwi, P., & Yoga, N. A. (2020). Implementasi Konsep Kampung Tematik sebagai Solusi Permukiman Kumuh di Kauman Jember. *MATRAPOLIS: Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 1(1), 31–45. <https://doi.org/10.19184/MATRAPOLIS.V1I1.19220>
- Haryati Kamarudin. (2017). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. *SKRIPSI*. <https://eprints.umm.ac.id/35915/1/jiptumpp-gdl-haryatikam-49116-1-pendahul-n.pdf>
- Imelda Christianingrum, S., & Djumiarti Jurusan Administrasi Publik, T. (2019). IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH DI KECAMATAN SEMARANG TIMUR. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(2), 88–105. <https://doi.org/10.14710/JPPMR.V8I2.23515>
- Irfan Setiawan, E. T. F. A. (2022, February 13). *PENERAPAN KONSEP SMART CITY DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN KOTA SEMARANG*. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah* Vol. 14 No. 1 Pp. 97 - 116.
- Islami, M. F., & Hadi, K. (2021). Implementasi Pengembangan Wisata Kampung Keramat di Kota Malang. *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 7(2), 176–188. <https://doi.org/10.22219/SOSPOL.V7I2.11307>
- Istiyani, N., Khairul, H., & Haras, T. (2019). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN GORONTALO. *Gorontalo Journal of Public Administration Studies*, 2(1), 41–51. <https://doi.org/10.32662/GJPADS.V2I1.554>
- KAEHE, D., RURU, J. M., & ROMPAS, W. (2019). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KAMPUNG PINTARENG KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA. *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 5(80). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/25447>
- Kinanti, A. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung Tematik (Studi Kasus Kampung Tahu Tempe Gumregah di Kelurahan Lamper Tengah, Kota Semarang). *Journal of Politic and Government Studies*. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/23553/21451>

- KlikWarta. (2023). Wali Kota Semarang Tanda Tangan MoU Lanjutan dengan Pemerintah Kota Fuzhou. *KlikWarta.Com*. <https://www.klikwarta.com/wali-kota-semarang-tanda-tangani-mou-lanjutan-dengan-pemerintah-kota-fuzhou>
- Kompas. (2023). Profil Hevearita Gunaryanti Rahayu, Wali Kota Semarang Wanita Pertama Halaman all - Kompas.com. *Kompas.Com*. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/01/31/150000365/profil-hevearita-gunaryanti-rahayu-wali-kota-semarang-wanita-pertama-?page=all>
- Kompas.com. (2023). Mengenal 5 Desa Wisata di Semarang, Ada Desa Wisata Lerep. *Kompas.Com*. <https://regional.kompas.com/read/2023/01/31/162215678/mengenal-5-desa-wisata-di-semarang-ada-desa-wisata-lerep?page=all>
- Kusumawati, E. N., T, R. V. K., Simbiak, H. M., Lagamakin, lisabeth L., D.R, A. T. C. S., Sembiring, R. N., Royen, A., Saflombolo, O. D., Boba, E. R., K, N. P. D., Mulyani, A. T., Larono, F. D., S, G. A., A.N, L. C., & Hendri, Y. (2021). Pemberdayaan masyarakat kampung sayur perkotaan menjadi kampung wisata berbasis edukasi melalui implementasi Urban Farming. *Unri Conference Series: Community Engagement*, 3, 406–411. <https://doi.org/10.31258/UNRICSC.3.406-411>
- M. Iqbal Hasan. (2002). *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia.
- Maulana, D., & Yulianti, R. (2021). Kolaborasi Aktor Dalam Pelaksanaan Kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kecamatan Kasemen Kota Serang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 9(2), 314–323. <https://doi.org/10.47828/JIANAASIAN.V9I2.79>
- Merilee S. Grindle. (2017). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Nisa Hafizhotus Syarifa, & Wijaya, A. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan melalui Program Kampung Tematik (Studi Kasus di Kampung Batik Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang). *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture*, 8(1), 515–531. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/solidarity/article/view/31301>
- Nur, A. C., & Guntur, M. (2019). *ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK*. Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar. <https://www.researchgate.net/publication/350619992>
- Nuryanti Mustar. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik (I)*. PT Leutika Nouvalitera.
- Obot, F., & Setyawan, D. (2019). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BATU DALAM MEWUJUDKAN KOTA PARIWISATA BERKELANJUTAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN. *Jurnal Ilmu*

- Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 6(3), 113. <https://doi.org/10.33366/JISIP.V6I3.1469>
- Putri, S. A. E. (2019). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Untuk Meningkatkan Kemandirian Perempuan : Studi Kasus Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (MEKAAR) di DKI Jakarta*.
- Radar Semarang. (2022). *Kampung Pelangi Semarang Mulai Memudar*. Jawa Pos RadarSemarang. <https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/semarang/2022/02/18/kampung-pelangi-semarang-mulai-memudar/>
- Ramadhana, B., Rahardjo, P., & Wipranata, I. (2019). PENATAAN KAMPUNG WISATA KREATIF DAGO POJOK BANDUNG. *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa)*, 1(2), 2313–2322. <https://doi.org/10.24912/STUPA.V1I2.4604>
- RUSMAN, R. (2019). *EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAMPUNG PELANGI (Studi Kasus: Kampung Wonosari RW 3 Dan 4 Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang)*.
- Saragih, E., Saragih, E., Esariti, L., & Wahyono, H. (2021). PENCAPAIAN TUJUAN PROGRAM KAMPUNG TEMATIK BERBASIS PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KAMPUNG SENTRA BANDENG. *Jurnal Pengembangan Kota*, 9(2), 143–153. <https://doi.org/10.14710/jpk.9.2.143-153>
- SemarangKota. (2016). *Kampung Tematik Kota Semarang*. <https://kampungtematik.semarangkota.go.id/web/profile>
- Sitorus, H., Astuti, R. S., & Purnaweni, H. (2020). Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Menanggulangi Kawasan Kumuh di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 8(1), 74–94. <https://doi.org/10.30656/SAWALA.V8I1.1617>
- Sumastuti, E., Prabowo, H., Violinda, Q., Manajemen, P., Ekonomi, F., Bisnis, D., PGRI Semarang, U., Sidodadi, J., No, T., & Semarang, C. (2021). Pengembangan Wisata Kota Semarang. *Khasanah Ilmu - Jurnal Pariwisata Dan Budaya*, 12(1), 30–38. <https://doi.org/10.31294/KHI.V12I1.8889>
- Suwitri, S., Yuniningsih, T., & Ismail, R. G. (2019). Implementasi Kebijakan Pariwisata Bahari Di Kota Di Kota Semarang : *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 7(1), 47–54. <https://doi.org/10.47828/JIANAASIAN.V7I01.36>
- Tamara, A. P., & Rahdriawan, M. (2018). Kajian Pelaksanaan Konsep Kampung Tematik di Kampung Hidroponik Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 6(1), 40. <https://doi.org/10.14710/JWL.6.1.40-57>
- Trinanda Meinar, A. (2018). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN WALIKOTA TEGAL NO 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN*

*INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL (Kajian Pasal 6 Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Badan Publik).*

- Triyono, T. (2020). Pemberdayaan Komunitas Seni Tradisional untuk Mendukung Kampung Tematik Seni, di Kampung Seni Jurang Belimbing, Kota Semarang. *Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat UNDIP 2020*, 1(1). <http://proceedings.undip.ac.id/index.php/semnasppm2019/article/view/438>
- Tunggadewi & Christiani. (2019). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARIWISATA BERDASARKAN KEARIFAN LOKAL (STUDI KASUS KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT) - CORE Reader*. Jurnal REFERENSI. <https://core.ac.uk/reader/229028450>
- Yoga. (2018, March 26). *KAMPUNG PELANGI - Bidang Pariwisata*. <https://kecsmsgselatan.semarangkota.go.id/bidang-pariwisata/kampung-pelangi>
- Yopiannor, F. Z., & Wibowo, N. E. (2019). Collaboration in Implementation of Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Program in Palangka Raya City. *Iapa Proceedings Conference*, 574–595. <https://doi.org/10.30589/PROCEEDINGS.2019.255>

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Surat Ijin Penelitian di Kelurahan Rndusari dan Kampung Pelangi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185  
Telepon (024) 76435986; Website: [www.fisip.walisongo.ac.id](http://www.fisip.walisongo.ac.id)

Nomor : 2973/Un.10.6/K/KM.05.01/12/2022 Semarang, 14 Desember 2022  
Lamp : -  
Hal : Pemohonan Ijin Penelitian

Yth.  
Kelurahan Randusari dan Pengurus Kampung Pelangi Kota Semarang  
di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "Implementasi Kebijakan Melalui Politik Pembangunan Kampung Pelangi Kota Semarang" di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Hana' Fairuz Suci Ramadhani  
NIM : 1906016122  
Semester : VII (Tujuh)  
Jurusan : Ilmu Politik  
Tempat/ Tgl lahir : Semarang, 19 Desember 2000  
CP/e-mail : hanafairuz46323@gmail.com  
Nama Ayah/ Ibu : Unggul Tri Prasetyo  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Jl. Menoreh Tengah XII C RT 07 RW 04

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



H. A. Gunawan, S. Ag, M. H

Tembusan :  
Dekan FISIP UIN Walisongo

## Lampiran 2. Surat Ijin Penelitian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185  
Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 917/Un.10.6/K/KM.05.01/04/2023  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

06 April 2023

Yth.  
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang  
Di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "Implementasi Program Pengembangan Kampung Pelangi di Kota Semarang" di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Hana' Fairuz Suci Ramadhani  
NIM : 1906016122  
Semester : VIII  
Jurusan : Ilmu Politik  
Tempat/ Tgl lahir : Semarang, 19 Desember 2000  
CP/e-mail : hanafairuz46323@gmail.com  
Nama Ayah/ Ibu : Unggul Tri Prasetyo  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Jl. Menoreh Tengah XII C, Sampangan Kota Semarang

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

  
Kastib, bag Akademik  
Gunawan, S.Ag, M.H

Tembusan :  
Dekan FISIP UIN Walisongo

### Lampiran 3. Pedoman Wawancara Penelitian

<b>Fokus Penelitian</b>	<b>Lingkup Pertanyaan</b>	<b>Arah Pertanyaan</b>	<b>Informan</b>
<b>Proses Implementasi Program Pengembangan Kampung Pelangi di Kota Semarang (Kebijakan Isi Marilee S. Grindle)</b>	Kepentingan Yang Mempengaruhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program yang dicetuskan</li> <li>• Tujuan Pembentukan Program</li> <li>• Target kelompok sasaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</li> <li>• Pokdarwis Kampung Pelangi</li> <li>• Masyarakat Kampung Pelangi</li> </ul>
	Tipe Manfaat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manfaat dari pembangunan Kampung Pelangi dan program yang dilaksanakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</li> <li>• Pokdarwis Kampung Pelangi</li> <li>• Masyarakat Kampung Pelangi</li> </ul>
	Perubahan yang ingin dicapai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan yang diharapkan masing-masing pihak dan berorientasi pada masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</li> <li>• Pokdarwis Kampung Pelangi</li> <li>• Masyarakat Kampung Pelangi</li> </ul>
	Letak Pengambilan Keputusan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan sasaran dalam proses mengambil keputusan pada program pengembangan Kampung Pelangi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</li> <li>• Kelurahan Setempat</li> <li>• Pokdarwis Kampung Pelangi</li> <li>• Masyarakat Kampung Pelangi</li> </ul>
	Pelaksanaan Program	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sikap para pelaksana yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</li> <li>• Pokdarwis Kampung Pelangi</li> <li>• Masyarakat Kampung Pelangi</li> </ul>
	Sumber daya yang mendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemampuan dan Kompetensi personil</li> <li>• Pemanfaatan sarana dan prasarana</li> <li>• Sumber dana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</li> <li>• Pokdarwis Kampung Pelangi</li> <li>• Masyarakat Kampung Pelangi</li> </ul>
<b>Relasi Antar Aktor Dalam Program</b>	Kekuasaan, Kepentingan, Strategi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Relasi para aktor dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</li> <li>• Pokdarwis Kampung Pelangi</li> </ul>

<b>Fokus Penelitian</b>	<b>Lingkup Pertanyaan</b>	<b>Arah Pertanyaan</b>	<b>Informan</b>
<b>Pengembangan Kampung Pelangi (Lingkungan Implementasi Merilee S. Grindle)</b>	pelaksana yang terlibat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keefektifan strategi yang digunakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat Kampung Pelangi</li> </ul>
	Karakteristik Lembaga dan Penguasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peran dari aktor lembaga yang terlibat</li> <li>• Pola komunikasi yang terjalin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</li> <li>• Pokdarwis Kampung Pelangi</li> <li>• Masyarakat Kampung Pelangi</li> </ul>
	Kepatuhan dan Daya Tanggap	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Respon dari para pihak terkait</li> <li>• Sejauhmana keterlibatan dari para pihak dalam merespon program pengembangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</li> <li>• Pokdarwis Kampung Pelangi</li> <li>• Masyarakat Kampung Pelangi</li> </ul>

**Lampiran 4. Dokumentasi Wawancara Penulis dengan Pokdarwis dan Masyarakat Kampung Pelangi**





**Lampiran 5. Dokumentasi Wawancara dengan Divisi Kelembagaan Dinas  
Pariwisata**



## Lampiran 6. Daftar Riwayat Hidup

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

#### A. Identitas Diri

1. Nama : Hana' Fairuz Suci Ramadhani
2. NIM : 1906016122
3. Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 19 Desember 2000
4. Alamat : Jl. Menoreh Tengah XII C,  
Sampangan Kota Semarang
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Agama : Islam
7. No. Hp : 082133749737
8. Email : [hanafairuz463232@gmail.com](mailto:hanafairuz463232@gmail.com)



#### B. Riwayat Pendidikan

##### 1. Pendidikan Formal

No	Jenjang Pendidikan	Tahun Kelulusan
1.	TK Islam Al-Madina	2006
2.	SD Islam Al-Madina	2013
3.	SMP N 13 Semarang	2016
4.	SMA N 7 Semarang	2019